

Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan

Halaman

I Nyoman Normal

Pengaruh Upah Minimum Kota Denpasar Terhadap Biaya Konversi, Harga Pokok Produksi, dan Harga Jual Massa Raga BPC-1 Pada BTIKK

53-65

Anak Agung Gde Mantra Suarjana dan Nyoman Indah Kusuma Dewi

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali

66-79

Kiet Tumiwa dan Nixon Sondakh

Maksimisasi Keuntungan Usaha Tani Pala Melalui Pengelolaan Sistem Agrobisnis di Kabupaten Minahasa Utara

80-91

I Gede Made Subagiana, I Gusti Lanang Suta Artatanaya dan Ni Luh Made Wijayati

Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) pada Tiga Perkampungan Nelayan Air Kuning, Pengembangan dan Candi Kusuma Kabupaten Jembrana Propinsi Bali (Suatu Studi Komparatif)

92-98

Wayan Hesadijaya Utthavi dan Pande Komang Surya SandjayaEvaluasi Pajak Penghasilan Badan Atas Perolehan Aset Tetap Metode *Financial Leasing* Studi Kasus Perolehan Aset Tetap pada Kubu Cempaka Hotel

99-112

Anak Agung Gde Mantra Suarjana dan Ni Nyoman Yintayani

Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Serta Dampaknya Pada Alokasi Biaya Modal pada Pemerintah Kabupaten Gianyar

113-124

Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan	Vol.14	No.2	Halaman 53 -124	Juli 2018	ISSN 2580-5614
---------------------------------------	--------	------	--------------------	--------------	-------------------

JURNAL BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN

Vol. 14, No. 2, Juli 2018

p-ISSN: 0216-9843

e-ISSN: 2580-5614

Ketua Penyunting:

Nyoman Indah Kusuma Dewi

Penyunting Ahli:

I Ketut Santra

Gede Santanu

Ni Gusti Nyoman Suci Murni

Ni Nyoman Aryaningsih

Nyoman Sentosa Hardika

I Nyoman Suka Sanjaya (Penyunting Bahasa Inggris)

I Gusti Putu Sutarma (Penyunting Bahasa Indonesia)

Mitra Bestari:

Dedy Saefulloh

Ruhadi Nansuri

Indah Martati

Daisy Sundah

Iis Mariyam.

Trianasari

I Gede Sudjana Budiasa

Anggota Admin:

Cokorda Gde Candra Hadiputra

Alamat Editor dan Tata Usaha:

Redaksi Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan

Politeknik Negeri Bali, Kampus Bukit Jimbaran – Kuta Selatan, Badung, Bali, Indonesia 80361

Phone: (0361) 705136, 701981 – Fax: (0361) 705136, 701128

Email: p3mpoltekbali@pnb.ac.id Website: <http://ojs.pnb.ac.id/index.php/JBK>

Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan diterbitkan oleh Politeknik Negeri Bali, terbit tiga kali dalam setahun pada bulan Maret, Juli, dan Nopember. Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan terbit pertama kali tahun 2001 dengan nama Jurnal Sinergi: Bisnis dan Kewirausahaan. Sejalan dengan pembenahan dalam pengelolaan jurnal yang kami lakukan, sejak edisi tahun 2005 Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan terbit dengan ISSN baru. Redaksi menerima naskah baik dari dalam maupun dari luar Politeknik Negeri Bali. Kepastian penerimaan atau penolakan naskah akan diberitahukan secara tertulis. Penulis yang artikelnya dimuat akan mendapatkan imbalan berupa nomor bukti pemuatan sebanyak satu eksemplar. Artikel yang tidak dimuat tidak akan dikembalikan kecuali ada permintaan penulis.

Pengantar Redaksi

Pembaca yang terhormat,

Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan (sebelumnya bernama Jurnal Sinergi: Bisnis dan Kewirausahaan) mulai edisi tahun 2005 terbit dengan ISSN baru. Edisi kali ini merupakan tahun keempat belas kami terbit dengan ISSN baru tersebut.

Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan merupakan media yang ditujukan untuk membantu mendorong pengembangan, penyebaran, dan pemanfaatan informasi IPTEKS, khususnya di bidang bisnis dan kewirausahaan yang berkaitan dengan Pengaruh Upah Minimum Kota Denpasar Terhadap Biaya Konversi, Harga Pokok Produksi, dan Harga Jual Massa Raga BPC-1 Pada BTIKK, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali, Maksimisasi Keuntungan Usaha Tani Pala Melalui Pengelolaan Sistem Agrobisnis di Kabupaten Minahasa Utara, Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) pada Tiga Perkampungan Nelayan Air Kuning, Pengambengan dan Candi Kusuma Kabupaten Jembrana Propinsi Bali (Suatu Studi Komparatif), Evaluasi Pajak Penghasilan Badan Atas Perolehan Aset Tetap Metode Financial Leasing Studi Kasus Perolehan Aset Tetap pada Kubu Cempaka Hotel, dan Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Serta Dampaknya pada Alokasi Biaya Modal pada Pemerintah Kabupaten Gianyar.

Redaksi mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada para penulis yang telah memberi kepercayaan kepada Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan untuk menerbitkan karya-karyanya. Redaksi berharap terbitan kali ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi para pembaca.

Sekian dan terima kasih.

Redaksi

Pengaruh Upah Minimum Kota Denpasar Terhadap Biaya Konversi, Harga Pokok Produksi, dan Harga Jual Massa Raga BPC-1 pada BTIKK

I Nyoman Normal

Peneliti Akuntansi Keuangan, Balai Teknologi Industri Kreatif Keramik (BTIKK)-

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

Telp : 0361 723969 (k), 085792377505 (hp)

E-mail : nyomannormal311@gmail.com

Abstrak : Tujuan penelitian yang berkaitan dengan perubahan upah minimum regional kota Denpasar dan massa raga BPC-1 tahun 2013 s.d. 2018 adalah untuk mengetahui : pengaruh upah minimum regional terhadap biaya konversi, harga pokok produksi, dan harga jual. Metode penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif yang datanya bersumber dari dalam dan luar BTIKK baik yang primer maupun sekunder. Teknik analisisnya adalah sistem biaya standar berbasis biaya konversi untuk menghitung biaya konversi, sistem biaya standar berbasis biaya penuh untuk menghitung harga pokok produksi, dan metode harga jual berbasis biaya untuk menghitung harga jual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan upah minimum regional kota Denpasar dapat meningkatkan biaya konversi, harga pokok produksi, dan harga jual massa raga BPC-1, tetapi tidak secara proporsional. Penjumlahan biaya tenaga kerja langsung dan biaya pabrikase dalam memproduksi massa raga BPC-1 menghasilkan biaya konversi yang persentase kenaikannya 74,01% tahun 2018. Akumulasi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya pabrikase dalam memproduksi massa raga BPC-1 menghasilkan harga pokok produksi yang kenaikannya mencapai 6,55% tahun 2018. Harga pokok produksi ditambah tambahan laba yang diinginkan ditambah beban operasi (beban pemasaran dan beban administrasi & umum) menghasilkan harga jual yang pada tahun 2018 mengalami kenaikan 74,01%.

Kata kunci : upah minimum regional, biaya konversi, harga pokok produksi, harga jual, massa raga BPC-1.

Abstracts : The aims of this research that relateto the changing of Denpasar regional minimum wage and BPC-1 stoneware 2013 until 2018 were to examin : the influence of regional minimum wage to conversion cost, cost of goods manufactured, and cost price. The research method was quantitative descriptve which its data source of intern and extern BTIKK that primary and secondary type. Its analysis technic was : standard cost system base conversion cost to calculate conversion cost, standard cost system base full costing to calculate cost of goods manufactured, and cost-plus pricing method to calculate cost price. The research results showed that the addition of regional minimum wage Denpasar Region can increase conversion cost, cost of goods manufactured, and cost price of BPC-1 stoneware, but it was not proportionally. The addition of direct labor cost and manufacturing overhead cost into produced BPC-1 stoneware results conversion cost which its increasing was 74,01% in 2018. The addition of raw material cost, direct labor cost, and manufacturing overhead cost to produce BPC-1 stoneware resulted in the cost of goods manufactured to increase to 6,55% in 2018. The cost of goods manufactured plus expected profit margin plus operational cost (marketing cost and general & administrative cost) resulted in cost price in 2018 to increaseby about 74,01%.

Keywords : regional minimum wage, conversion cost, cost of goods manufactured, cost price, BPC-1 stoneware.

PENDAHULUAN

Tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan pemilik perusahaan dengan cara meningkatkan nilai perusahaan (Kherismawati, et al, 2016:132). Nilai perusahaan mencerminkan nilai aset yang dimiliki perusahaan, seperti: kas, surat-surat berharga, piutang, dan persediaan. Dunia akan berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan di berbagai sektor. Sektor industri memegang peranan penting dalam perkembangan ekonomi karena perusahaan industri (pabrik) ini menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat, serta dapat menyerap tenaga kerja yang banyak dan meningkatkan taraf hidup masyarakat (Normal & Nurani, 2016:15). Perusahaan industri (pabrik) merupakan perusahaan yang kegiatannya

mengolah bahan baku menjadi barang jadi dan kemudian barang jadi tersebut dijual kepada masyarakat yang membutuhkannya. Pengolahan bahan baku ini disebut dengan proses produksi.

Pencapaian perusahaan dalam memaksimalkan nilai perusahaan dapat dicapai dengan melaksanakan fungsi manajemen keuangan melalui pemberian kebijakan keuangan untuk memengaruhi keputusan keuangan lainnya (Sukirni, 2012). Nilai perusahaan yang tinggi akan memberikan *return* bagi pemegang saham, sehingga nilai tersebut akan dipandang investor sebagai informasi yang penting dalam mengambil keputusan investasi. Manajemen harus memerhatikan manfaat dan biaya yang ditimbulkan ketika berpikir untuk menggunakan dana dari pendanaan internal (*retained earning* atau depresiasi) atau eksternal (hutang dan ekuitas) atau kedua-duanya. Hal itu dikarenakan setiap sumber dana mempunyai konsekuensi dan karakteristik finansial yang berbeda (Meythi, 2012).

Setiap perusahaan yang didirikan akan senantiasa mempertahankan eksistensi kinerjanya untuk mencapai suatu tingkat pertumbuhan tertentu (Marheni, et al., 2015:230). Kemampuan kerja (kinerja) adalah yang dilakukan atau tidak dilakukan karyawan. Kinerja karyawan adalah yang memengaruhi seberapa banyak mereka memberi kontribusi kepada organisasi. Perbaikan kinerja baik untuk individu maupun kelompok menjadi pusat perhatian dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi. Keterampilan kewirausahaan merupakan sebuah kebutuhan bagi setiap pelaku bisnis Setijani, E., et al (2015:283). Hal ini terungkap dari banyak temuan riset bahwa daya saing dan keberlangsungan sebuah entitas bisnis ditentukan oleh kecakapan tersebut. Dukungan fakta empiris terdapat dalam temuan Sirivanth, T., et al (2014), dalam artikel hasil risetnya yang menyatakan bahwa daya saing dan kinerja industri kecil banyak dipengaruhi oleh kecakapan kewirausahaan.

Pendapat tersebut juga dibenarkan oleh Fatoki (2014) dalam risetnya yang dilakukan pada bisnis retail juga mengungkapkan bahwa kewirausahaan mempunyai dampak nyata pada kinerja bisnis. Maknanya, keterampilan kewirausahaan sangat penting untuk meningkatkan kinerja usaha, yang tentu didalamnya terdapat indikator kinerja keuangan. Hal ini karena kinerja usaha pada umumnya diukur melalui informasi finansial seperti capaian keuntungan, perkembangan aktiva, dan penjualan. Di samping itu, juga diukur dari aspek nonfinansial seperti kepuasan pelanggan, internal bisnis yang menguntungkan, serta inovasi. Objek yang biasa diukur adalah bagian keuangan. Fenomena persoalan industri kecil sebenarnya tidak banyak berbeda dengan kebanyakan industri kecil lainnya. Bahkan di antaranya sulit berkembang, bahkan banyak pula yang kolaps.

Perusahaan manufaktur di Indonesia merupakan penopang utama perkembangan industri (Rolita, 2014). Peningkatan laju pertumbuhan manufaktur dikarenakan adanya konsumsi domestik yang meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir (Maryam, 2013). Sektor industri manufaktur berkontribusi hingga 20,85% terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional. Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Oleh karena itu, sebagai pengelola, manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik.

Balai Teknologi Industri Kreatif Keramik (BTIKK) adalah salah satu balai yang berada di bawah kedeputan Pengkajian Kebijakan Teknologi (PKT), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), yang sebelumnya bernama Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Seni dan Teknologi Keramik dan Porselin (UPT PSTKP) Bali. Tugas pokok BTIKK adalah melakukan penelitian & pengembangan, pembinaan & perekayasaan, dan pelayanan jasa teknologi industri kreatif keramik di Indonesia, khususnya Indonesia bagian timur. Jasa teknologi yang dihasilkan oleh BTIKK adalah jasa pengolahan bahan baku keramik, jasa pelayanan bahan baku keramik siap pakai, jasa desain keramik, jasa pembakaran keramik, dan jasa pendidikan & pelatihan keramik.

Sejak tahun 2013 s.d. 2018, BTIKK telah melakukan jasa teknologi pelayanan bahan baku keramik siap pakai untuk massa raga BPC-1 yang mempergunakan upah minimum regional kota Denpasar sebagai dasar perhitungan biaya tenaga kerja langsung, biaya konversi, harga pokok produksi, dan harga jual. Hal tersebut tentu sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini, karena telah terjadi peningkatan upah minimum regional Kota Denpasar sejak tahun 2013 s.d. 2018, bahkan pada tahun 2018 upah minimum regional Kota Denpasar telah mencapai Rp 2.363.000,00 per bulan atau Rp 14.768,75 per jam, sehingga telah mengalami kenaikan sebesar 74,01% dibandingkan tahun 2013. Apabila kondisi ini tidak dilakukan evaluasi, maka akan terjadi pembebanan biaya produk yang lebih rendah dari yang seharusnya, terutama biaya tenaga kerja langsung, biaya konversi, harga pokok produksi, dan harga jual jasa pelayanan bahan baku keramik siap pakai BPC-1. Perubahan upah minimum Kota Denpasar enam tahun terakhir ditunjukkan pada pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1
Upah Minimum Kota Denpasar Enam Tahun Terakhir Tahun 2013 s.d 2018

Uraian	Tahun						Ket
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
UMK (Rp/Bulan)	1.358.000,00	1.656.900,00	1.800.000,00	2.007.000,00	2.173.000,00	2.363.000,00	-
UMK (Rp/Jam)	8.487,50	10.355,63	11.250,00	12.543,75	13.581,25	14.768,75	-
Kenaikan (%)	-	22,01	32,55	47,79	60,01	74,01	-

Sumber : Peraturan Gubernur Bali No.65 tahun 2017, dan www.gaji.umar.com, 2018.

Penelitian ini perlu dilakukan untuk : menentukan biaya konversi, harga pokok produksi, dan harga jual (tarif) jasa pelayanan massa raga BPC-1 yang benar, dan mengetahui pengaruh kenaikan upah minimum regional kota Denpasar terhadap biaya konversi, harga pokok produksi, dan harga jual (tarif). Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi BTIKK, IKM keramik, akademisi, lembaga penelitian, dan pihak lainnya sebagai informasi dalam proses pengkajian dan pengembangan perubahan tarif upah minimum regional kota Denpasar terhadap kondisi keuangan, khususnya biaya konversi, harga pokok produk, dan harga jual (tarif) produk keramik dalam rangka meningkatkan ekonomisasi biaya produk.

Imbalan yang diberikan kepada buruh-buruh yang melakukan pekerjaan kasar dan lebih banyak mengandalkan kekuatan fisik, disebut upah (Soemarso, 2014:335). Pada umumnya jumlah upah ditetapkan secara harian atau berdasarkan unit pekerjaan yang diselesaikan. Gaji adalah balas jasa karyawan yang melakukan pekerjaan manajemen dan administratif, biasanya dibayar bulanan. Biaya upah (*labor cost*) merupakan sumbangan tenaga manusia kepada produksi dan juga merupakan suatu faktor biaya yang senantiasa perlu diukur (Matz dan Usry, 2014:441). Faedah ekonomis dari peningkatan produksi dengan biaya unit yang lebih rendah bersamaan dengan semakin meningkatnya tarif upah dan jaminan sosial yang senantiasa bertambah, telah mempercepat arus ke arah penggunaan yang lebih banyak alat-alat perlengkapan otomatis menghasilkan lebih banyak barang dalam jam kerja yang kurang banyak.

Tarif yang ditetapkan sebagai standar adalah tarif yang biasa dibayar untuk suatu pekerjaan atau klasifikasi pekerjaan sebagaimana melalui pemufakatan kolektif/*collective bargaining* (Heckert (2013:329). Estimasi jam yang diperlukan untuk kegiatan buruh dalam membuat produk sudah tersedia insinyur-insinyur yang bekerja di bagian produksi dengan berbagai macam teknik bisa menentukan standar waktu yang disebut *time study* (penyelidikan waktu) untuk tiap-tiap operasi, misalnya dengan menggunakan *stopwatch* untuk menentukan waktu yang efisien dari pekerja untuk berproduksi. Untuk menilai kewajaran tarif upah, seharusnya dibayar untuk setiap kegiatan yang dilakukan. Menurut Hansen and Mowen (2013) : selisih biaya upah

langsung ditentukan oleh tiga faktor, yaitu : (1) *Actual Hours at Actual Rate*; (2) *Actual Hours at Standard Rate*; (3) *Standard Hours at Standard Rate*. Menurut Supriyono (2014:458) terdapat beberapa sistem pemberian gaji (upah) yaitu : (a) Sistem Premi Bonus Berdasar Jam Kerja, yang terdiri dari : (1) Premi sistem Halsey, (2) Premi sistem Rowan, (3) Premi sistem Bart, dan (4) Sistem Efisiensi Emerson; (b) Sistem premi Bonus Berdasar Satuan Hasil, yang terdiri dari : (1) *Straight Piecework*, (2) Sistem Taylor; (c) Bonus Kelompok.

Untuk mencapai keadilan dan kewajaran pemberian upah kepada pekerja, pemerintah provinsi biasanya menentukan sistem pengupahan yang disebut upah minimum regional, yang perhitungannya disesuaikan dengan kondisi daerahnya, terutama APBD daerah masing-masing. Upah Minimum Regional adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Pemerintah mengatur pengupahan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989 tentang Upah Minimum. Penetapan upah dilaksanakan setiap tahun melalui proses yang panjang. Mula-mula Dewan Pengupahan Daerah (DPD) yang terdiri dari birokrat, akademisi, buruh dan pengusaha mengadakan rapat, membentuk tim survei dan turun ke lapangan mencari tahu harga sejumlah kebutuhan yang dibutuhkan oleh pegawai, karyawan dan buruh. Setelah survei di sejumlah kota dalam provinsi tersebut yang dianggap representatif, diperoleh angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) - dulu disebut Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Berdasarkan KHL, DPD mengusulkan upah minimum regional (UMR) kepada Gubernur untuk disahkan. Komponen kebutuhan hidup layak digunakan sebagai dasar penentuan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup pekerja lajang (belum menikah). Saat ini upah minimum regional juga dikenal dengan istilah Upah Minimum Provinsi (UMP) karena ruang cakupannya biasanya hanya meliputi suatu provinsi. Selain itu setelah otonomi daerah berlaku penuh, dikenal juga istilah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Biaya konversi adalah biaya yang digunakan untuk mengubah bahan baku menjadi produk selesai (barang jadi). Biaya konversi = biaya tenaga kerja langsung + biaya *overhead* pabrik (Supriyono, 2014:151). Biaya konversi sesungguhnya adalah semua elemen biaya yang dikeluarkan dalam rangka mengubah bahan baku menjadi barang jadi (produk selesai). Biaya konversi ini detailnya terdiri dari : (1) komponen biaya tenaga kerja langsung yang terlibat secara langsung dalam pengolahan bahan baku, yang biasanya terdiri dari jumlah jam kerja yang digunakan untuk memproduksi bahan baku dikalikan dengan tarif per jam kerja; dan (2) komponen biaya *overhead* pabrik yang diperlukan dalam proses pengolahan bahan baku menjadi produk selesai (barang jadi), seperti : bahan penolong, upah tak langsung, listrik pabrik, air pabrik, asuransi pabrik, dan penyusutan pabrik.

Gabungan dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya *overhead* pabrik membentuk biaya produksi (Rudianto, 2013:95). Itu berarti bahwa biaya produksi adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan sejumlah produk yang siap dijual. Biaya barang yang telah diselesaikan selama satu periode disebut harga pokok produksi barang selesai (*cost of goods manufactured*) atau disingkat dengan harga pokok produksi (Soemarso, 2014:295). Harga pokok ini terdiri dari biaya pabrik ditambah persediaan dalam proses awal periode dikurangi persediaan dalam proses akhir periode. Harga pokok produksi selama satu periode dilaporkan dalam laporan harga pokok produksi (*cost of goods manufactured statement*). Laporan ini merupakan bagian dari harga pokok penjualan (*cost of goods sold*). Biaya produksi (*production cost*) adalah biaya yang dibebankan dalam proses produksi selama suatu periode. Biaya ini terdiri dari persediaan dalam proses awal ditambah biaya pabrik. Termasuk dalam biaya produksi adalah biaya-biaya yang dibebankan pada persediaan dalam proses pada akhir periode.

Penetapan harga jual produk memerlukan berbagai pertimbangan yang terintegrasi (Rudianto, 2013:127). Mulai dari biaya produksi, biaya operasi, target laba yang diinginkan perusahaan, daya beli masyarakat, harga jual pesaing, kondisi perekonomian secara umum, elastisitas harga produk, dan sebagainya. Penentuan harga jual produk perusahaan harus menjadi kebijakan yang harus benar-benar dipertimbangkan secara matang dan terintegrasi. Kebijakan harga yang dipilih perusahaan akan berpengaruh secara langsung terhadap berhasil tidaknya perusahaan mencapai tujuannya. Walaupun terdapat banyak aspek yang dipertimbangkan oleh perusahaan dalam menentukan harga jual produk, seringkali faktor biaya dijadikan titik tolak dalam penetapan harga jual produk. Kebijakan harga jual produk dan biaya akan selalu berubah-ubah sejalan dengan perubahan biaya produk serta kondisi pasar. Metode penentuan harga jual menurut Mulyadi (2013:350) adalah : (1). Penentuan Harga Jual Normal (*Normal Pricing*) : sering disebut metode *cost-plus pricing*, karena harga jual ditentukan dengan menambah biaya masa yang akan datang dengan suatu persentase *markup* (tambahan di atas jumlah biaya) yang dihitung dengan formula tertentu. Formulasinya adalah, Harga jual = Taksiran biaya penuh + Laba yang diharapkan; (2). Penentuan Harga Jual dalam *Cost-type Contract (Cost-type Contract Pricing)*: kontrak pembuatan produk atau jasa yang pihak pembeli setuju untuk membeli produk atau jasa pada harga yang didasarkan pada total biaya yang sesungguhnya dikeluarkan oleh produsen ditambah dengan laba yang dihitung sebesar persentase tertentu dari total biaya sesungguhnya tersebut. Harga jual = Biaya sesungguhnya untuk membuat dan memasarkan produk + Laba. Laba = % tertentu dari Biaya sesungguhnya untuk membuat dan memasarkan produk; (3). Penentuan Harga Jual Pesanan Khusus (*Special Order Pricing*) : dalam mempertimbangkan penerimaan pesanan khusus, informasi akuntansi diferensial merupakan dasar yang dipakai sebagai landasan penentuan harga jual. Jika harga jual yang diminta oleh pemesan (harga jual pesanan khusus) lebih besar dari biaya diferensial yang berupa biaya variabel untuk memproduksi dan memasarkan pesanan khusus tersebut, maka pesanan khusus tersebut dapat dipertimbangkan untuk diterima; dan (4). Penentuan Harga Jual Produk atau Jasa yang Dihasilkan oleh Perusahaan yang Diatur dengan Peraturan Pemerintah: produk dan jasa yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat luas, seperti listrik, air, telepon & telegraf, transportasi, dan jasa pos diatur dengan peraturan pemerintah. Harga jual produk dan jasa tersebut ditentukan berdasarkan biaya penuh masa yang akan datang ditambah dengan laba yang diharapkan.

Penelitian terdahulu berkaitan dengan judul penelitian ini yang pernah dilakukan adalah : (1). Gumi, W. S. & Normal, I. N. (2017) meneliti pengembangan jasa pelayanan bahan keramik siap bentuk BPC-1 dalam meningkatkan ekonomisasi biaya produksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: jasa pelayanan bahan keramik siap bentuk BPC-1 bersifat homogen yang terdiri dari lima jenis bahan, sebagai bahan baku alternatif dari BL-1, biaya bahan bakunya lebih rendah, biaya produksinya lebih rendah, harga jualnya lebih rendah, dan dapat meningkatkan laba; (2). Normal, I. N. (2014) meneliti pengaruh tambahan berat kuarsa terhadap sifat fisik dan tingkat profitabilitas massa raga keramik (*stoneware*) berkode BSK pada suhu 1.200°C pada UPT PSTKP Bali. Hasil penelitiannya adalah: penambahan berat kuarsa dapat meningkatkan biaya bahan baku massa raga BSK. Penambahan 1,50% kuarsa meningkatkan biaya bahan baku sebesar 2,24%, penambahan 4,00% kuarsa meningkatkan biaya bahan baku sebesar 5,96%, penambahan 6,5% kuarsa meningkatkan biaya bahan baku sebesar 9,68%, dan penambahan 9,00% meningkatkan biaya bahan baku sebesar 13,42%; (3). Geriya, I. M. (2014) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi eksistensi produk kriya yang memotivasi dalam proses produksi adalah faktor individu, pendidikan, teknologi informasi, pariwisata, dan pemasaran; (4). Normal, I. N. (2016) meneliti penerapan upah minimum regional tahun 2016 dalam menentukan tarif jasa teknologi desain dulang keramik, yang menghasilkan: kenaikan upah minimum regional dapat meningkatkan harga pokok produksi, perbandingan tarif jasa teknologi tahun 2015 ke 2016

adalah 1,07, kenaikan upah minimum regional tahun 2016 dapat meningkatkan profitabilitas; (5). Sudana, I. W. (2014) meneliti tentang pentingnya revitalisasi cara pengolahan bahan baku, keterampilan teknik produksi, dan kualitas hasil produksi kerajinan gerabah Gorontalo adalah melalui penerapan sinergi tiga konsep revitalisasi, yaitu : revitalisasi pengolahan bahan baku, revitalisasi teknik produksi, dan revitalisasi hasil produksi; dan (6). Gumi, W. S., Normal, I. N., & Mahanavami, G. A. (2016) meneliti penyesuaian tarif jasa teknologi bahan keramik BJN-4 sesuai elemen biaya tahun 2016 pada BTIKK-BPPT, yang menghasilkan harga pokok produksi bahan keramik berwarna siap bentuk BJN-4 yang seharusnya adalah Rp 3.305,02 per kg yang terdiri dari biaya bahan baku Rp 2.303,59, biaya tenaga kerja langsung Rp 398,08, biaya *overhead* pabrik variabel Rp 174,94, dan biaya *overhead* pabrik tetap Rp 428,41, dengan tarif (harga jual) yang seharusnya adalah Rp 4.296,53 per kg.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Data kualitatif, yaitu data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar (Sugiyono, 2013:13). Pada penelitian ini, data kualitatif yang digunakan adalah: sejarah berdirinya BTIKK, aktiva tetap, struktur organisasi, fungsi pokok BTIKK, uraian tugas, proses pembuatan, dan jenis bahan baku pengolahan massa raga BPC-1 dan (2) Data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka, atau data kualitatif yang diangkakan (skoring : baik sekali = 4, baik = 3, kurang baik = 2, dan tidak baik = 1). Pada penelitian ini, data kuantitatif yang digunakan adalah: biaya penyusutan aktiva tetap, kuantitas bahan, harga bahan, biaya listrik, biaya telepon, biaya air, biaya tenaga kerja selama proses produksi, komposisi bahan, harga pokok produk massa raga BPC-1, jam mesin, jam tenaga kerja langsung, dan Upah Minimum Kota Denpasar, beban operasi, beban lainnya.

Sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : (1) data primer, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh seorang peneliti atau suatu lembaga tertentu langsung dari sumbernya, dicatat dan diamati untuk pertama kalinya dan hasilnya digunakan langsung oleh peneliti atau oleh lembaga itu sendiri untuk memecahkan permasalahan yang akan dicari jawabannya. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah: aktiva tetap, biaya penyusutan, biaya listrik, biaya telepon, biaya air, jam mesin, jam tenaga kerja langsung, komposisi bahan baku, penggunaan bahan baku, biaya pemeliharaan, dan jumlah tenaga kerja yang terlibat langsung dalam pengolahan massa raga BPC-1; dan (2) data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti bukan dari hasil pengumpulan dan pengolahan sendiri melainkan dilakukan oleh orang lain atau oleh lembaga tertentu. Jadi data yang digunakan oleh peneliti dalam upaya mencari jawaban atas permasalahan penelitiannya adalah data yang dipublikasikan oleh orang lain atau lembaga tertentu lainnya dan tidak oleh peneliti sendiri. Data sekunder pada penelitian ini adalah : upah minimum Kota Denpasar dari Depnakertrans, jenis bahan baku pembuatan massa raga BPC-1 dari Balai Besar Industri Keramik Bandung, dan standar peresapan air yang memenuhi syarat sebagai *stoneware* dari *American Standard Testing Material (ASTM)*.

Pengumpulan data dilakukan melalui: (1) observasi, yaitu suatu cara pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan mengamati langsung terhadap objeknya atau mengganti objeknya (misalnya : film, video, rekonstruksi, dan lain-lain). Observasi pada penelitian ini dilakukan dengan mengamati proses pengolahan massa raga BPC-1 dan campuran bahan baku yang digunakan; dan (2) wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara lisan antara pewawancara (*interviewer*) dan orang yang diwawancarai atau responden (*interviewee*). Pada teknik ini terjadi interaksi yang berhadapan-hadapan antara pewawancara dengan responden, kesan pertama pewawancara akan menentukan keberhasilan dalam pengumpulan data. Wawancara pada penelitian ini dilakukan kepada bagian pengolahan bahan, bendahara pelayanan teknis, manajer pelayanan teknis, perekayasa, teknisi litkayasa, dan kelompok fungsional tekno-ekonomi.

Teknik analisis data yang digunakan adalah: (1) Sistem biaya standar dengan metode biaya konversi (*conversion cost*) yang dikemukakan oleh Supriyono (2014:151) digunakan untuk menghitung biaya konversi massa raga BPC-1, dengan rumus biaya konversi = biaya tenaga kerja langsung + biaya overhead pabrik. Standar biaya tenaga kerja langsung = Tarif per jam x Standar waktu per unit produk. Tarif per jam = (Upah tenaga kerja langsung per bulan) / (Jam kerja efektif per bulan), atau = 100% x (Upah Minimum Kota Denpasar) / (Jam kerja efektif per bulan). Standar waktu untuk 1 unit produk = (Jam kerja untuk pembuatan produk dalam 1 kali proses) / (Jumlah produk yang dihasilkan dalam 1 kali proses). Standar tarif biaya *overhead* pabrik dihitung dengan membagi jumlah biaya *overhead* pabrik yang dianggarkan pada kapasitas normal. Tarif Biaya *Overhead* Pabrik Variabel = (Budget biaya *overhead* pabrik variabel bulanan) / (Unit produk pada kapasitas normal). Tarif Biaya *Overhead* Pabrik Tetap = (Budget biaya *overhead* pabrik tetap bulanan) / (Unit produk pada kapasitas normal); (2) Sistem biaya standar dengan metode biaya penuh (*full costing*), yang dikemukakan oleh Mulyadi (2013:50) digunakan untuk menghitung harga pokok produksi, dengan rumus : harga pokok produksi = biaya bahan baku + biaya tenaga kerja langsung + biaya *overhead* pabrik variabel + biaya *overhead* pabrik tetap. Standar biaya bahan baku = Standar pemakaian bahan baku x Standar harga bahan baku. Standar pemakaian bahan baku = Persentase penggunaan bahan baku x Kebutuhan bahan baku per kg. Standar harga bahan baku = Harga rata-rata yang diharapkan masing-masing bahan baku. Standar biaya tenaga kerja langsung = standar biaya tenaga kerja langsung pada perhitungan biaya konversi. Standar tarif biaya *overhead* pabrik = standar biaya *overhead* pabrik pada perhitungan biaya konversi; (3) Metode harga jual berbasis biaya penuh/*full cost pricing* digunakan untuk menghitung harga jual, rumusnya : harga jual = biaya produksi total + margin (biaya produksi total) + biaya operasi; dan (4) *Trend* atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang dinyatakan dalam persentase (*trend percentage analysis*) (Munawir, 2013:37) digunakan untuk menghitung pengaruh perubahan upah minimum regional terhadap biaya konversi, harga pokok produksi, dan harga jual massa raga BPC-1.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Upah Minimum Kota Denpasar untuk Pembuatan Massa Raga BPC-1

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali No.65 tahun 2017 dan www.gaji.umr.com, maka diperoleh besarnya upah minimum regional kota Denpasar tahun 2013 s.d 2018 dalam pembuatan massa raga BPC-1 adalah Rp 1.358.000 per bulan atau Rp 8.487,50 per jam untuk tahun 2013, Rp 1.656.900 per bulan atau Rp 10.355,63 per jam untuk tahun 2014, Rp 1.800.000 per bulan atau Rp 11.250 per jam untuk tahun 2015, Rp 2.007.000 per bulan atau Rp 12.543,75 per jam untuk tahun 2016, Rp 2.173.000 per bulan atau Rp 13.581,25 per jam untuk tahun 2017, dan Rp 2.363.000 per bulan atau Rp 14.768,75 per jam untuk tahun 2018. Selama enam tahun terakhir, terjadi kenaikan upah minimum regional kota Denpasar dalam pembuatan massa raga BPC-1, yaitu 22,01% tahun 2014, 32,55% tahun 2015, 47,79% tahun 2016, 60,01% tahun 2017, dan 74,01% tahun 2018. Perubahan upah minimum regional kota Denpasar untuk pembuatan massa raga BPC-1 tahun 2013 s.d 2018 ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2
Perubahan Upah Minimum Kota Denpasar untuk Pembuatan Massa Raga BPC-1, Tahun 2013 s.d 2018 Pada BTKK

Uraian	Tahun						Ket
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Upah Minimum kota Denpasar (Rp/bulan)	1.358.000,00	1.656.900,00	1.800.000,00	2.007.000,00	2.173.000,00	2.363.000,00	-
Perubahan/kenaikan (%)	-	22,01	32,55	47,79	60,01	74,01	-

Sumber : Peraturan Gubernur Bali No.65 tahun 2017 dan www.gaji.umr.com.

Biaya Konversi Massa Raga BPC-1

Berdasarkan sistem harga pokok standar dengan metode biaya konversi, maka diperoleh besarnya biaya konversi massa raga BPC-1 menggunakan upah minimum regional tahun 2013 s.d. 2018 berturut-turut sebesar Rp 812,93, Rp 883,17, Rp 916,81, Rp 965,46, Rp 1.004,47, dan Rp 1.049,12 . Selama enam tahun terakhir, terjadi kenaikan biaya konversi pembuatan massa raga BPC-1, yaitu 8,64% tahun 2014, 12,78% tahun 2015, 18,76% tahun 2016, 23,56% tahun 2017, dan 29,05% tahun 2018. Perubahan biaya konversi massa raga BPC-1 tahun 2013 s.d 2018 ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3
Perubahan Biaya Konversi Massa Raga BPC-1 Tahun 2013 s.d 2018 Pada BTIKK

Uraian	Tahun						Ket
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Biaya konversi (Rp/unit)	821,93	883,17	916,81	965,46	1.004,47	1.049,12	-
Perubahan/kenaikan (%)	-	8,64	12,78	18,76	23,56	29,05	-

Sumber : Lampiran 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, dan 7F, 2018.

Harga Pokok Produksi Massa Raga BPC-1

Berdasarkan sistem harga pokok standar dengan metode biaya penuh (*full costing*), maka diperoleh harga pokok produksi massa raga BPC-1 menggunakan upah minimum regional tahun 2013 s.d. 2018 sebesar Rp 3.608,37 untuk tahun 2013, Rp 3.678,62 untuk tahun 2014, Rp 3.712,25 untuk tahun 2015, Rp 3.760,90 untuk tahun 2016, Rp 3.799,92 untuk tahun 2017, dan Rp 3.844,57 untuk tahun 2018. Selama enam tahun terakhir, terjadi kenaikan harga pokok produksi pembuatan massa raga BPC-1, yaitu 1,95% tahun 2014, 2,88% tahun 2015, 4,23% tahun 2016, 5,31% tahun 2017, dan 6,55% tahun 2018. Perubahan harga pokok produksi massa raga BPC-1 tahun 2013 s.d 2018 ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4
Perubahan Harga Pokok Produksi Massa Raga BPC-1 Tahun 2013 s.d 2018 Pada BTIKK

Uraian	Tahun						Ket
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Harga Pokok Produksi (Rp/unit)	3.608,37	3.678,62	3.712,25	3.760,90	3.799,92	3.844,57	-
Perubahan/kenaikan (%)	-	1,95	2,88	4,23	5,31	6,55	-

Sumber : Lampiran 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, dan 5F, 2018.

Harga Jual Massa Raga BPC-1

Berdasarkan sistem harga jual berbasis biaya penuh (*cost-plus pricing*), maka ditetapkan besarnya harga jual massa raga BPC-1 menggunakan upah minimum regional tahun 2013 s.d 2018 berturut-turut sebesar Rp 3.608, Rp 3.678,62, Rp 3.712,25, Rp 3.760,90, Rp 3.799,92, dan Rp 3.844,57. Selama enam tahun terakhir, terjadi kenaikan harga pokok produksi pembuatan massa raga BPC-1, yaitu 1,95% tahun 2014, 2,88% tahun 2015, 4,23% tahun 2016, 5,31% tahun 2017, dan 6,55% tahun 2018. Perubahan harga pokok produksi massa raga BPC-1 tahun 2013 s.d 2018 ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4
Perubahan Harga Pokok Produksi Massa Raga BPC-1 Tahun 2013 s.d 2018 Pada BTIKK

Uraian			Tahun						Ket
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Harga Pokok Produksi (Rp/unit)			3.608,37	3.678,62	3.712,25	3.760,90	3.799,92	3.844,57	-
Perubahan/kenaikan (%)			-	1,95	2,88	4,23	5,31	6,55	-

Sumber : Lampiran 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, dan 5F, 2018.

Pembahasan

Pengaruh Perubahan Upah Minimum Regional terhadap Biaya Konversi Massa Raga BPC-1

Upah minimum regional kota Denpasar berturut-turut dari tahun 2013 s.d 2018 adalah Rp 1.358.000,00, Rp 1.656.900,00, Rp 1.800.000,00, Rp 2.007.000,00, Rp 2.173.000,00, dan Rp 2.363.000,00 per bulan atau Rp 8.487,50, Rp 10.355,63, Rp 11.250,00, Rp 12.543,75, Rp 13.581,25, dan Rp 14.768,75 per jam. Hal ini menunjukkan terjadinya kenaikan upah minimum regional kota Denpasar setiap tahunnya dari tahun 2013 s.d 2018. Dengan memakai tahun dasar (pembanding) tahun 2013, maka terjadi kenaikan upah minimum regional kota Denpasar sebesar 22,01% tahun 2014, 32,55% tahun 2015, 47,79% tahun 2016, 60,01% tahun 2017, dan 74,01% tahun 2018. Biaya konversi pembuatan massa raga BPC-1 berturut-turut dari tahun 2013 s.d 2018 adalah Rp 812,93, Rp 883,17, Rp 916,81, Rp 965,46, Rp 1.004,47, dan Rp 1.049,12 per kg. Hal ini menunjukkan terjadinya kenaikan biaya konversi pembuatan massa raga BPC-1 setiap tahunnya dari tahun 2013 s.d 2018. Dengan memakai tahun dasar (pembanding) tahun 2013, maka terjadi kenaikan biaya konversi pembuatan massa raga BPC-1 sebesar 8,64% tahun 2014, 12,78% tahun 2015, 18,76% tahun 2016, 23,56% tahun 2017, dan 29,05% tahun 2018.

Kenaikan upah minimum regional Kota Denpasar berpengaruh terhadap biaya konversi pembuatan massa raga BPC-1. Kenaikan upah minimum regional Kota Denpasar tahun 2014 sebesar 22,01% dapat meningkatkan biaya konversi pembuatan massa raga BPC-1 sebesar 8,64%, kenaikan upah minimum regional Kota Denpasar tahun 2015 sebesar 32,55% dapat meningkatkan biaya konversi pembuatan massa raga BPC-1 sebesar 12,78%, kenaikan upah minimum regional Kota Denpasar tahun 2016 sebesar 47,79% dapat meningkatkan biaya konversi pembuatan massa raga BPC-1 sebesar 18,76%, kenaikan upah minimum regional Kota Denpasar tahun 2017 sebesar 60,01% dapat meningkatkan biaya konversi pembuatan massa raga BPC-1 sebesar 23,56%, dan kenaikan upah minimum regional kota Denpasar tahun 2018 sebesar 74,01% dapat meningkatkan biaya konversi pembuatan massa raga BPC-1 sebesar 29,05%. Pengaruh kenaikan upah minimum regional Kota Denpasar terhadap biaya konversi pembuatan massa raga BPC-1 tahun 2013 s.d 2018 ditunjukkan pada Tabel 5.

Tabel 5

Pengaruh Kenaikan Upah Minimum Regional Kota Denpasar terhadap Biaya Konversi Pembuatan Massa Raga BPC-1 Tahun 2013 s.d 2018

Uraian	Tahun						Ket
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kenaikan Upah Minimum Regional kota Denpasar (%)	-	22,01	32,55	47,79	60,01	74,01	-
Kenaikan Biaya Konversi Massa Bodi BPC-1 (%)	-	8,64	12,78	18,76	23,56	29,05	-

Sumber : Peraturan Gubernur Bali No.65 tahun 2017, www.gaji.umr.com, Lampiran 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, dan 7F, 2018.

Upah minimum regional Kota Denpasar merupakan balas jasa yang diberikan oleh suatu organisasi atau perusahaan kepada pekerja (pegawai) dalam mengerjakan pekerjaan yang berada di wilayah kota Denpasar. Upah ini cenderung naik setiap tahun, karena pertimbangan kenaikan harga bahan pokok atau komponen lainnya termasuk inflasi, sehingga pemerintah selalu

mengevaluasi upah ini setiap tahun agar layak diterima oleh pekerja. Upah yang ditetapkan pemerintah tergantung pendapatan asli daerah masing-masing, dan penetapannya tidak bisa memuaskan semua pihak, tetapi minimal bisa mengurangi kesenjangan. BTIKK menggunakan upah minimum regional Kota Denpasar dalam menghitung biaya konversi pembuatan massa raga BPC-1. Upah merupakan komponen biaya tenaga kerja langsung dalam proses pembuatan masa raga BPC-1. Biaya tenaga kerja langsung juga merupakan salah satu komponen biaya konversi selain biaya overhead pabrik. Kenaikan upah minimum kota Denpasar cenderung meningkatkan biaya konversi massa raga BPC-1.

Pengaruh Perubahan Upah Minimum Regional terhadap Harga Pokok Produksi Massa Raga BPC-1

Harga pokok produksi massa raga BPC-1 berturut-turut dari tahun 2013 s.d. 2018 adalah Rp 3.608,37, Rp 3.678,62, Rp 3.712,25, Rp 3.760,90, Rp 3.799,92, dan Rp 3.844,57 per kg. Hal ini menunjukkan terjadinya kenaikan harga pokok produksi massa raga BPC-1 setiap tahunnya dari tahun 2013 s.d 2018. Dengan memakai tahun dasar (pembanding) tahun 2013, maka terjadi kenaikan harga pokok pembuatan massa raga BPC-1 sebesar 1,95% tahun 2014, 2,88% tahun 2015, 4,23% tahun 2016, 5,31% tahun 2017, dan 6,55% tahun 2018. Kenaikan upah minimum regional kota Denpasar berpengaruh terhadap harga pokok produksi massa raga BPC-1. Kenaikan upah minimum regional kota Denpasar tahun 2014 sebesar 22,01% dapat meningkatkan harga pokok produksi massa raga BPC-1 sebesar 1,95%, kenaikan upah minimum regional kota Denpasar tahun 2015 sebesar 32,55% dapat meningkatkan harga pokok produksi massa raga BPC-1 sebesar 2,88%, kenaikan upah minimum regional kota Denpasar tahun 2016 sebesar 47,79% dapat meningkatkan harga pokok produksi massa raga BPC-1 sebesar 4,23%, kenaikan upah minimum regional kota Denpasar tahun 2017 sebesar 60,01% dapat meningkatkan harga pokok produksi massa raga BPC-1 sebesar 5,31%, dan kenaikan upah minimum regional kota Denpasar tahun 2018 sebesar 74,01% dapat meningkatkan harga pokok produksi massa raga BPC-1 sebesar 6,55%. Pengaruh kenaikan upah minimum regional kota Denpasar terhadap harga pokok produksi massa raga BPC-1 tahun 2013 s.d 2018 ditunjukkan pada tabel 6.

Tabel 6

Pengaruh Kenaikan Upah Minimum Regional Kota Denpasar terhadap Harga Pokok Produksi Massa Raga BPC-1 Tahun 2013 s.d 2018

Uraian	Tahun						Ket
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kenaikan Upah Minimum Regional kota Denpasar (%)	-	22,01	32,55	47,79	60,01	74,01	-
Kenaikan Harga Pokok Produksi Massa Raga BPC-1 (%)	-	1,95	2,88	4,23	5,31	6,55	-

Sumber : Peraturan Gubernur Bali No.65 tahun 2017, www.gaji.umr.com, Lampiran 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, dan 5F, 2018.

Biaya konversi ditambah biaya bahan baku merupakan biaya produksi (harga pokok produksi). Kenaikan upah minimum kota Denpasar cenderung meningkatkan harga pokok produksi massa raga BPC-1.

Pengaruh Perubahan Upah Minimum Regional terhadap Harga Jual Massa Raga BPC-1

Harga jual massa raga BPC-1 berturut-turut dari tahun 2013 s.d. 2018 adalah Rp 4.700,00, Rp 4.800,00, Rp 4.850,00, Rp 4.900,00, Rp 4.950,00, dan Rp 5.000,007 per kg. Hal ini menunjukkan terjadinya kenaikan harga jual massa raga BPC-1 setiap tahunnya dari tahun 2013 s.d 2018. Dengan memakai tahun dasar (pembanding) tahun 2013, maka terjadi kenaikan harga jual massa raga BPC-1 sebesar 2,13% tahun 2014, 3,19% tahun 2015, 4,26% tahun 2016, 5,32% tahun 2017, dan 6,38% tahun 2018. Kenaikan upah minimum regional kota Denpasar berpengaruh terhadap harga jual massa raga BPC-1. Kenaikan upah minimum regional kota Denpasar tahun 2014 sebesar 22,01% dapat meningkatkan harga jual massa raga BPC-1 sebesar 2,13%, kenaikan upah minimum regional kota Denpasar tahun 2015 sebesar 32,55% dapat meningkatkan harga jual massa raga BPC-1 sebesar 2,83,198%, kenaikan upah minimum regional kota Denpasar tahun 2016 sebesar 47,79% dapat meningkatkan harga jual massa raga BPC-1 sebesar 4,26%, kenaikan upah minimum regional kota Denpasar tahun 2017 sebesar 60,01% dapat meningkatkan harga jual massa raga BPC-1 sebesar 5,312%, dan kenaikan upah minimum regional kota Denpasar tahun 2018 sebesar 74,01% dapat meningkatkan harga jual massa raga BPC-1 sebesar 6,38%. Pengaruh kenaikan upah minimum regional kota Denpasar terhadap harga jual massa raga BPC-1 tahun 2013 s.d 2018 ditunjukkan pada tabel 7.

Tabel 7

Pengaruh Kenaikan Upah Minimum Regional Kota Denpasar terhadap Harga Jual Massa Raga BPC-1 Tahun 2013 s.d 2018

Uraian	Tahun						Ket
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kenaikan Upah Minimum Regional kota Denpasar (%)	-	22,01	32,55	47,79	60,01	74,01	-
Kenaikan Harga Jual Massa Raga BPC-1 (%)	-	2,13	3,19	4,26	5,32	6,38	-

Sumber : Peraturan Gubernur Bali No.65 tahun 2017, www.gaji.ums.com, Lampiran 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, dan 6F, 2018.

Harga pokok produksi merupakan dasar penetapan harga jual sesuai dengan metode harga jual berbasis biaya penuh (*cost-plus pricing*). Kenaikan upah minimum kota Denpasar cenderung meningkatkan harga jual massa raga BPC-1.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kenaikan upah minimum regional kota Denpasar dapat meningkatkan biaya konversi, harga pokok produksi, dan harga jual massa raga BPC-1. Pengaruhnya tidak bersifat proporsional, yaitu kenaikan upah minimum regional tahun 2014 s.d 2018 sebesar 22,01%, 32,55%, 47,79%, 60,01%, dan 74,01% dapat meningkatkan biaya konversi 8,64%, 12,78%, 18,76%, 23,56%, dan 29,05%. Upah merupakan komponen biaya tenaga kerja langsung. Penjumlahan biaya tenaga kerja langsung dan biaya *overhead* pabrik dalam memproduksi massa raga BPC-1 menghasilkan biaya konversi. Kenaikan upah minimum regional 22,01% (2014) dapat meningkatkan harga pokok produksi 1,95%, kenaikan upah minimum regional 32,55% (2015) dapat meningkatkan harga pokok produksi 2,88%, kenaikan upah minimum regional 47,79% (2016) dapat meningkatkan harga pokok produksi 4,23%, kenaikan upah minimum regional 60,01% (2017) dapat meningkatkan harga pokok produksi 5,31%, dan kenaikan upah minimum regional 74,01% (2018) dapat meningkatkan harga pokok produksi 6,55%. Penjumlahan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya *overhead* pabrik dalam memproduksi massa raga BPC-1 menghasilkan harga pokok produksi. Kenaikan upah minimum regional selama lima tahun berturut-turut dari tahun 2014 s.d 2018 sebesar 22,01%, 32,55%, 47,79%, 60,01%, dan 74,01% dapat

meningkatkan harga jual 2,13%, 3,19%, 4,26%, 5,31%, dan 6,38%. Harga pokok produksi ditambah tambahan laba yang diinginkan ditambah beban operasi (beban pemasaran dan beban administrasi & umum) menghasilkan harga jual.

Berdasarkan simpulan dapat disarankan : (1) kepada BTIKK, agar segera menerapkan upah minimum regional kota Denpasar tahun 2018 yang memperbandingkan dengan upah minimum sebelumnya dalam analisis produk kreatif keramik, khususnya jasa pelayanan bahan baku siap bentuk, sehingga dapat menghasilkan biaya konversi, harga pokok produksi, dan harga jual yang layak di atas kondisi standar; (2) kepada IKM Keramik, agar segera meningkatkan ekonomisasi, efektivitas, dan efisiensi proses produksi produk keramik khususnya jasa pelayanan bahan baku keramik, melalui penerapan tarif upah (standar tarif biaya tenaga kerja langsung) yang tepat, penggunaan jam kerja yang maksimal, sehingga pemborosan dapat dikurangi; dan (3) kepada Peneliti, Teknisi Litkayasa, Perekrayasa, dan Kalangan Akademis Lain (Lanjutan), agar segera menerapkan konsep pembebanan tarif upah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dalam proses produksi tidak hanya pada jasa pelayanan bahan baku keramik, tetapi pada berbagai macam produk keramik yang lebih spesifik, sehingga setiap jenis produk keramik dapat ditentukan tarifnya secara lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatoki, O. 2014. The Entrepreneurial Orientation of Micro Enterprises in the Retail Sector in South Africa. *Journal Sociology Soc Anth.* 5(2) : 125-129.
- Geria, I. M. 2014. Eksistensi Produk Kriya Kayu Nyoman Sudarma di Desa Jagapati Kabupaten Badung dalam Dunia Bisnis. *Mudra (Jurnal Seni Budaya)*, 29(2): 155-162.
- Gumi, W. S., & Normal, I. N. 2017. Pengembangan Jasa Pelayanan Bahan Keramik Siap Bentuk BPC-1 dalam Meningkatkan Ekonomisasi Biaya Produksi. *JUIMA (Jurnal Ilmu Manajemen)*, 7(1): 78-88.
- Gumi, W. S., Normal, I. N., & Mahanavami, G. A. 2016. Penyesuaian Tarif Jasa Teknologi Bahan Keramik BBN-4 sesuai Elemen Biaya Tahun 2016 pada BTIKK-BPPT. *JUIMA (Jurnal Ilmu Manajemen)*, 6(2): 199-210.
- Hansen & Mowen. 2013. *Accounting and Control, Cost Management*. USA. South Western College.
- Heckert, J. B. 2013. *Controllershship (Tugas Akuntan Manajemen)*. Edisi Ketiga. Jakarta. Erlangga.
- Kherismawati, N. P. E., Wiagustini, N. L. P., & Dewi, M. P. 2016. Profitabilitas dan Leverage sebagai Prediktor Kebijakan Dividen dan Nilai Perusahaan (Studi pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia). *JUIMA (Jurnal Ilmu Manajemen)*, 6(2): 132-141.
- Marheni, L., Kencanawati, A. A. A. M., & Yudistira, C. G. P. 2015. Pengaruh Kemampuan dan Motivasi Kerja Perawat terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Sanjiwani Gianyar-Bali. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*. 11(3) : 231-240.
- Maryam, S. 2013. Pertumbuhan Industri Manufaktur 2013 Ditarget 7,14%. *Media Industri*. 1
- Matz dan Usry. 2014. *Akuntansi Biaya, Perencanaan dan Pengawasan (Cost Accounting)*. Edisi Ke 7. Jilid 1. Jakarta. Erlangga.
- Meythi. 2012. Dampak Interaksi antara Kebijakan Hutang dan Kebijakan Dividen dalam Menilai Perusahaan. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 16(3): 407-414.
- Mulyadi. 2013. *Akuntansi Manajemen (Konsep, Manfaat, dan Rekayasa)*. Yogyakarta. BP STIE YKPN.
- Munawir. 2013. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Revisi. Yogyakarta. Liberty

- Normal, I. N. & Nurani, N. N. 2016. Penerapan Upah Minimum Regional Tahun 2016 dalam Menentukan Tarif Jasa Teknologi Desain Dulang Keramik. *Jurnal Ilmiah Forum Manajemen*, 14(2): 15-28.
- Normal, I. N. 2014. Pengaruh Tambahan Berat Kuarsa terhadap Sifat Fisik dan Tingkat Profitabilitas Massa Raga Keramik (Stoneware) Berkode BSK Suhu 1.200°C pada UPT PSTKP Bali. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*, 10(1): 11-21.
- Rolita, R. 2014. Hubungan Struktur Modal dan Keputusan Investasi pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. 18(3) : 370-383.
- Rudianto. 2013. *Akuntansi Manajemen (Informasi Untuk Pengambilan Keputusan Strategis)*. Jakarta. Erlangga.
- Setijani, E., Sugito, P., & Chodijah. 2015. Investigasi Kewirausahaan sebagai Variabel Moderasi Keputusan Struktur Modal terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. 19(2):283-294.
- Sirivanth, T., Sukkabot, S., & Sateeraroj, M. 2014. The Effect of Entrepreneurial Orientation and Competitive Advantage on SMEs' Growth : A Structural Equation Modeling Study. *International Journal of Business and Social Science*. 2(1) : 189-194.
- Soemarso, S.R. 2014. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Edisi IV. Buku 1. Jakarta. Rineka Cipta.
- Sudana, I. W. 2014. Strategi Pengembangan Kerajinan Gerabah Tradisional Gorontalo Guna Mendukung Industri Kreatif. *Mudra (Jurnal Seni Budaya)*, 29(2): 163-180.
- Sukrini, D. 2012. Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kebijakan Dividen, dan Kebijakan Utang Analisis terhadap Nilai Perusahaan. *Accounting Analysis Journal.*, 1(2): 1-12.
- Supriyono. 2014. *Akuntansi Biaya (Pengumpulan Biaya dan Penentuan Harga Pokok)*. Buku I. Edisi 2. Yogyakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali

Anak Agung Gde Mantra Suarjana¹
Nyoman Indah Kusuma Dewi²

¹Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bali

²Jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Bali

Kampus Bukit Jimbaran-Bali, Telp.+62 361 701981

E-mail: agungsuarjana@gmail.com¹

ikdewi@pnb.ac.id²

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali. (2) Untuk menganalisis pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali. (3) Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan secara simultan terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali. Sampel penelitian diambil dengan teknik *Purposive Sampling* sesuai dengan tujuan peneliti dengan beberapa pertimbangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik regresi berganda. Hasil analisis data dengan signifikansi 0,05 menunjukkan bahwa: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali. Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali. Korelasi dan kontribusi antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan secara simultan terhadap Pengembangan Infrastruktur adalah sebesar 0,969 dengan kontribusi sebesar 92,8%.

Katakunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pengembangan Infrastruktur

Abstract: The purpose of this research were: (1) To examine the influence of Local Government Revenue (PAD) towards Infrastructure Development at Bali Province Government. (2) To examine the influence of Balancing Funds on Infrastructure Development at Bali Province Government. (3) To examine the influence of Local Government Revenues (PAD) and Balancing Funds simultaneously on Infrastructure Development at Bali Province Government. The sample of research was taken by purposive sampling technique in accordance with the purpose of the researcher with some consideration. Data collection was done by documentation technique. Data analysis technique used was multiple regression technique. The result of data analysis with significance 0,05 indicated that: Local Government Revenue (PAD) had a positive and significant influence to Infrastructure Development at Bali Province Government. Balancing Funds had a positive and significant influence on Infrastructure Development at Bali Province Government. Local Government Revenue (PAD) and Balancing Funds simultaneously had a positive and significant influence on Infrastructure Development at Bali Province Government. The correlation and contribution between Local Government Revenue (PAD) and Balancing Funds simultaneously to Infrastructure Development was 0.969 with contribution of 92.8%.

Keywords: Local Government Revenue (PAD), Balancing Funds, Infrastructure Development

PENDAHULUAN

Pariwisata Bali sedang menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, salah satu indikatornya adalah kunjungan wisatawan mancanegara yang mencapai 5,076 juta orang pada akhir tahun 2016 dari target 4,4 juta orang. Pada tahun 2017 kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali mencapai 5,960 juta orang. Angka tersebut menunjukkan bahwa daya tarik pariwisata Bali memiliki daya saing, sehingga menjadi salah satu tujuan wisata bagi wisatawan asing maupun domestik. Oleh karena itu, destinasi-destinasi baru harus terus dikembangkan terutama yang mempunyai daya tarik wisata. Samimi dkk. (2011) menyatakan bahwa pariwisata telah menjadi salah satu sektor ekspor yang paling signifikan di banyak negara berkembang. Perkembangan pariwisata tidak hanya meningkatkan pendapatan devisa, tetapi juga menciptakan kesempatan kerja, merangsang pertumbuhan industri pariwisata dan memicu pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dengan demikian, pengembangan pariwisata telah menjadi target yang penting bagi sebagian besar pemerintah, terutama untuk negara berkembang. Pariwisata merupakan sektor ekonomi yang mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan pasar tenaga kerja, dan menciptakan peluang pekerjaan langsung dan tidak langsung melalui penyediaan barang dan jasa yang diperlukan untuk kegiatan wisata. Selain itu, pariwisata menghasilkan manfaat ke daerah seperti pengembangan usaha kecil dan menengah, penciptaan lapangan kerja baru, perbaikan infrastruktur (Zaei, 2013). Kamal dan Pramanik (2015) menyatakan bahwa sektor pariwisata merupakan sektor yang terintegrasi yang meliputi budaya, keindahan pemandangan, tempat arkeologi dan sejarah, sosial politik dan pembangunan infrastruktur.

Berkembangnya industri pariwisata di Provinsi Bali telah mampu menggerakkan sektor-sektor yang mempunyai keterkaitan langsung dengan industri pariwisata, seperti sektor industri pengolahan, hiburan, perdagangan dan juga sektor hotel dan restoran. Dengan kondisi yang dimiliki, Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi tujuan wisata bagi wisatawan, sehingga kunjungan wisatawan ke Bali terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah harus cerdas mengelola kinerja keuangannya, terutama sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin meningkat. Pesatnya perkembangan pariwisata di Bali akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi tulang punggung dalam pembiayaan daerah. Kemampuan suatu daerah menggali PAD akan memengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Wong (2004) menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur industri memberi dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah karena dengan terpenuhinya kuantitas dan kualitas layanan dan fasilitas publik akan membuat masyarakat akan merasa nyaman dan dapat menjalankan usahanya dengan efisien dan efektif, sehingga dapat meningkatkan partisipasinya dalam pembangunan. Dalam era desentralisasi fiskal sekarang ini, diharapkan adanya peningkatan pelayanan di berbagai sektor terutama sektor publik untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemda dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik yang dapat dilakukan dengan peningkatan investasi modal dalam

wujud belanja modal untuk pengembangan infrastruktur. Dengan demikian pengeluaran pemerintah Propinsi Bali untuk pengembangan infrastruktur diupayakan melalui pengeluaran Belanja Modal harus difokuskan untuk pelayanan publik.

Inuwa (2012) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah yakni belanja modal merupakan perangkat penting dalam mengendalikan suatu perekonomian. Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah dalam membangun aset tetap untuk pelayanan publik, sehingga akan memaksimalkan produktivitas perekonomian. Kartika dan Dwirandra (2014) menjelaskan bahwa produktivitas masyarakat akan meningkat, jika daerah mempunyai layanan publik yang memadai yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Pembangunan ekonomi akan terwujud ketika infrastruktur serta sarana prasarana terpenuhi yang digunakan dalam kegiatan perekonomian daerah. Alokasi Belanja Modal akan membiayai aset tetap pemerintah daerah. Ketika pembangunan ekonomi daerah meningkat, belanja modal akan ditingkatkan untuk memperbaiki atau melengkapi infrastruktur serta sarana prasarana agar pembangunan ekonomi tercapai dengan baik. Semakin banyak Belanja Modal, maka produktivitas perekonomian akan semakin tinggi, karena Belanja Modal berupa infrastruktur berdampak pada pembangunan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Felix (2012) menilai Alokasi Belanja Modal seharusnya lebih diutamakan daripada belanja lain yang tidak produktif, karena Belanja Modal merupakan komponen penting dalam pembangunan daerah dan pelayanan publik. Alokasi Belanja Modal perlu diperhatikan, sebab akan membantu meningkatkan perekonomian daerah.

Potensi keuangan daerah yang tidak sama menimbulkan adanya kesenjangan keuangan yang dapat mengakibatkan kesenjangan pembangunan antar daerah. Untuk mengurangi kesenjangan dan untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan, pemerintah pusat mengucurkan Dana Perimbangan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Proporsi Dana Perimbangan semakin lama semakin menurun dalam anggaran pemda sejalan dengan peningkatan penerimaan PAD, walaupun masih menjadi sumber utama pendapatan daerah. Faktor utama bagi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah dengan meningkatkan investasi yang dapat dilakukan di antaranya dengan meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang memadai, baik kualitas maupun kuantitas. Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah, pemda dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya adalah memberikan proporsi Belanja Modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif di daerah (Harianto dan Adi, 2007). Penelitian empiris menunjukkan hasil yang tidak konsisten mengenai hubungan antar variabel terkait. Permatasari dan Mildawati (2016) menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Sejalan dengan itu Sudika dan Budiarta (2017) menemukan bahwa Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan pada Belanja Modal. Namun, Yossi dkk. (2015) menyatakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, peningkatan Dana Perimbangan, diharapkan adanya peningkatan terhadap Pengembangan Infrastruktur melalui pengeluaran Belanja Modal. Besarnya Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan

biaya Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2005-2017 seperti Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan
dan Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah
Provinsi Bali 2005-2017

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Dana Perimbangan (Rp)	Pengembangan Infrastruktur (Rp)
2005	742.886.075.366,00	261.364.427.278,00	36.579.841.226,00
2006	729.338.159.745,00	421.596.129.577,00	25.202.774.219,00
2007	834.475.057.579,00	525.304.233.965,00	144.279.992.342,00
2008	1.055.454.263.032,00	676.550.871.373,00	122.098.438.548,00
2009	1.163.947.552.786,00	636.608.487.596,00	207.056.912.298,00
2010	1.393.730.257.045,00	649.257.693.410,00	201.468.101.538,00
2011	1.723.807.096.000,00	705.288.133.000,00	227.119.793.000,00
2012	2.042.091.096.000,00	908.371.147.000,00	343.633.987.000,00
2013	2.529.976.147.000,00	980.714.799.000,00	454.469.548.000,00
2014	2.920.416.697.075,00	1.018.431.009.000,00	370.585.305.000,00
2015	3.041.266.607.195,00	1.070.197.147.000,00	562.235.633.000,00
2016	3.041.195.258.000,00	1.867.010.930.000,00	730.924.237.000,00
2017	3.250.531.000.000,00	2.673.596.252.308,00	706.058.699.119,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Propinsi Bali, 2018

Dari Tabel 1 terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah terus meningkat dari tahun 2005-2017. Dana Perimbangan juga mengalami peningkatan yang pesat dari tahun 2005-2017. Namun, peningkatan Pendapatan Asli Daerah, peningkatan Dana Perimbangan tidak disertai dengan peningkatan biaya Pengembangan Infrastruktur melalui Biaya Modal secara terus menerus, pengeluaran Biaya Modal cenderung berfluktuasi. Pada awalnya pengeluaran Biaya Modal turun dari tahun 2005-2006, selanjutnya naik tahun 2007 dan kembali turun tahun 2008. Sedangkan tahun 2010 mengalami penurunan yang drastis. Pada tahun 2011 pengeluaran Biaya Modal kembali mengalami kenaikan, selanjutnya pada tahun 2012 kembali mengalami penurunan. Pada tahun berikutnya sejak 2013-2016 terus menunjukkan peningkatan. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, peningkatan Dana Perimbangan, namun tidak disertai dengan peningkatan Biaya Modal. Fenomena seperti ini serta masih adanya kesenjangan hubungan antar variabel hasil-hasil penelitian empiris, sehingga penelitian ini menarik untuk dicermati kembali terkait dengan hubungan variabel yang diteliti pada Pemerintah Provinsi Bali.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali. (2) Untuk menganalisis pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pengembangan Infrastruktur pada

Pemerintah Provinsi Bali. (3) Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan secara simultan terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Yani (2008: 61) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diterima oleh daerah yang bersumber dari kekayaan alam yang ada pada daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Halim (2004: 94) menyatakan Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian-penelitian empiris mengenai hubungan antarvariabel terkait seperti penelitian: Arwati dan Hadiati (2013) menyatakan bahwa PAD mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Sianturi (2010) menjelaskan bahwa ada kaitan antara Pajak Daerah dan Alokasi Belanja Modal, semakin besar penerimaan pajak, semakin besar PAD. Olatunji et al. (2009) menyatakan bahwa PAD merupakan sumber dalam pembiayaan Belanja Modal. Nurmala Sari dkk. (2017) menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Sebaliknya Adyatma (2015) menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terbagi menjadi dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil (Aryanto, 2011). Darise (2008: 137) menyebutkan bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah.

Wandira (2013) menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh antara PAD terhadap Belanja Modal, terdapatnya pengaruh signifikan antara DAU terhadap Belanja Modal, namun berpola negatif. Berbeda dengan DAK dan DBH yang berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua dari Dana Perimbangan memengaruhi besarnya jumlah Belanja Modal. Putri Lestari (2017) menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal, Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.

Infrastruktur merupakan suatu istilah yang sering digunakan untuk memberikan gambaran berbagai jenis fasilitas yang dibuat khusus untuk mendukung segala aktivitas dan kegiatan masyarakat umum dalam kehidupan manusia. Infrastruktur publik biasanya dibangun oleh pemerintah untuk kemaslahatan bersama. Infrastruktur merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan sekumpulan fasilitas yang sengaja dibuat untuk mendukung aktivitas kehidupan manusia. Infrastruktur biasanya sengaja dibangun untuk bisa membantu

dan mempermudah suatu kegiatan tertentu seperti transportasi/jalan raya, pendataan penduduk, gedung pemerintahan dan berbagai macam kegiatan lainnya. Dalam pengeluaran pemerintah daerah pengembangan infrastruktur indikatornya melalui pengeluaran Belanja Modal.

Mardiasmo (2009: 66) mengemukakan belanja pemerintah yang digunakan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah meliputi dua jenis yaitu Belanja Rutin dan Belanja Modal. Belanja Modal meliputi Belanja Modal tanah, Belanja Modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, serta Belanja Modal aset tetap lainnya. Sedangkan menurut Halim (2004: 73), Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Sumartini dan Murjana Yasa (2015) menemukan bahwa PAD dan DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal. PAD dan DAU berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui Belanja Modal. Dana Perimbangan, Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Gugus (2013) menjelaskan bahwa PAD adalah sumber untuk menciptakan infrastruktur daerah.

Berdasarkan tinjauan teoritis dan kajian penelitian empiris, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

1. Hipotesis 1 (H1): Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali.
2. Hipotesis 2 (H2): Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali.
3. Hipotesis 3 (H3): Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali.

METODE PENELITIAN

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan adalah data runtun waktu (time series) selama 13 tahun. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik dokumentasi yaitu dengan mengambil data yang sudah terdokumentasi. *Sampling Purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012: 78). Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *Purposive Sampling* yaitu sesuai dengan tujuan peneliti dengan pertimbangan yaitu: data selama 13 tahun terakhir cukup representative dan relevan sejak diberlakukan otonomi daerah.

Teknik analisis untuk menjawab masalah yang dikemukakan adalah dengan analisis regresi berganda: $Y = a + b_1X_1 + b_2 X_2 + e$. Y = Pengembangan Infrastruktur, X_1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan X_2 = Dana Perimbangan, e = error. Model regresi harus diuji dengan asumsi klasik. Pengujian dengan asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui kondisi data yang ada agar dapat menentukan model analisis yang tepat. Adapun uji asumsi

klasik dalam penelitian ini terdiri dari: Uji normalitas data, uji linearitas, uji *multikolinearitas*, *homoskedastisitas* dan uji autokorelasi. Uji normalitas data dengan menggunakan uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Uji linearitas data digunakan pendekatan grafik. Uji *Homoskedastisitas* dengan menggunakan Uji *Rho Spearman*. Uji *multikolinearitas* dengan melihat hasil *Tolerance* atau *VIF*. Uji autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin-Watson. Uji Durbin-Watson digunakan untuk menguji model regresi linear antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (Ghozali, 2012: 110). Angka D-W diantara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi (Santoso, 2012: 243). Selanjutnya untuk mempermudah analisis data, maka digunakan aplikasi analisis *multi variate* dengan program IBM SPSS 24.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil *output* SPSS 24 terkait dengan normalitas data variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Pengembangan Infrastruktur seperti Tabel 2. Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), variabel Dana Perimbangan, dan Pengembangan Infrastruktur, Asymp. Sig. (2-tailed) semuanya lebih besar dari 0,05. Ini berarti semua variabel tersebut berdistribusi normal berdasarkan uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*.

Tabel 2
Normalitas Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD),
Dana Perimbangan dan Pengembangan Infrastruktur

		One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	DANA PERIMBAN GAN	PENGEMBANG AN INFRASTRUKT UR
N		13	13	13
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	1,882,239,636, 000.0000	876,483,943, 100.0000	317,824,097,100. 0000
	Std. Deviation	969,108,198,80 0.00000	463,066,028, 100.00000	236,365,487,300. 00000
Most Extreme Differences	Absolute	.166	.184	.188
	Positive	.155	.184	.188
	Negative	-.166	-.111	-.108
Test Statistic		.166	.184	.188
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}	.200 ^{c,d}	.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Output SPSS 24, 2018

Uji linearitas dengan grafik menunjukkan bahwa hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pengembangan Infrastruktur, hubungan antara Dana Perimbangan dan Pengembangan Infrastruktur, arah garis ke kanan atas yang menunjukkan hubungan yang bersifat linear dan positif. Untuk autokorelasi diperoleh angka Durbin-Watson 1,398. Angka D-W 1,398 terletak di antara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi (Santosa, 2012: 243). Uji *Homoskedastisitas* dengan menggunakan Uji *Rho Spearman* terpenuhi, di mana Sig. (2-tailed) Pendapatan Asli Daerah (PAD) (0,887), Dana Perimbangan (0,972) > 0,05 yang berarti *homoskedastisitas* terpenuhi. Uji multikolinearitas di mana tolerance Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan 0,221 lebih besar dari 0,10 serta VIF = 4,519 < 10 yang berarti tidak terjadi multikolinearitas. Dengan demikian, model regresi memenuhi prasyarat asumsi klasik.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pengembangan Infrastruktur.

Hipotesis 1 (H1) dalam penelitian ini adalah: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengembangan Infrastruktur di Provinsi Bali. Hasil Uji T antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pengembangan Infrastruktur seperti Tabel 3.

Tabel 3
Hasil Uji T Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-	39866182790.000		-2.653	.024
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	.155	.032	.637	4.834	.001
	DANA PERIMBANGAN	.138	.048	.380	2.883	.016

a. Dependent Variable: PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR

Sumber: Output SPSS 24, 2018

Berdasarkan Tabel 3 Hasil Uji T, untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) diketahui bahwa $t = 4,834$ dengan $Sig. t = 0,001$. Hasil $Sig. t = 0,001$ lebih kecil dari 0,05 berarti koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah (PAD) signifikan. Artinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali. Koefisien regresi tersebut positif, maka dapat

diinterpretasikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh positif terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali. Artinya, jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat, maka Pengembangan Infrastruktur akan meningkat secara signifikan. Jadi, Hipotesis 1 (H1) yang menyatakan: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali terbukti atau dapat diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya seperti Permatasari dan Mildawati (2016), Arwati dan Hadiati (2013), Sianturi (2010), Nurmala Sari dkk. (2017) yang menyatakan bahwa PAD mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pengembangan Infrastruktur.

Pembahasan untuk menjawab Hipotesis 2 (H2). Hipotesis 2 (H2) dalam penelitian ini adalah: Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali. Hasil Uji T antara Dana Perimbangan terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali seperti Tabel 4.

Tabel 4
Hasil Uji T Dana Perimbangan

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-105748341200.000	39866182790.000		-2.653	.024
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	.155	.032	.637	4.834	.001
	DANA PERIMBANGAN	.138	.048	.380	2.883	.016

a. Dependent Variable: PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR

Sumber: Output SPSS 24, 2018

Berdasarkan Tabel 4 Hasil Uji T, untuk Dana Perimbangan diketahui bahwa $t = 2,883$ dengan $Sig. t = 0,016$. Hasil $Sig. t = 0,016$ lebih kecil dari 0,05 berarti koefisien regresi Dana Perimbangan signifikan. Artinya Dana Perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali. Koefisien regresi tersebut positif, maka dapat diinterpretasikan bahwa Dana Perimbangan memiliki pengaruh positif terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali. Artinya, jika Dana Perimbangan meningkat, maka Pengembangan Infrastruktur akan meningkat secara signifikan. Jadi, Hipotesis 2 (H2) yang menyatakan: Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali terbukti atau dapat diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya, Wandira (2013) menemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal. DAK dan DBH yang berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Putri Lestari (2017) menemukan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Pengembangan Infrastruktur.

Pembahasan untuk menjawab Hipotesis 3 (H3). Hipotesis 3 (H3) dalam penelitian ini adalah: Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali. Hasil Uji F antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali seperti Tabel 5.

Tabel 5
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6300815738000 00000000000.00 0	2	3150407869000000 00000000.000	78.092	.000 ^b
	Residual	4034214907000 0000000000.000	10	4034214907000000 000000.000		
	Total	6704237229000 00000000000.00 0	12			

a. Dependent Variable: PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR

b. Predictors: (Constant), DANA PERIMBANGAN, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Sumber: Output SPSS 24, 2018

Berdasarkan Tabel 5 Hasil Uji F, diketahui bahwa $F = 78,092$ dengan $Sig. F = 0,000$. Hasil $Sig. F = 0,000$ lebih kecil dari 0,05 berarti koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan signifikan. Artinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan secara bersama-sama (simultan) terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali. Koefisien regresi tersebut positif, maka dapat diinterpretasikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan memiliki pengaruh positif terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali. Artinya, jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan meningkat secara bersamaan, maka Pengembangan Infrastruktur akan meningkat secara signifikan. Jadi, Hipotesis 3 (H3) yang menyatakan: Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali terbukti atau dapat diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Sumartini dan Murjana Yasa (2015) yang menemukan bahwa Dana Perimbangan, Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Pengembangan Infrastruktur serta kontribusinya, maka dapat diketahui melalui Tabel 6 Hasil Uji Korelasi.

Tabel 6
Hasil Uji Korelasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.969 ^a	.940	.928	63,515,469,830.000 00

a. Predictors: (Constant), DANA PERIMBANGAN, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Sumber: Output SPSS 24, 2018

Berdasarkan Tabel 6 Hasil Uji Korelasi, diketahui bahwa korelasi antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan secara simultan terhadap Pengembangan Infrastruktur adalah sebesar 0,969. Angka korelasi ini termasuk kategori kuat. Artinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh yang kuat terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali. Sedangkan sumbangan/kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali adalah sebesar 0,928 atau kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan secara simultan terhadap Pengembangan Infrastruktur sebesar 92,8% dan sisanya sebesar 7,2% dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan yang dapat disampaikan untuk menjawab masalah yang diajukan adalah sebagai berikut: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali. (2) Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintahan Provinsi Bali. (3) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali. Korelasi antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan secara simultan terhadap Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali adalah sebesar 0,969 dengan sumbangan/kontribusi sebesar 92,8% dan sisanya sebesar 7,2% dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Berdasarkan simpulan yang diperoleh, maka saran yang relevan adalah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus diupayakan seefektif dan semaksimal mungkin, sehingga dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkat berimplikasi pada peningkatan Pengembangan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Bali dalam upaya meningkatkan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan besarnya Dana Perimbangan yang diterima dari pusat pemanfaatannya dapat dioptimalkan untuk mendukung pengembangan infrastruktur.

DAFTAR PUSTAKA

- Adyatma, E. dan Oktaviani, R.M. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi. *Jurnal Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, Vol. 4, No 2, 190-205.
- Arwati, D., Hadiati, N. (2013). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat*. Skripsi, tidak diterbitkan, Universitas Widyatama, Bandung.
- Aryanto, R. 2011. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmiah*, Vol. 3, No 2, 1-13.
- Darise, N. (2008). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Kesatu. Jakarta: PT.Indeks.
- Felix, O. (2012). Analysis of The Effectiveness of Capital Expenditure Budgeting in The Local Government System of Ondo State. *Journal of Accounting and Taxation*, Vol. 4, No 1, 1-6. Diakses 20 Juni 2018 dari https://www.researchgate.net/publication/311744392_Analysis_of_the_effectiveness_of_capital_expenditure_budgeting_in_the_local_government_system_of_Ondo_State_Nigeria.
- Ghozali, H.I. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 20*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.

- Harianto, D. dan Adi, P.A. (2007). Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan Per Kapita. Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar.
- Inuwa, N. (2012). Government Expenditure and Economic Growth in Nigeria: Cointegration Analysis and Causality Testing. *Academic Research International*, Vol 2, No 3, 718-723. Diakses 20 Juni 2018 dari [http://www.savap.org.pk/journals/ARInt./Vol.2\(3\)/2012\(2.3-88\).pdf](http://www.savap.org.pk/journals/ARInt./Vol.2(3)/2012(2.3-88).pdf)
- Kamal, M. dan Pramanik, S.A.K. (2015). Identifying Factors Influencing Visitor to Visit Museum in Bangladesh and Setting Marketing Strategies for Museums. *IOSR Journal of Business and Management*, Vol. 17, No 10, 85-92.
- Kartika Jaya, I.P.N.P dan Dwirandra, A.A.N.B. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 7, No 1, 79-92.
- Kawedar, W., Rohman, A. dan Handayani, S. (2008). *Akuntansi Sektor Publik: Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Semarang: Penerbit UNDIP.
- Lestari, W.P. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 6, No 6, 1-17.
- Mardiasmo. (2009). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Mardiasmo. (2007). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nurmala Sari, Djuanda, G. dan Sarwani. (2017). Pengaruh Dana Perimbangan, Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal dan Dampaknya pada Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Bodetabek Periode 2006 s/d 2015. Prosiding Seminar Nasional “Membangun Paradigma Kehidupan melalui Multi Disiplin Ilmu”. Juli 2017.
- Olatunji, O. C., Asaolu Taiwo, O. and Adewoye, J.O. (2009). A Review of Revenue Generation in Nigeria Local Government: A Case Study of Ekiti State. *Journal of International Business Management*, Vol. 3, No 3, 54-60.
- Permatasari, I. dan Mildawati, T. (2016). Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 5, No 1, 1-17.
- Samimi, A. J. (2011). Tourism and Economic Growth in Developing Countries: P-Var Approach. *Middle East Journal of Scientific Research*, Vol. 10, No 1, 28-32.
- Santosa, S. (2012). *Statistik Parametrik : Konsep dan Aplikasi dengan SPSS*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sumartini, N.K.A dan Murjana Yasa, I.G.W. (2015). Pengaruh PAD dan DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, Vol. 4, No 4, 258-271.

- Sianturi, A. (2010). *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara*. Skripsi tidak diterbitkan. Program Sarjana Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Sudika, I.K. dan Budiarta, I.K. (2017). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus pada Belanja Modal Provinsi Bali. *E-journal Akuntansi*, Vol. 21, No 2, 1689-1718.
- Wandira, A. G. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*, Vol. 2, No 1, 44-51.
- Wong, J.D. (2004). The Fiscal Impact of Economic Growth and Development on Local Government Capacity. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, Vol. 16, No 3, 799-816.
- Yani, A. (2008). *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yossi, S. M., Kalangi, J.B. dan Tolosang, K.D.T. (2015). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal (Studi pada Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2004-2013). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 15, No 1, 1-14.
- Zaei, M.E and Zaei, M.E. (2013). The Impact of Tourism Industry on Host Community. *European Journal of Tourism Hospitality and Research*, Vol 1, No 2, 12-21. Diakses 15 Juni 2018 dari <http://www.eajournals.org/wp-content/uploads/THE-IMPACTS-OF-TOURISM-INDUSTRY-ON-HOST-COMMUNITY.pdf>

Maksimisasi Keuntungan Usaha Tani Pala Melalui Pengelolaan Sistem Agrobisnis di Kabupaten Minahasa Utara

Kiet Tumiwa, Nixon Sondakh

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Manado

e-mail: kiettumiwa@yahoo.com, sondakhnixon@yahoo.co.id,

Abstrak : Tujuan penelitian ini untuk mengkaji sejauh mana usaha tani pala melalui sistem agrobisnis dapat mengoptimalkan pendapatan rata-rata petani. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode survey dan data tersebut terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden sebagai penghasil pala, pedagang perantara, pedagang pengumpul, dan para eksportir. Data sekunder meliputi luas area, jumlah produksi, perkembangan harga pala baik di pasar lokal maupun dipasaran internasional, dan realisasi ekspor. Hasil penelitian usaha tani pala di Kelurahan Rap-Rap Kecamatan Airmadidi dapat disimpulkan bahwa penerimaan rata-rata sebesar Rp 18.337.690,- biaya produksi rata-rata sebesar Rp 2.337.079,- pendapatan rata-rata sebesar Rp 16.000.611,- dengan nilai R/C 7,85, maka usaha tani yang dilakukan tersebut dapat memberikan pendapatan bagi petani sehingga layak untuk dikembangkan. Petani disarankan meningkatkan produksi yang ada, serta dapat memanfaatkan daging buah pala dan mengoptimalkan unsur usaha tani lain untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Bagi pemerintah agar dapat memperhatikan ketetapan harga pala agar tidak berfluktuasi.

Kata Kunci: Mengoptimalkan Pendapatan Usaha Tani Pala.

Abstract : The purpose of this research was to examine the extent to which nutmeg farming through agrobusiness system could optimize the farmer's average income. The method used in data collection was survey method, where the data consists of primary and secondary data. Primary data were obtained through direct interviews with respondents as nutmeg producers, intermediary traders, gatherers, and exporters. Secondary data included the area, the number of production, the development of nutmeg prices, both in local and international markets, and the realization of exports. The results of research on nutmeg farming in rap-rap, Airmadidi sub-district showed that the average revenue of 18,337,690 rupiah, the average production cost of 2,337,079 rupiah, average income of 16,000,611 rupiah, with R / C 7.85, then the farming undertaken could provide income for farmers so that it is feasible to be developed. Farmers are advised to increase existing production, and can utilize nutmeg flesh, and optimize the elements of other farm enterprises to obtain higher income. For the government to pay attention to the determination of nutmeg prices so as not to fluctuate.

Keywords: Optimal Revenue, Nutmeg Farming

PENDAHULUAN

Masyarakat makmur dan sejahtera tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan di segala bidang, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang implementasinya nampak dalam GBHN. Salah satu bidang yang menjadi tumpuan sasaran pembangunan, yaitu pembangunan di sektor pertanian yang di dalamnya termasuk subsektor perkebunan yang terus dipacu pertumbuhannya sehingga dapat mendorong ekspor nonmigas. Pertumbuhan pada sektor perkebunan ini turut menunjang program pembangunan yang berwawasan lingkungan, yang penyebarannya antara lain reklamasi dan rehabilitasi lingkungan yang rusak atau tercemar, sehingga dapat berfungsi kembali sistem penyangga kehidupan dan memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Sebagai tindakan pro-aktif, Pemerintah Sulawesi Utara (Sulut) dengan program panca-unggulannya di antaranya agroindustri terus dipacu. Hal ini didasarkan atas kondisi perekonomian yang rasional objektif, serta realitas khas daerah ini dengan harapan akan mampu mendukung perkembangan ekonomi regional maupun nasional di Indonesia.

Di Indonesia bagian timur, Sulut merupakan wilayah yang memiliki potensi sangat besar untuk menjadi salah satu penyumbang devisa. Dari berbagai komoditi ekspor yang dimiliki, salah satu adalah komoditas pala. Komoditas ini telah dikenal masyarakat petani sejak puluhan tahun, perkembangannya tidak merata. Tanaman pala sebagian besar tersebar di

Kabupaten Sangihe Talaud dan sebagian kecil di Kabupaten Minahasa. Luas areal tanaman pala dan produksinya di Sulut dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1
Luas Areal dan Produksi Pala di Sulut Tahun 2009-2015

Tahun	Luas Area (Ha)	Produksi (ton)
2009	26.848	7.203
2010	26.900	7.250
2011	17.579	7.250
2012	16.868	6.405
2013	15.838	7.390
2014	15.758	7.457
2015	15.745	7.500

Sumber : Dinas Perkebunan Sulut, 2016

Dari Tabel 1 menunjukkan bahwa luas areal pala dari tahun 2009 sampai dengan 2015 terjadi penurunan, sedangkan produksi tetap ada peningkatan. Selanjutnya pala yang telah dipetik dan diproses sesuai kualitas standard, diekspor ke Belanda, Inggris, Jepang, dan Korea Selatan melalui pelabuhan Tanjung perak Surabaya.

Secara keseluruhan perkembangan ekspor pala Indonesia mencapai pangsa pasar 70%. Berdasarkan data tentang perkembangan ekspor pala dan perkembangan harga pala dunia selama 5 tahun terakhir dapat terlihat pada tabel 2.

Tabel 2
Volume Ekspor Pala Indonesia dan Tingkat Harga di Pasaran Dunia Tahun 2009-2015

Tahun	Volume Ekspor (ton)	Perubahan Harga (%)	Harga US \$/ ton
2009	7.335	-30.85	1.251
2010	4.658	-14.87	1.089
2011	2.594	-14.03	0.955
2012	3.765	23.11	1.242
2013	4.296	25.36	1.664
2014	5.501	-6.05	1.569
2015	6.369	9.46	1.733

Sumber : Kanwil Perindag Sulut, 2016

Dari tabel 2. memperlihatkan bahwa dari 2009 hingga 2015 dari segi volume menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebaliknya perkembangan harga pala di pasar lokal menunjukkan kenaikan, dapat terlihat pada tabel 3.

Tabel 3
Perkembangan Harga Rata-Rata Komoditas Pala dan Fuli di Pasar Lokal

	Pala Biji (Rp/Kg)	
2009	1.368	7.202
2010	1.265	7.202
2011	1.629,56	4.977
2012	1.629,56	4.977.87
2013	2.100	5.750
2014	2.500	5.250
2015	2.935,5	8.386,5

Sumber : Kanwil Perindag Sulut, 2016

Dengan demikian, naik turunnya harga pala di pasaran dunia memengaruhi harga pasar lokal. Dampak dari tidak stabilnya harga pala lokal, mengakibatkan para petani termasuk

di dalamnya Kelurahan Rap-Rap, Kecamatan Airmadidi, tidak lagi mengelolah tanaman pala dengan baik yang mereka miliki. Selain itu, dampak dari menurunnya semangat para petani dalam mengelola tanaman pala dengan baik karena sebagian tanaman mereka tidak produktif dan bahkan pada tahun 2012 terserang hama yang mematikan. Oleh sebab itu, pemerintah Kelurahan Rap-Rap, Kecamatan Airmadidi, berusaha melakukan terobosan lewat penyuluhan pengelolaan pasca panen sesuai dengan konsep agrobisnis agar dapat membangkitkan kembali semangat usaha tani pala..

Dewasa ini harga pala dan fuli cukup mengembirakan. Akan tetapi, yang perlu disimak di sini bahwa dalam tata niaga pala ini terdapat beberapa pelaku yang terlibat sebagai satu mata rantai seperti pala dari produsen (petani) dijual ke pedagang pengumpul kemudian ke eksportir. Semua kegiatan yang dilakukan pelaku pasar tidak terlepas dari pembiayaannya. Untuk itu, perlu dikaji seberapa besar campur tangan pihak-pihak tersebut, agar dapat diketahui berapa sebenarnya nilai real yang seharusnya diterima petani pala sebagai keuntungan, karena diketahui bahwa keuntungan yang diterima petani itu dipengaruhi oleh sarana dan prasarana seperti transportasi, teknologi, skala usaha, tenaga kerja, pemasaran, permodalan dan lain-lain. Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah “ Sejauh mana usaha tani pala melalui sistem agrobisnis dapat mengoptimalkan pendapatan petani pala di Kelurahan Rap-Rap Kecamatan Airmadidi Sulawesi Utara.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan alat analisis yang digunakan, maka pengukuran variabel dijelaskan sebagai berikut: Variabel tidak bebas (*dependent*). Dalam kaitan dengan penelitian ini maka variabel *dependent* adalah penerimaan dari hasil produksi pala dan fuli yang dinyatakan dalam satuan kilogram. Jumlah produksi ini merupakan jumlah yang dipasarkan oleh petani per tahun. Variabel bebas (*independent*), beberapa variabel bebas yang erat kaitannya dengan penelitian ini adalah :

1. Harga produksi yakni harga pala dan fuli yang berlaku di tingkat petani, yang dinyatakan dengan Rp/Kg. Harga yang merupakan ukuran adalah harga pasar 2017.
2. Bibit adalah jumlah bibit yang ditanam petani dalam satu areal lahan yang dinyatakan dengan Rp/pohon.
3. Pupuk adalah jumlah dan jenis pupuk yang dipergunakan dalam usaha tani pala per tahun, dinyatakan dalam Rp/kg.
4. Obat-obatan merupakan jenis obat yang digunakan dalam pemberantasan hama dan penyakit. Dihitung per tahun dan dinyatakan Rp/jenis obat.
5. Tenaga kerja adalah jumlah curahan tenaga kerja mulai penanaman sampai masa produksi. Tenaga kerja yang diperhitungkan adalah tenaga kerja dewasa baik wanita maupun pria. Jumlah yang dibayarkan dihitung per HOK dikalikan dengan harga tenaga kerja yang berlaku.
6. Lahan adalah berkaitan dengan luas areal serta status lahan yang dinyatakan dengan satuan Ha.
7. Peralatan merupakan keseluruhan sarana yang dipergunakan petani dalam usaha tani pala, dinyatakan dengan satuan rupiah.

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Rap-Rap, Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara. Pemilihan lokasi ditentukan secara *purposive sampling* dengan pertimbangan bahwa kecamatan tersebut merupakan salah satu penghasil pala terbesar di Sulawesi Utara.

Penarikan sampel dilakukan secara *at random* dimana setiap populasi mempunyai peluang yang sama untuk terpilih. Sampel yang diambil 30 orang sebagai responden dari 196 petani pala yang ada di Kelurahan Rap-Rap.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode survei dan data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden sebagai penghasil pala. Data yang dikumpulkan meliputi : pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan proses pengelolaan usaha tani pala termasuk pasca panen sampai pemasarannya. Data sekunder meliputi luas areal, jumlah produksi, perkembangan harga pala baik dipasar lokal maupun dipasaran internasional, realisasi ekspor.

Bertitik tolak dari tujuan yang hendak dicapai, maka dalam penyelesaian masalah dipergunakan model sebagai berikut: pada hipotesis pertama, digunakan model analisis maksimisasi keuntungan dengan persamaan umum (Rahardja, P dan M. Manurung, 2006)

$$K = Prt - B \\ = Prt - BT - BTT$$

Banyaknya produksi total dikalikan dengan harga dan biaya produksi adalah banyaknya input dikalikan harga maka persamaan yang baru menjadi :

$$K = Py1 Y - (Px . X1 + + Pxn . Xn1) - (P xk1 Xx1 + + Pxn . Xkn)$$

Untuk mencapai kondisi maksimisasi keuntungan maka :

$$Pmi = \frac{PXi}{PYi}$$

$$Pyi (Pmi) = Pxi$$

$$Pyi (dYi/dXi) = Pxi$$

$$NPMxi = Pxi$$

Keterangan :

K = Keuntungan

Prt = Penerimaan total

BT = Biaya tetap

BTT = Biaya tidak tetap

Py = harga produksi Y

Y = Produksi

X1...n = Jumlah input 1...n

dimana :

X1 = jumlah bibit yang ditanam

X2 = pupuk

X3 = tenaga kerja

X4 = Peralatan

X5 = obatn-obatan

Untuk menguji masing-masing instrumen maka dilakukan uji validitas dan reliabilitas.

Untuk pengujian validitas formulasinya :

$$r_{xy} = \frac{\sum xy}{\sqrt{(\sum X^2)(\sum Y^2)}}$$

Keterangan:

X : X - \bar{X}

Y : Y - \bar{Y}

X : Skor rata-rata dari X

Y : Skor rata-rata dari Y

Pada hipotesis kedua, dapat digunakan analisa distribusi keuntungan dengan formula sebagai berikut:

Biaya petani	
<u>Keuntungan petani</u>	+
Harga jual petani	
<u>Biaya perdagangan lainnya</u>	+
Biaya pedagang	
<u>Keuntungan pedagang</u>	+
harga jual pedagang	
<u>Biaya eksportir lainnya</u>	+
Biaya eksportir	
<u>keuntungan eksportir</u>	+
Harga jual eksportir	
=====	

Kemudian menghitung presentase keuntungan pada tiap pelaku dengan rumus :

$$PM = \frac{P_i - B_i}{P_i}$$

dimana : PM = Profit margin; P_i = Harga jual pada tingkat pelaku tertentu
 B_i = Biaya pada tingkat pelaku tertentu.

Selanjutnya dibandingkan dengan tingkat bunga yang berlaku. Bila profit margin lebih kecil dari tingkat bunga berarti usaha yang dilakukan tidak memberikan keuntungan yang memadai. Disamping itu alat analisa deskriptif juga dipergunakan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelurahan Rap-Rap merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, dengan jarak kurang lebih ± 8 km dari ibukota Kecamatan, ± 12 km dari ibukota Kabupaten.

Adapun batas-batas wilayahnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Kelurahan Sarongsong II
- Sebelah Selatan dengan Kelurahan Airmadidi bawah dan Kelurahan Sukur
- Sebelah Barat dengan Kelurahan Sukur
- Sebelah Timur dengan Kelurahan Airmadidi bawah

Berdasarkan data monografi, Kelurahan Rap-Rap mempunyai jumlah penduduk sebanyak 1.489 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki berjumlah 772 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 717 jiwa dengan 335 kepala keluarga. Adapun jumlah penduduk berdasarkan golongan usia, dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Usia

1.	0 - 6	177	11.90
2.	7 - 16	256	17.19
3.	17 - 24	241	16.17
4.	25 - 55	650	43.65
5.	56 ke atas	165	11.09
Jumlah		1.489	100

Sumber: Data primer diolah, 2017

Tabel 1 memperlihatkan bahwa jumlah penduduk berdasarkan umur yang paling banyak adalah kelompok umur 25- 55 tahun yaitu 650 orang, kemudian kelompok umur 7 - 16 tahun

yaitu 256 orang. Keadaan ini menunjukkan bahwa penduduk pada umumnya masih dalam usia produktif, dan usia yang paling rendah adalah kelompok umur 56 tahun keatas.

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan untuk menentukan dan menambah pengetahuan seseorang untuk dapat mengerjakan segala sesuatu dengan cepat dan tepat. Oleh karena itu, makin tinggi tingkat pendidikan maka makin tinggi kecakapan petani dalam melakukan pekerjaannya. Tingkat pendidikan penduduk Kelurahan Rap-Rap bervariasi mulai dari SD sampai Perguruan Tinggi. Untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel.2
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

1.	Tidak Tamat SD	405	27.20
2.	Tamat SD	208	13.97
3.	Tamat SMP	199	13.37
4.	Tamat SMA Sederajat	183	12.29
5.	Tamat Perguruan Tinggi	5	0.34
6.	Tamat Akademi	4	0.27
7.	Belum Bersekolah	485	32.56
	Jumlah	1.489	100

Sumber: Data primer diolah, 2017

Tabel 2 memperlihatkan bahwa tingkat pendidikan penduduk yang paling banyak ialah penduduk yang belum bersekolah/tidak sekolah yaitu sebanyak 485 orang atau 32,56%, kemudian tidak tamat SD yaitu 405 orang atau 27,20%, dan tamat SD sebanyak 208 orang atau 13,97%.

Penduduk Kelurahan Rap-Rap, Kecamatan Airmadidi beraneka ragam mata pencahariannya. Jenis mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel.3
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

1.	Petani Pemilik	234	41.06
2.	Petani Penggarap	197	34.57
3.	Buruh/ Tukang	56	9.83
4.	Pengusaha/ Pedagang	22	3.86
5.	Nelayan	48	8.42
6.	PNS	11	1.92
7.	Sopir	2	0.34
	Jumlah	570	100

Sumber: Data primer diolah, 2017

Berdasarkan jumlah penduduk menurut mata pencaharian pada Tabel 3, maka mata pencaharian sebagai petani merupakan mata pencaharian yang dominan di Kelurahan Rap-Rap Kecamatan Airmadidi yaitu 234 orang atau sebesar 41,06 %, kemudian petani penggarap 197 orang atau 34,57 %, diikuti buruh/tukang 56 orang atau sebesar 9,83 %.

Sarana jalan beraspal merupakan jalan utama desa yang menghubungkan antardesa/kelurahan di Kecamatan Airmadidi sampai ke Ibukota Kabupaten Minahasa Utara dapat dilalui oleh berbagai kendaraan dari roda dua sampai truk. Angkutan umum sebagai sarana transportasi selalu ada. Balai Pertemuan Umum Kelurahan sebagai sarana pemerintahan sudah tersedia, Koperasi dan Kantor Kelurahan Rap-Rap. Untuk sarana pendidikan terdapat 2 Taman Kanak-kanak (TK), 2 Sekolah Dasar (SD). Sarana peribadatan yang ada di Kelurahan Rap-Rap Gereja GMIM, Katolik, Pantekosta dan Advent. Dalam hal sarana kesehatan di Kelurahan Rap-Rap telah memiliki 1 Puskesmas Pembantu.

Umur sangat memengaruhi kemampuan seseorang untuk beraktivitas dan bekerja secara efektif, maupun dalam menentukan cara berpikir. Ditinjau dari segi fisik, makin tua seseorang maka makin berkurang kemampuannya bekerja, begitupun sebaliknya seseorang yang masih muda keadaan fisiknya masih kuat dan lebih responsif terhadap teknologi baru. Tingkatan umur petani responden dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel.4
Tingkat Umur Responden

1.	25 - 35	13	43.3
2.	36 - 45	7	23.3
3.	46 -55	4	13.4
4.	> 56	6	20
Jumlah		30	100

Sumber : Data primer diolah, 2017

Etnis merupakan kelompok sosial yang tiap anggotanya memiliki kesamaan asal-usul, latar belakang sejarah dan nasib yang sama, serta memiliki satu atau beberapa ciri kultural dan solidaritas yang unik. dapat dilihat pada tabel 5 dibawah ini :

Tabel 5
Etnis di Kelurahan Rap-Rap

1.	Minahasa	26	86.7
2.	Sangihe	4	13.3
Jumlah		30	100

Sumber : Data primer, diolah, 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa petani pala dan pengolah hasil pala dalam bentuk industri kerajinan pala yang paling banyak di Kelurahan Rap-Rap adalah berasal dari etnis Minahasa yaitu berjumlah 26 orang (86.7 %). Sedangkan etnis yang paling sedikit berasal dari etnis Sangihe yaitu berjumlah 4 orang (13.3 %).

Pendidikan merupakan salah satu aspek sosial yang sangat penting dalam menunjang manusia untuk mengembangkan usahanya, serta mendukung usaha seseorang untuk semakin maju dalam keterampilannya berusaha. Tingkat pendidikan memberikan pengetahuan yang luas dalam mengembangkan setiap sarana yang ada disekitar lingkungan seperti modernisasi sarana transportasi penangkapan ikan. Pendidikan juga memengaruhi kemampuan seseorang dalam menyerap teknologi baru seperti modernisasi teknologi pertanian :

Tabel 6
Pendidikan Responden Menurut Pengolongannya

1.	SD	8	26.7
2.	SMP	4	13.3
3.	SMA/SMK	16	53.3
4.	Diploma (I/II/II)	2	6.7
Jumlah		30	100

Sumber : Data primer, diolah, 2017

Data pada tabel di atas menunjukkan responden petani pala yang diwawancara 53.3 % berpendidikan SMA/SMK dan 26.7 % berpendidikan hanya sampai SD.

Lahan merupakan faktor produksi yang sangat penting dalam usahatani untuk menghasilkan suatu komoditi pertanian. Adapun persebaran responden menurut luas pemilikan lahan kelapa pada tabel berikut ini.

Tabel.7
Persebaran Responden Menurut Luas Pemilikan Lahan Kelapa

Luas Lahan (Ha)	Rata - Rata	(n)	Proporsi
< 0.50	-	-	-
0.51 – 1.35	0.96	10	30.0
1.36 – 2.66	1.94	10	30.0
2.67 – 4.0	3.41	5	15.0
>4.01	6.16	5	15.0

Sumber: Data primer diolah, 2017

Secara keseluruhan dari tabel 7 responden di atas menunjukkan ketidak merataan yang cukup tinggi dalam pemilikan dan penguasaan lahan kelapa yaitu 0,5064 yang merupakan indeks koefisien gini pemilikan lahan kelapa.

Jumlah produksi dari tiap-tiap petani selama satu tahun berbeda-beda tergantung dari jumlah pohon yang mereka usahakan. Distribusi petani pala menurut jumlah pohon di Kelurahan Rap-Rap dapat dilihat pada Tabel 8

Tabel.8
Karakteristik Umum Kelas Luasan Usaha Tani Pala

Uraian	Petani Kecil	Sedang	Besar
Jumlah Sampel	10	15	5
Jumlah Petani Pohon Pala	< 40 (9)	41-71 (11)	>71 (5)
Luas Areal Kelapa			
Range	0,50-1,33	1.34-2.66	2.67-4.00
Rata-rata	0,96	1,94	3,41
Areal sawah (ha)	0,14	0,40	0,29
Areal tanah kering	0,51	0,64	0,58
Total areal lahan	1,61	2,98	4,26
Jumlah tanggungan	5,0	5,40	5,68
HOK/hari/tahun			
Tersedia	360,00	416,00	428,00
Digunakan	187,00	202,00	273
Kebutuhan Keluarga	Rp.346.000	Rp.374.000	Rp.393.000
Pendapatan Keluarga	Rp.315.000	Rp.462.000	Rp.754.000

Sumber: Data primer diolah, 2017.

Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa masih terlihat bahwa “*seasonal employment*” yang cukup tinggi sekitar 50 % dari “*labour force*”. Hasil lainnya, menunjukkan pengeluaran rumah tangga petani dalam memenuhi kebutuhan pokok mengalami kesulitan, dimana untuk petani kecil Pendapatan Rp315.000 sementara distribusi pengeluaran justru lebih besar. Dari Tabel 8 di atas dapat diturunkan “analisis kemampuan konsumsi” untuk kelompok petani kecil, menengah dan besar dari responden petani pala di Kelurahan Rap-Rap yang ada di Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara. Berdasarkan kajian hubungan antara alokasi kredit petani pala dengan hasil capaian yang diharapkan petani dapat diturunkan pada tabel 9 berikut ini :

Tabel.9 Net Present Value dari “Consumtion Oportunity” pada Petani Pala di Sentra Produksi Kelurahan Rap-Rap

Alokasi Kredit	NPV Kecil	NPV Sedang	NPV Besar
Rp. 1.000.000	0.318	1.078	1.563
Rp.2.500.000	0.217	1.091	1.566

Alokasi Kredit	NPV Kecil	NPV Sedang	NPV Besar
Rp. 5.000.000	0.317	1.094	Na
Rp. 7.500.000	0.322	1.099	Na

Sumber : Data primer diolah, 2017

Dari Penelusuran terhadap alokasi kredit produktif (KUK,KUT) menunjukkan bahwa tidak ada korelasi positif dengan NPV untuk kelompok petani kecil, dimana petani kecil dalam keadaan terpaksa akan menggunakan besar yang memiliki “marginal benefit” yang cukup diandalkan ketimbang kepada kelompok petani kecil yang berada pada “*subsistence level*”.

Pola penanaman pala di Kelurahan Rap-Rap pada umumnya tidak mengikuti jarak tanam yang dianjurkan, karena dipengaruhi oleh keadaan topografi wilayah yang sebagian besar merupakan tanah berbukit sampai bergunung hingga terjal. Hal ini berpengaruh pada jumlah produksi yang dihasilkan tidak maksimal, apalagi keberadaan kebun merupakan kebun campuran. Tanaman pala dapat berbuah terus menerus sepanjang tahun dan pemetikannya dilakukan sebanyak 3 kali dengan interval waktu 4 bulan. Cara panen dilakukan dengan memanjat batang pohon kemudian buahnya dipetik dengan menggunakan galah yang diberi pengait pada ujungnya. Buah pala yang jatuh dikumpulkan kemudian dibelah, di bawah dan dilakukan pemisahan fuli dari bijinya kemudian dijemur sampai kering. Petani memanfaatkan biji dan fuli kering untuk dijual. Proses pemasaran biji pala dan fuli di Kelurahan Rap-Rap dapat dikatakan lancar, dimana petani produsen dapat menjualnya kepada pedagang pengumpul yang ada di kampung atau langsung dijual kepada pedagang pengumpul di ibukota kabupaten Minahasa Utara. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa petani responden memproduksi biji pala kering sebesar 5.075 Kg atau rata-rata 253,75 Kg per tahun dan fuli kering sebanyak 497,3 Kg atau rata-rata 24,86 Kg per tahun

Komponen biaya yang dikeluarkan petani pala di Kelurahan Rap-Rap dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel.10
Biaya Produksi Petani Pala

Jenis Biaya (Rp)	Total	Rata-rata
1. Biaya Tetap		
a.Pajak	1.289.550	42.985
b.Penyusutan alat		
-Parang	495.000	16.500
-Pisau	242.430	8.081
-Karung	275.640	9.188
-Terpal	480.000	16.000
-Cangkul	283.500	9.450
-Mesin Pemotong Rumput	4.005.000	133.500
-Pengait Buah	1.158.750	38.625
Jumlah biaya tetap	8.229.870	274.329
2. Biaya Variabel		
(i).Biaya Bahan		
-Makanan	8.662.500	288.750
-Bensin	1.072.500	35.750
-Transportasi	2.325.000	77.500
Sub total	12.060.000	402.000
(ii)Biaya Tenaga kerja		
-Penyiangan	7.410.000	247.000
-Pemetikan	25.132.500	837.750
-Pemisahan	5.962.500	198.750
-Pengeringan	7.020.000	234.000
-Sortasi/pengepakan	4.297.500	143.250

Jenis Biaya (Rp)	Total	Rata-rata
Sub total	49.822.500	1.660.750
Biaya Variabel	61.882.500	2.062.750
3. Biaya Total	70.112.370.	2.337.079

Sumber : Data primer diolah, 2017

Tabel 10 menunjukkan bahwa biaya produksi rata-rata usahatani pala untuk 30 responden di Kelurahan Rap-Rap selama satu tahun sebesar Rp 2.337.079,00 yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Biaya pajak rata-rata di daerah penelitian sebesar Rp 42.985,00 per petani. Sedangkan untuk biaya penyusutan peralatan berupa parang, rata-rata sebesar Rp 16.500,00 per petani, pisau dengan biaya penyusutan rata-rata sebesar Rp 8.081,00 per petani, karung rata-rata Rp 9.188,00 per petani, terpal rata-rata Rp 16.000,00 per petani, cangkuk rata-rata Rp 9.450,00 per petani, mesin pemotong rumput dengan rata-rata Rp 133.500,00 per petani dan pengait buah dengan rata-rata Rp 38.625,00 per petani. Dengan demikian biaya tetap rata-rata yang harus dikeluarkan petani selama satu tahun produksi sebesar Rp 274.329,00

Dari hasil penelitian diketahui bahwa biaya variabel rata-rata sebesar Rp 2.062.750,00 per petani. Biaya ini terdiri atas biaya bahan yang meliputi biaya makanan dengan rata-rata Rp 288.750,00 per petani dan biaya bahan bakar berupa bensin dengan rata-rata Rp 35.750,00 per petani. Komponen biaya variabel yang juga dihitung dalam penelitian ini ialah biaya transportasi yang dikeluarkan petani untuk membawa hasil produksinya ke pedagang pengumpul di ibu kota kabupaten dengan rata-rata biaya sebesar Rp 77.500,00 per petani.

Tenaga kerja untuk usaha tani pala di Kelurahan Rap-Rap biasanya digunakan untuk kegiatan pemeliharaan/penyiangan, pemetikan sampai dengan pengepakan dan penjualan. Para petani pala di Kelurahan Rap-Rap tidak menggunakan pupuk dan obat-obatan untuk pemberantasan hama dan penyakit.

Tenaga kerja untuk kegiatan pemeliharaan/penyiangan tanaman pala rata-rata sebesar Rp 247.000,00 per petani, untuk prosesing biaya tenaga kerja proses pemetikan rata-rata sebesar Rp 837.750,00 per petani, pemisahan biji dan fuli rata-rata Rp 198.750,00 per petani, biaya pengeringan rata-rata Rp 234.000,00 per petani dan sortasi dan pengepakan membutuhkan biaya tenaga kerja rata-rata Rp 143.250,00 per petani.

Harga merupakan persetujuan antara pembeli dan penjual dalam menilai suatu produk tertentu. Berdasarkan hasil penelitian untuk harga pala kering bervariasi, terendah Rp 83.000,00 sampai yang tertinggi Rp 196.000,00 per kg, tergantung harga yang berlaku pada saat penjualan, sehingga diperoleh rata-rata harga pala kering Rp 61.400,00 per Kg. demikian juga untuk fuli diperoleh harga rata-rata Rp 108.900,00 per Kg.

Produksi, dari hasil pengelolaan data secara keseluruhan diperoleh bahwa produksi rata-rata yang dihasilkan dari usahatani pala kering dalam satu tahun 253,7 Kg dan fuli kering rata-rata 24,86 Kg.

Penerimaan, Biaya dan Pendapatan, penerimaan adalah perkalian antara produksi dan harga jual produk tersebut. Pendapatan usaha tani merupakan selisih antara penerimaan dengan semua biaya yang dikeluarkan dalam suatu usaha tani. Pendapatan dalam penelitian ini ialah pendapatan petani pala selama satu tahun produksi. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat dari Tabel 11 tentang perolehan pendapatan usahatani pala di Kelurahan Rap-Rap.

Tabel 11
Penerimaan, Biaya dan Pendapatan di Kelurahan Rap-Rap

No.	Uraian	Indikator Usaha Tani (Rp) Petani (n=30)	Rata-Rata (Rp)
1.	Penerimaan	550.130.700	18.337.690
2.	Biaya	70.112.370	2.337.079
3.	Pendapatan	480.018.330	16.000.611

Sumber; Datar primer diolah, 2017

Tabel 11 menunjukkan bahwa dari penerimaan rata-rata per petani sebesar Rp. 18.337.690,-/petani dengan biaya rata-rata Rp. 2.337.079,-/petani maka pendapatan rata-rata yang diterima petani ialah Rp. 16.000.611,- /petani/per tahun. Hasil wawancara terhadap 30 petani pala di kelurahan Rap-Rap yang memiliki lahan usahatani 0,51 – 1 ha menunjukkan penerimaan Rp.550.130.700, dengan biaya Rp.70.112.370 dan Pendapatan bersih Rp.480.018.330

Tingkat keuntungan ekonomi dapat diketahui dengan menggunakan analisis *Return Cost Ratio* (R/C Rasio). Analisis R/C adalah perbandingan antara penerimaan dan biaya . Analisis R/C untuk usahatani Pala di Kelurahan Rap-Rap :

$$\begin{aligned}
 a &= R/C \\
 &= \text{Rp } 18.337.690 / \text{Rp } 2.337.079 \\
 &= 7,85
 \end{aligned}$$

Artinya penerimaan rata-rata dalam satu musim panen dibagi dengan total biaya rata-rata, R/C sebesar 7,85 dimana setiap unit biaya akan menghasilkan penerimaan sebesar 7,85 kali biaya sehingga usahatani layak untuk dikembangkan.

SIMPULAN

Hasil penelitian usaha tani pala di Kelurahan Rap-Rap Kecamatan Airmadidi dapat disimpulkan bahwa penerimaan rata-rata sebesar Rp 18.337.690,00 dan biaya produksi rata-rata sebesar Rp 2.337.079,00 memperoleh pendapatan rata-rata sebesar Rp 16.000.611,00 dengan nilai R/C 7,85, maka usaha tani yang dilakukan memberikan pendapatan bagi petani sehingga layak untuk dikembangkan.

SARAN

Petani disarankan mempertahankan dan meningkatkan produksi yang ada, juga disarankan untuk memanfaatkan daging buah pala dan mengoptimalkan unsur usahatani lain untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Untuk pemerintah agar lebih memperhatikan ketetapan harga pala agar tidak berfluktuasi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrachman, A.A. 1992. Ensiklopedia ekonomi, keuangan, perdagangan. Pradya Paramita, Jakarta

- Anonim, 1997 Sulawesi utara dalam Angka
- Arsyad Lincolin. 1988. *Ekonomi Manajerial, Penerapan Ekonomi mikro dalam manajemen bisnis*, BPFE, Yogyakarta.
- Brown, M.L. 1979. *Farm budget from farm income analysis to agryculture project analysis*. The Johns
- Castle Emery, N, dkk. 1987. *Farm business Management ; The decision-making process*, third edition
- Hernanto Fadholi. 1991. *Ilmu Usaha tani*. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Hernanto, 1993. **Akuntansi Biaya**. BPFE. Yogyakarta.
- . 1996. **Ilmu Usahatani**. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Kartosapoetra, 1988. **Pengantar Ekonomi Produksi**. PT. Bina Aksara, Jakarta.
- . 1998. **Pengantar Ekonomi Produksi Pertanian**. PT. Bina Aksara, Jakarta.
- . 1991. **Hukum Tanah**. Rineka Cipta, Jakarta.
- Mubyarto, 1991. **Pengantar Ekonomi Pertanian**. LP3ES, Jakarta.
- Pala Nasional**. Makalah yang dibawakan dalam Forum Pala Nasional 1991 di Manado.
- Rahardi, F., N. R. Setyowati., dan I. Setyawibawa, 1993. **Agribisnis Tanaman Perkebunan**. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Rahardja, P dan M. Manurung., 2006. **Teori Ekonomi Mikro**. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Rismunandar, 1992. **Budidaya dan Tataniaga Pala**. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Rukmana, R. 2006. **Usaha Tani Pala**. CV. Aneka Ilmu, Semarang.
- Soekartawi, 1995. **Analisis Usaha Tani**. Universitas Indonesia, Jakarta.
- . 2002. **Analisis Usaha Tani**. UI Press, Jakarta.
- . 2003. **Teori Ekonomi Produksi**. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sondakh, L. W., M. H. Tamba., dan P. H. Rawis, 1991. **Peluang Peningkatan Efisiensi dan Peran Industri**
- Sunanto, 1993. **Budidaya Pala Komoditas Ekspor**. Kanisius, Yogyakarta.
- Suyanto, 2000. **Ekonomi**. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Soekartawi. 1991. *Agribisnis; teori dan aplikasi*. Rajawali pers. Jakarta.
- , 1990. *Teori ekonomi produksi; dengan pokok bahasan Analisis Cobb Douglas*. Rajawali. Jakarta

Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) pada Tiga Perkampungan Nelayan Air Kuning, Pengembangan dan Candi Kusuma Kabupaten Jembrana Propinsi Bali (Suatu Studi Komparatif)

I Gede Made Subagiana¹, I Gusti Lanang Suta Artatanaya², Ni Luh Made Wijayati³

^{1,2,3}Jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Bali
Kampus Bukit Jimbaran-Bali, Telp.+62 361 701981
Email : ratihhostel@yahoo.com

***Abstract :** In order to alleviate poverty of coastal communities, since 2001, the Minister of Maritime Affairs and Fisheries has made a program named “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir” (PEMP) program. Poorly, the “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir” (PEMP) program applied is not based on need, potential, expectations, culture and local wisdom community (Botton Up), but the Top Down. The purpose of this study was to find a model really based on the needs and expectations of Coastal Communities. The model is expected to truly accommodate the needs and expectations of groups that exist in the coastal communities, by taking into account cultural and local wisdom, especially people in three fishing villages : Air Kuning, Pengembangan and Candi Kusuma-Jembrana District, Bali. The method used in this research was the method of Research Development, namely: needs analysis, development and testing of the products as well as the adoption of the product. Its activities focused on the identification and analysis of needs with exploration of PEMP that ever applied , explored the perceptions and expectations of society , as a basis for modeling and further tested. Based on the analysis of exploring PEMP which has been run, the researchers could create a model that would be more suitable with PEMP and closer to the wishes and expectations of coastal communities. As for the draft / design of this new model of PEMP which involved 5 (five) aspects which is as follows: Economic Aspects (regarding employment and income generation); Social Aspects (concerning education, science and technology, and health); Environmental and Housing Aspects (Preservation of coastal resources, and surgical house); Infrastructure Aspects (include improving port, fishing boats docking, fish auction, multiply the People's Hatchery Unit, brackish water hatchery, fish processing plants multiply/canning fish and others); Aspects of Cultures includes: cultivate nature of mutual cooperation, Iman and Taqua developed the art Makepung when west season, maintains the existing norms as Awig awig..*

Keywords: coastal communities, economic empowerment, fishing village.

Abstrak : Dalam rangka mengentaskan kemiskinan masyarakat pesisir, sejak tahun 2001 Menteri Kelautan dan Perikanan menggulirkan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP). Ironisnya program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang diterapkan selama ini tidak berdasarkan atas kebutuhan, potensi, harapan, budaya serta kearifan lokal masyarakat (*Botton Up*), tetapi secara *Top Down*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan suatu model yang benar-benar berdasarkan kebutuhan dan harapan Masyarakat Pesisir. Model yang benar-benar dapat mengakomodasi kebutuhan dan harapan dari kelompok yang ada di masyarakat pesisir, dengan memperhatikan budaya dan kearifan lokal, terutama orang-orang di tiga desa nelayan: Air Kuning, Pengembangan dan Candi Kusuma Kabupaten Jembrana, Bali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian Pengembangan, yaitu: analisis kebutuhan, pengembangan dan pengujian produk serta penerapan produk. Kegiatannya berfokus pada identifikasi dan analisis kebutuhan dengan mengeksplorasi PEMP pernah diterapkan saat ini, mengeksplorasi persepsi dan harapan masyarakat, sebagai dasar untuk pemodelan dan diuji lebih lanjut. Berdasarkan analisis dan penelitian secara mendalam dengan mengeksplorasi PEMP yang telah berjalan, para peneliti dapat membuat model yang akan lebih cocok dengan PEMP dan lebih dekat dengan keinginan dan harapan masyarakat pesisir. Adapun rancangan / desain model PEMP baru ini melibatkan 5 (lima) aspek sebagai berikut: Aspek Ekonomi (tentang pekerjaan dan peningkatan pendapatan); Aspek Sosial (menyangkut pendidikan,

ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kesehatan); Aspek Lingkungan dan Perumahan (Pelestarian sumber daya pesisir, dan bedah rumah); Aspek Infrastruktur (termasuk meningkatkan pelabuhan, docking kapal nelayan, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), memperbanyak Unit Pembenihan Rakyat, pembenihan air payau, memperbanyak pabrik pengolahan ikan / pengalengan ikan dan lain-lain); Aspek Budaya (menumbuh kembangkan sifat gotong royong, Iman dan Taqwa mengembangkan seni Makepung saat musim barat, mempertahankan norma-norma yang ada sebagai Awig awig.

Kata kunci: desa nelayan, masyarakat pesisir, pemberdayaan ekonomi

PENDAHULUAN

Sebagai Negara Maritim 70% luas Indonesia terdiri dari lautan, yang sebagian besar kekayaan lautnya belum dieksplorasi secara maksimal, malahan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir/nelayan tingkat kehidupannya jauh tertinggal dibandingkan dengan masyarakat lain yang hidup di daratan. Seperti: petani, pedagang, dan pegawai. Sebagian besar anggota keluarga masyarakat pesisir mengandalkan nasib pada hasil tangkapan ikan suami. Isteri hanya berfungsi sebagai ibu rumah tangga semata-mata. Hasil tangkapan ikan para suami dipasarkan oleh kelompok lain yang tergolong lebih mapan tingkat kehidupan ekonominya seperti saudagar/juragan pedagang ikan. Kelompok juragan sebagian besar melakukan fungsi ganda yaitu selain sebagai pengepul juga sebagai rentenir. Di satu sisi nelayan harus membayar bunga tinggi atau membeli barang yang disediakan juragan dengan harga lebih tinggi, di sisi lain nelayan juga berkewajiban menjual ikan kepada juragan dengan harga relatif lebih murah sebagai balas budi atas pemberian pinjaman dana untuk memenuhi kebutuhan. Praktik inilah yang mencekik leher nelayan selama ini dan nelayan tidak bisa berlutik untuk bisa lepas dari jeratan dilema ini karena tidak mempunyai pilihan lain, sehingga nelayan tetap miskin[1]. Hal serupa juga dirasakan masyarakat pesisir di Bali. Pulau Bali merupakan pulau kecil yang dikelilingi oleh lautan, sehingga potensi pengembangan sumber daya laut dan pesisir sangat terbuka lebar. Luas Pulau Bali 5.636,66 km² dengan jumlah penduduk 3.890.757 jiwa, sejumlah 561.532 jiwa bekerja pada sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan[2]. Provinsi Bali terdiri dari delapan kabupaten, satu kota secara geografis kabupaten yang berada di belahan barat Pulau Bali adalah Kabupaten Jembrana. Kabupaten Jembrana memiliki luas wilayah 84.180 hektar dengan jumlah penduduk 261.638 jiwa serta garis pantai sebagai wilayah pesisir sepanjang 83 kilometer yang terbentang dari Desa Pengeragoan sampai di Kelurahan Gilimanuk[3].

Kabupaten Jembrana terdiri dari 5 Kecamatan, 42 Desa dan 9 Kelurahan. Dua puluh empat desa di antaranya merupakan desa pesisir yang menjadi binaan Bidang Perikanan dan Kelautan karena sebagian penduduknya bermata-pencarian sebagai nelayan tangkap, nelayan budi daya / tambak, pengepul / pedagang ikan, pengolah ikan dan buruh nelayan / ABK.

Saat ini banyak program pemberdayaan yang mengklaim sebagai program yang berbasis kepada keinginan dan kebutuhan masyarakat (*bottom up*), tapi ironisnya masyarakat tetap saja tidak merasa memiliki akan program-program tersebut sehingga tidak aneh banyak program yang hanya seumur masa proyek dan berakhir tanpa dampak berarti bagi kehidupan masyarakat pesisir. Seperti halnya Program PEMP yang telah digulirkan oleh Menteri kelautan dan perikanan mengalami nasib yang sama.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan peneliti, menemukan indikasi bahwa Model PEMP yang dilaksanakan hanya menitikberatkan pada pemberian bantuan modal / ekonomi, itupun hanya menasar elit-elit nelayan tangkap padahal di wilayah pesisir terdapat banyak kelompok masyarakat nelayan, di samping itu juga hanya melibatkan kaum pria sedangkan kaum gender termarginalkan. Memberdayakan masyarakat pesisir berarti menciptakan peluang bagi masyarakat pesisir untuk menentukan kebutuhannya, merencanakan dan melaksanakan kegiatannya, yang akhirnya menciptakan kemandirian permanen dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.

Memberdayakan masyarakat pesisir tidaklah seperti memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat lainnya, karena di dalam habitat pesisir terdapat banyak kelompok masyarakat nelayan di antaranya: kelompok masyarakat nelayan tangkap, nelayan budidaya / tambak, nelayan pengepul / pedagang ikan, nelayan pengolah ikan, serta buruh nelayan / ABK.

Setiap kelompok masyarakat tersebut haruslah mendapat penanganan dan perlakuan khusus sesuai dengan kelompok, usaha, dan aktivitas ekonomi mereka. Pemberdayaan masyarakat tangkap misalnya, mereka membutuhkan sarana penangkapan dan kepastian wilayah tangkap. Berbeda dengan kelompok masyarakat tambak, yang mereka butuhkan adalah modal kerja dan modal investasi, begitu juga untuk kelompok masyarakat pengolah dan buruh. Kebutuhan setiap kelompok yang berbeda tersebut, menunjukkan keanekaragaman pola pemberdayaan yang akan diterapkan untuk setiap kelompok tersebut. Dengan demikian program pemberdayaan untuk masyarakat pesisir haruslah dirancang dengan sedemikian rupa dengan tidak menyamaratakan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya apalagi antara satu daerah dengan daerah pesisir lainnya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Michel Sipahelut (2010) yang berjudul Analisis Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Tolebo Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Program PEMP telah memicu perubahan sosial budaya, teknologi, ekonomi dan kelembagaan masyarakat pesisir.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk menemukan Model PEMP yang benar-benar berdasarkan atas kebutuhan dan harapan Masyarakat Pesisir.

METODE PENELITIAN

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang akan mengkaji berbagai aspek yang diteliti dengan menggunakan data yang valid, reliabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Pengamatan terhadap fenomena yang terjadi di lapangan dilakukan secara cermat dan hati-hati agar data yang terkumpul tingkat akurasinya tinggi. Penelitian pengembangan biasanya merupakan jembatan antara penelitian dasar dan penelitian terapan. Adapun penelitian pengembangan dilakukan dengan langkah langkah sebagai berikut Analisis kebutuhan, pengembangan dan pengujian produk, dan penerapan produk (Sugiyono,2017).

Penelitian ini dilaksanakan selama dua tahun (bersifat longitudinal), pada tahun pertama: mengidentifikasi semua potensi yang ada di ketiga perkampungan nelayan. Selanjutnya menganalisis segala kebutuhan dengan mengeksplorasi

PEMP yang diterapkan saat ini, mengeksplorasi model-model pengelolaan dan pemberdayaan yang telah berjalan, menggali persepsi serta harapan masyarakat nelayan terhadap desain model PEMP yang akan dikembangkan, uji coba Model eksperimen melalui penerapan manajemen modern. Tahun kedua: akan menerapkan Model pemberdayaan yang baru yang berbasis dari kebutuhan Masyarakat Kampung pesisir (*grass root*), pada tahun ini pula, sekaligus mengevaluasi Model PEMP yang baru.

Pada tahun pertama, penelitian ini diawali dengan mengadakan rapat koordinasi tim peneliti, menyiapkan pedoman wawancara dengan para responden. Selanjutnya dilakukan identifikasi, analisis kebutuhan, eksplorasi model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) pada tiga perkampungan nelayan, menyusun draf / mendesain model serta pengkajian penerapan model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.

Penelitian dilakukan di tiga perkampungan nelayan yaitu kampung nelayan: Air Kuning, Pengambangan, dan Candi Kusuma Kabupaten Jembrana Propinsi Bali. Pemilihan 3 kampung nelayan ini dianggap mewakili karena jumlah populasinya paling banyak sebagai nelayan dari 24 Kampung nelayan yang ada se-Kabupaten Jembrana. Adapun penentuan sampelnya berdasarkan *Purposive sampling* yaitu teknik pengumpulan sampel yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan dan pertimbangan tertentu. Para informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah para ketua kelompok nelayan, para penyuluh Perikanan dari Dinas Perikanan dan Kelautan, para LSM pemerhati kelestarian Wilayah Pesisir dan kelautan, pengurus Koperasi Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina (LEPPM3) dan para nelayan yang terlibat langsung dengan PEMP. Adapun jumlah sebanyak 60 responden (Air Kuning 14 responden, Pengambangan 42 responden dan Candi kusuma 4 responden).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan observasi langsung di lapangan di tiga perkampungan nelayan, terdapat lima kelompok masyarakat nelayan yaitu:

- a. Nelayan tangkap, mempunyai potensi untuk terus di kembangkan terutama nelayan tradisional dan nelayan semi modern. Kabupaten Jembrana mempunyai panjang garis pantai 83 km yang terbentang dari Pengeragoan samapai Gilimanuk dengan luas wilayah tangkap sekitar 604,24 kilometer persegi, dengan jumlah nelayan 9.666 orang, jumlah perahu dan kapal ikan 1.549 bh. dengan ditunjang prasarana seperti Tempat Pelelangan Ikan 1 unit, Pelabuhan perikanan 1 unit, Perbengkelan dan Docking Kapal Ikan 1 unit, pos timbang ikan 4 unit.
- b. Nelayan Budi Daya, Luas daerah untuk budidaya 3.000 ha., baru tergarap 311 ha. (10,37%)[3], prasarana penunjang budi daya yang tersedia antara lain: Unit Pembenihan Rakyat (UPR) 5 unit, Pembenihan Air Payau / Hatchery 5 unit.
- c. Nelayan Pengepul / pedagang ikan, daerah pemasarannya, masih terbatas pada pasar lokal.
- d. Nelayan Pengolah Ikan produknya belum begitu bayak variasinya, kebanyakan berupa tepung ikan, pindang, ikan asin, gaplek dan sarden. Adapun sarana penunjang yang dimiliki adalah: Pabrik pengalengan dan tepung ikan 12 unit, Pengolahan ikan / gaplek ikan 95 unit dan pabrik Es 4 unit.

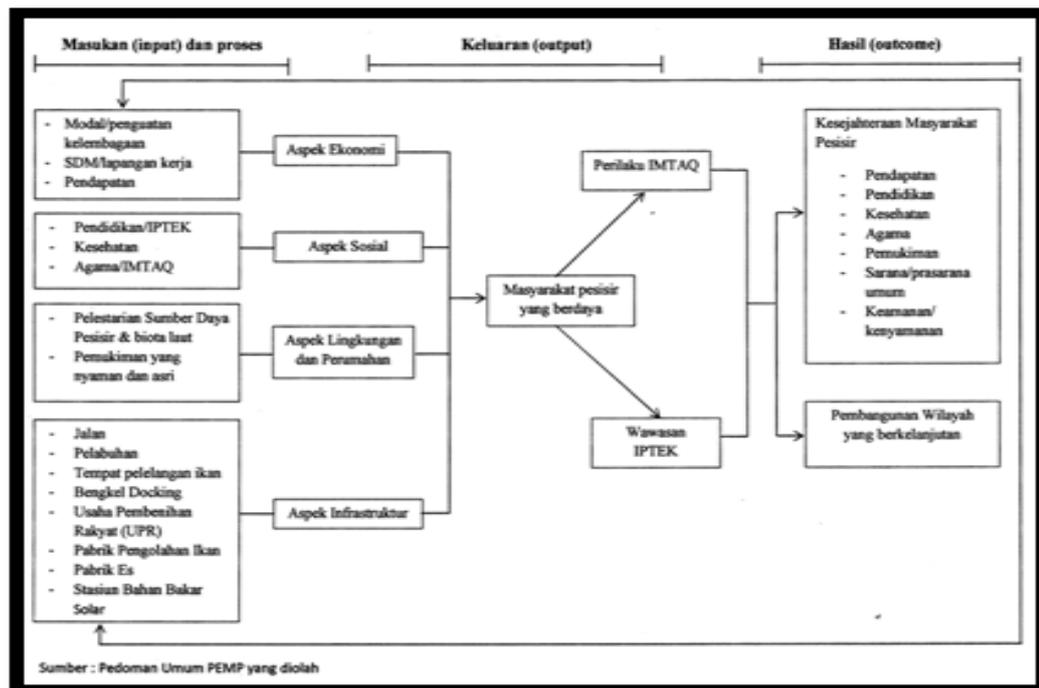
- e. Buruh Nelayan / ABK jumlahnya cukup banyak terutama di daerah Pengambangan sentra bongkar muat ikan ke TPI.

Berdasarkan pengamatan pada tiga perkampungan nelayan yaitu kampung nelayan: Air Kuning, Pengambangan dan Candi Kusuma didapatkan bahwa, Nelayan Tangkap lebih membutuhkan sarana / alat tangkap yang memadai seperti tersedianya perahu / kapal , gilnet, pajeko, sonar, *purse sein* dan informasi cuaca, satelit *Nasional Osianic Atmosphere Administration* (NOAA), memerlukan modal usaha serta kepastian wilayah tangkap. Nelayan Budidaya, lebih membutuhkan luas areal garapan tambak, bibit yang berkualitas, pakan yang terjangkau dan modal. Pedagang ikan / pengepul membutuhkan modal, serta akses pasar. Nelayan Pengolah Ikan, membutuhkan tempat penyimpanan ikan / *Cool Storage*, pelatihan untuk variasi produk, ketersediaan bahan baku yang kontinyu serta pemasaran galek / tepung ikan. Sedangkan Buruh Nelayan / ABK memerlukan standar pengupahan yang pasti, jaminan keselamatan kerja dan Klinik Kesehatan.

Program PEMP bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kesejahteraan tidak hanya meliputi aspek ekonomi (lapangan kerja dan pendapatan) tetapi juga meliputi aspek sosial (pendidikan, kesehatan dan agama), aspek lingkungan sumberdaya perikanan dan laut serta aspek pemukiman dan infrastruktur.

Pengembangan aspek ekonomi penting untuk mengembangkan lapangan kerja dan berusaha serta meningkatkan pendapatan. Aspek sosial penting untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), Iman dan Taqwa (IMTAQ) serta sikap dan perilaku. Aspek lingkungan penting untuk pelestarian sumberdaya pesisir dan laut, serta perbaikan pemukiman. Aspek infrastruktur ini dibutuhkan untuk memperlancar mobilitas pelaksanaan kegiatan ekonomi dan sosial. Keempat aspek tersebut (ekonomi, sosial, lingkungan dan infrastruktur) harus ditunjang oleh kelembagaan sosial ekonomi yang kuat dan dikembangkan secara seimbang agar kesejahteraan dapat ditingkatkan secara optimal.

Keberhasilan dalam peningkatan pendapatan (ekonomi) akan dipengaruhi oleh kegiatan usaha yang bisa dikembangkan dan permodalan yang dapat disediakan serta kondisi pasar yang mendukungnya. Kegiatan usaha itu sendiri keberhasilannya akan dipengaruhi oleh kondisi sumberdaya laut dan pesisir yang ada, teknologi yang tersedia serta kualitas SDM yang akan mengelolanya. Kualitas sumberdaya manusia yang dicirikan oleh perilaku, IMTAQ serta wawasan IPTEK, kondisinya sangat dipengaruhi oleh lingkungan, tingkat pendidikan, kesehatan dan agama serta adat dan budaya. Hal tersebut penting untuk diperhatikan dan dikembangkan dalam rangka pengembangan ekonomi yang meliputi manajemen usaha, kemitraan dan kelembagaan yang dikelolanya. Kerangka konsepsi pendekatan pemberdayaan masyarakat pesisir dapat dilihat pada Gambar Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir berikut:



Gambar 1. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Dalam uji coba model PEMP, tim peneliti terjun langsung ke lapangan menyebarkan kuisioner, kepada para informan, dan masyarakat kampung nelayan, setelah data terkumpul kemudian di tabulasi kemudian pemberian nomor dan data di analisis, hasilnya adalah bahwa Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang di desain sangat disetujui/disenangi oleh masyarakat pesisir Air Kuning, Pengambangan dan Candi Kusuma Kabupaten Jembrana.

Setelah identifikasi dan analisis kebutuhan, kemudian pembuatan draft / desain model, uji coba model pada tiga perkampungan nelayan, maka tahap selanjutnya adalah:

Penerapan model serta Evaluasi model, dimana penerapan model berupa uji coba pemakaian secara empiris, kemudian dievaluasi, apabila masih ada kekurangan maka akan direvisi model setelah itu Penerapan model PEMP yang baku yang benar benar memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat pesisir. Adapun aktivitas tahun kedua yaitu : Penerapan Model, Uji Coba Pemakaian, Evaluasi, Revisi Model, sampai menghasilkan model PEMP yang baku.

Dalam uji coba Penerapan Produk dan Evaluasi dilakukan dengan penerapan Model PEMP yang baru diperoleh hasidisukai oleh masyarakat pesisir jembrana karena memang benar-benar berbasis dari kebutuhan dan harapan masyarakat kampung nelayan Air Kuning, Pengambangan dan Candi Kusuma.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Konsep / Desain Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) ini, memuat berbagai aspek yaitu :

1. Aspek Ekonomi yang menyangkut: bantuan permodalan, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan.

2. Aspek Sosial Budaya meliputi: Pendidikan (IPTEK), Kesehatan dan Agama (IMTAQ), norma norma yang berlaku setempat seperti Awig-awig, makepung dan lainnya.
3. Aspek Lingkungan dan Perumahan, meliputi: Pelestarian sumber daya pesisir serta biota lautnya, Program bedah rumah bagi nelayan miskin.
4. Aspek Infrastruktur, meliputi: pengadaan Jalan, Pelabuhan, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Perbengkelan dan Docking Kapal Ikan, Unit Pembenihan Rakyat (UPR), dll.

Karena komplitnya model PEM ini, dirasakan sangat berpengaruh karena dapat mengakomodir semua setrata yang ada di wilayah pesisir terutama di tiga kampung nelayan Air Kuning, Pengembangan dan Candi Kusuma.

SARAN

Dalam hal ini disarankan kepada Pengambil kebijakan agar dalam pelaksanaan PEM betul betul dipantau agar tepat sasaran , serta berkesinambungan agar jangan sampai habis proyek habis pembinaan terhadap kaum termarginalkan khususnya masyarakat nelayan Air Kuning, Pengembangan dan Candi Kusuma Kabupaten Jembrana Propinsi Bali.

DAFTAR PUSTAKA

- Biro Pusat Statistik Propinsi Bali , 2013, "*Bali dalam Angka*".
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana, "*Profil*", 2014. 238
Hanafi hussin and abdullah Khoso, 2017, *Asianfisher Science* 30:87-100
ISSN.0116-6514
Michel Sipahelut, 2010, "*Analisis Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Tolebo, HalmaheraUtara*". IPB, Bogor Agricultural University
Sugiyono, "*Metode Penelitian Kwantitatif Kwalitatif dan R&D*", Alfabeta, Bandung, Edisi 9, 2017
P. Willroth, F. Massmann, 2012, *Sosio Economic Vulnerability of coastal communities in Southern Thailand. Journal: Natural Hazards and Earth system Sciences* p.2647-2658.
N. Lindstrom, Mia Larson, 2016. *Journal: Geographysosio-economic series* No.33 p.21-78 ISSN 1732-425

Evaluasi Pajak Penghasilan Badan Atas Perolehan Aset Tetap Metode *Financial Leasing* Studi Kasus Perolehan Aset Tetap pada Kubu Cempaka Hotel

Wayan Hesadijaya Utthavi

Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali

Email: hesadijayautthavi@pnb.ac.id

Pande Komang Surya Sandjaya

Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali

Email: pande_surya@rocketmail.com

Abstrak : Pengelolaan *cash flow* mengharuskan perusahaan mempertimbangkan alternatif pembiayaan untuk pembelian aset tetap yang paling menguntungkan agar dapat meminimalkan pengeluaran perusahaan dan meningkatkan keuntungan yang diperoleh. Penelitian ini menggunakan Kubu Cempaka Hotel sebagai objek penelitian. Kubu Cempaka Hotel bergerak di bidang jasa penginapan (hotel). Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perlakuan pajak penghasilan atas pembelian aset tetap yang dibeli menggunakan *financial leasing* dan untuk mengetahui mekanisme pembelian yang lebih menguntungkan antarpembelian dengan cara *financial leasing* dibandingkan dengan pembelian tunai sebagai dasar dalam penentuan kebijakan pembelian aset tetap.

Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa data aset yang dibeli secara *leasing* oleh perusahaan meliputi nilai aset, nilai opsi, jangka waktu kontrak *leasing*, dan suku bunga *leasing*. Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi dan metode observasi. Analisis yang dilakukan penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kuantitatif dan teknik analisis data komperatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alternatif pembelian dengan metode *financial lease* memberikan dampak pengurangan pajak yang lebih besar terhadap pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan dari pada alternatif pembelian secara tunai. Hal tersebut terjadi karena pada pembelian dengan alternatif metode *financial lease* memiliki jumlah biaya yang dapat di bebaskan (*deductible expense*) lebih besar dibandingkan dengan alternatif pembelian secara tunai.

Kata kunci: *financial lease*, pembelian tunai, pajak penghasilan, aset tetap

Abstract : Cash flow management requires companies to consider financing alternatives for the most profitable purchase of fixed assets in order to minimize corporate expenditures, as well as to increase profits. This research used Kubu Cempaka Hotel as research object. The purpose of this study was to determine the treatment of income tax on purchases of fixed assets purchased using financial leasing and to examine the mechanism of purchase which is more profitable between purchases using financial leasing and those using cash purchases as a basis in determining the policy of purchase of fixed assets.

The data in this research were secondary data. The data used were asset data purchased by leasing, which were asset value, option value, lease contract period, and lease rate. The data collection procedure used by the authors in this study used documentation techniques and observation. The analysis used in this study was quantitative and descriptive comperative technique. The result of the research showed that the purchase alternative using financial lease method gave a bigger impact of tax deduction on the tax paid by the company compared to the cash purchase. It happened because the purchase using financial lease method had a larger deductible expense compared to cash purchase.

Keywords: financial lease, cash purchases, income tax, fixed assets

PENDAHULUAN

Sumber *cash flow* sangatlah penting bagi kegiatan operasional perusahaan dan sebagai penunjang terlaksananya operasional perusahaan. *Cash flow* pada perusahaan juga memegang peranan yang dapat digunakan sebagai investasi melalui penanaman barang modal. Sumber *cash flow* yang diterima tersebut digunakan untuk membeli aset tetap, juga keperluan produksi barang dan jasa, ataupun untuk membeli bahan kepentingan produksi lainnya. Pengelolaan *cash flow* mengharuskan perusahaan

mempertimbangkan alternatif pembiayaan untuk pembelian aset tetap yang paling menguntungkan agar dapat meminimalkan pengeluaran perusahaan, juga meningkatkan keuntungan yang diperoleh.

Perusahaan memiliki dua alternatif pembiayaan yang dapat digunakan dalam hal pembelian barang modal perusahaan, yaitu dari internal dan eksternal. Pembiayaan dari sumber internal dihasilkan sendiri di dalam perusahaan, di antaranya adalah laba ditahan, modal saham, dan lain-lain. Pembiayaan dari sumber eksternal berasal dari luar perusahaan, di antaranya adalah pinjaman bank, sewa guna usaha (*sewa guna usaha*), dan pembelian kredit.

Metode pembiayaan memiliki kelebihan dan kekurangan yang terdapat dalam masing-masing sumber pembiayaan yang ada. Bagi perusahaan yang memiliki modal yang besar alternatif termudah adalah dengan menggunakan dana internal perusahaan, sebaliknya bagi perusahaan yang tidak mempunyai cukup modal, alternatif yang dipilih adalah pembiayaan dari luar perusahaan. Salah satu jenis pembiayaan barang modal yang mulai banyak digunakan perusahaan di Indonesia selain pinjaman dari bank adalah pembiayaan sewa guna usaha.

Sewa guna usaha sesuai Keputusan Menteri Keuangan No.1169/KMK.01/1991 adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*financial lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Sewa guna usaha dengan hak opsi (*financial lease*) yaitu apabila dalam transaksi perusahaan *lessor* bertindak sebagai pihak yang membiayai barang modal dimana secara berkala *lessor* menerima pembayaran sewa guna usaha dari *lessee* dan di akhir masa sewa terdapat hak opsi bagi *lessee*. Hak opsi adalah hak *lessee* untuk membeli barang modal yang disewa guna usahakan atau memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa guna usaha. Sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) yaitu apabila dalam transaksi perusahaan *lessor* membeli barang modal dan kemudian menyewa guna usahakannya kepada *lessee*, *lessee* tidak mempunyai hak opsi untuk membeli atau memperpanjang transaksi sewa guna usaha tersebut. (Zaki, 2007)

Keputusan pembiayaan menggunakan sewa guna usaha berdampak pada laporan keuangan pada setiap akhir periode yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi. Dalam pembuatan laporan keuangan tersebut transaksi sewa guna usaha diperlakukan dan dicatat sebagai aset tetap. Pencatatannya pembelian barang modal dengan menggunakan sistem sewa guna usaha baik secara akuntansi dan perpajakan memiliki pengakuan yang berbeda, serta pembelian aset dengan membeli secara *financial lease* dengan membeli secara tunai akan memiliki dampak perpajakan yang berbeda terhadap perusahaan. Perlakuan akuntansi untuk sewa guna usaha dalam hal ini *financial lease*, nilai dari aset sewa guna usaha akan tercantum di dalam laporan keuangan. Peraturan yang mengatur transaksi sewa guna usaha dalam akuntansi diatur dalam PSAK No. 30. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa aset tetap yang disewa guna usaha dikapitalisasi sesuai dengan jangka waktu sewa guna usaha dan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset tetap sebesar jumlah seluruh pembayaran sewa guna usaha ditambah dengan nilai sisa (hak opsi) yang harus dibayar pada akhir periode *sewa guna usaha*. Oleh karena itu, timbul pembebanan biaya amortisasi atas aset tetap sewa guna usaha yang dihitung berdasarkan taksiran manfaat yang diterapkan untuk aset tetap sejenis melalui kepemilikan langsung, sedangkan perlakuan sewa guna usaha menurut perpajakan, bila dibandingkan antara penerapan sewa guna usaha menurut akuntansi dan perpajakan, perbedaan penerapan sewa guna usaha terletak pada pembebanan biaya penyusutan (amortisasi) yang dilakukan menurut akuntansi pada saat periode *lease*. Berdasarkan peraturan KMK 1169/KMK.01/1991 pembebanan biaya penyusutan hanya dapat

dilakukan jika *lessee* telah menggunakan hak opsinya untuk membeli aset tersebut. Dasar penyusutan yang digunakan adalah sebesar nilai opsi dari aset tetap yang telah di sewa guna usaha. Atas perbedaan ini maka harus dilakukan koreksi fiskal atas biaya penyusutan tersebut. Fenomena yang terjadi dilapangan bahwa usaha mikro kecil dan menengah masih sangat jarang menerapkan alternatif leasing dalam perolehan aset tetap karena belum mengetahui manfaat perolehan metode leasing terutama dari sektor pajak dan tentunya dipandang perlu untuk melakukan evaluasi penerapan perolehan aset tetap menggunakan leasing dari sektor pajaknya.

Penelitian ini menggunakan KUBU CEMPAKA HOTEL sebagai lokasi penelitian. KUBU CEMPAKA HOTEL bergerak di bidang jasa penginapan (hotel), yang pendapatan utamanya berasal dari sewa kamar hotel. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya KUBU CEMPAKA HOTEL tentu harus memiliki cukup modal untuk memperoleh aset tetap. Terdapat transaksi pembelian aset tetap yang dilakukan oleh KUBU CEMPAKA HOTEL dengan mekanisme financial leasing sehingga perlu dilakukan analisis dampak perpajakan atas transaksi tersebut dan melakukan evaluasi apakah kebijakan pembelian dengan mekanisme *financial leasing* telah tepat dapat memberikan efisiensi dalam pembayaran pajak yang tetap berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN

Sewa Guna Usaha

Sewa guna usaha ialah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (opsi) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.

Definisi tersebut hanya menampung satu jenis sewa guna usaha yang lazim disebut *capital lease* atau sewa guna usaha pembiayaan. Namun demikian, dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988, jenis kegiatan sewa guna usaha telah diperluas sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan tersebut yang menampung definisi-definisi berikut ini :

- a. Perusahaan Sewa Guna Usaha adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara *finance lease* maupun *operating lease* untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.
- b. *Finance lease* adalah kegiatan sewa guna usaha, penyewa guna usaha pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli obyek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama.
- c. *Operating lease* adalah kegiatan sewa guna usaha penyewa guna usaha tidak mempunyai hak opsi untuk membeli obyek sewa guna usaha.
- d. Penyewa guna usaha (*lessee*) adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari pihak perusahaan sewa guna usaha (*lessor*) .

Standar Akuntansi Sewa Guna Usaha

Menurut ketentuan Pasal 3 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1998 tanggal dinyatakan bahwa sepanjang perjanjian sewa guna usaha masih berlaku, hak milik atas barang modal obyek transaksi sewa guna usaha berada pada perusahaan sewa guna usaha. Dengan demikian, selama jangka waktu sewa guna usaha, hak milik (*legal title*) atas aset yang disewa guna usahakan tetap berada pada perusahaan sewa guna usaha meskipun berdasarkan suatu perjanjian sewa guna

usaha bertanggungjawab atas penggunaan aset tersebut diserahkan kepada penyewa guna usaha.

Perlakuan akuntansi yang akan dilakukan oleh penyewa sewa guna usaha (*lessee*) sebagai berikut:

a. *Capital Lease*

- (1) Transaksi sewa guna usaha diperlakukan dan dicatat sebagai aset tetap dan kewajiban pada awal masa sewa guna usaha sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa guna usaha ditambah nilai sisa (harga opsi) yang harus dibayar oleh penyewa guna usaha pada akhir masa sewa guna usaha. Selama masa sewa guna usaha setiap pembayaran sewa guna usaha dialokasikan dan dicatat sebagai angsuran pokok kewajiban sewa guna usaha dan beban bunga berdasarkan tingkat bunga yang diperhitungkan terhadap sisa kewajiban penyewa guna usaha.
- (2) Tingkat diskonto yang digunakan untuk menentukan nilai tunai dari pembayaran sewa guna usaha adalah tingkat bunga yang dibebankan oleh perusahaan sewa guna usaha atau tingkat bunga yang berlaku pada awal masa sewa guna usaha.
- (3) Aset yang disewa guna usaha harus diamortisasi dalam jumlah yang wajar berdasarkan taksiran masa manfaatnya.
- (4) Kalau aset yang disewa guna usaha dibeli sebelum berakhirnya masa sewa guna usaha, perbedaan antara pembayaran yang dilakukan dan sisa kewajiban dibebankan atau dikreditkan pada tahun berjalan.
- (5) Kewajiban sewa guna usaha harus disajikan sebagai kewajiban lancar dan jangka panjang sesuai dengan praktik yang lazim untuk jenis usaha penyewa guna usaha.
- (6) Dalam hal dilakukan penjualan dan penyewaan kembali (*sales and leaseback*) maka transaksi tersebut harus diperlakukan sebagai dua transaksi yang terpisah yaitu transaksi penjualan dan transaksi sewa guna usaha. Selisih antara harga jual dan nilai buku aset yang dijual harus diakui dan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan. Amortisasi atas keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan harus dilakukan secara proporsional dengan biaya amortisasi aset yang disewa guna usaha apabila leaseback merupakan capital lease atau secara proporsional dengan biaya sewa apabila leaseback merupakan operating lease.

b. Sewa Menyewa Biasa (*Operating lease*)

Pembayaran sewa guna usaha selama tahun berjalan merupakan biaya sewa yang diakui dan dicatat berdasarkan metode garis lurus selama masa sewa guna usaha, meskipun pembayaran sewa guna usaha dilakukan dalam jumlah yang tidak sama setiap periode.

Peraturan Pajak Terkait Sewa Guna Usaha

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No.1169/KMK.01/1991 sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*financial lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

Barang modal adalah setiap aset tetap berwujud, termasuk tanah sepanjang di atas tanah tersebut melekat aset tetap berupa bangunan (*plant*), dan tanah serta aset dimaksud merupakan satu kesatuan kepemilikan, yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dan digunakan secara langsung untuk menghasilkan atau meningkatkan, atau memperlancar produksi dan distribusi barang atau jasa oleh *Lessee*. Penerapan Pajak Penghasilan bagi *lessee* adalah sebagai berikut :

- a. Selama masa sewa guna usaha, *lessee* tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewa guna usaha, sampai saat *lessee* menggunakan hak opsi untuk membeli;

- b. Setelah *lessee* menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut, *lessee* melakukan penyusutan dan dasar penyusutannya adalah nilai sisa (residual value) barang modal yang bersangkutan;
- c. Pembayaran sewa guna usaha yang dibayar atau terutang oleh *lessee* kecuali pembebanan atas tanah, merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto *lessee* sepanjang transaksi sewa-guna-usaha tersebut memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 Keputusan ini;
- d. Dalam hal masa sewa guna usaha lebih pendek dari masa yang ditentukan dalam Pasal 3 Keputusan ini, Direktur Jenderal Pajak melakukan koreksi atas pembebanan biaya sewa-guna-usaha.
- e. *Lessee* tidak memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pembayaran sewa guna usaha yang dibayar atau terutang berdasarkan perjanjian sewa-guna-usaha dengan hak opsi

METODE PENELITIAN

Jenis Data

1. Jenis Data Berdasarkan Sumber Data

Berdasarkan sumber datanya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Adapun data sekunder berupa jumlah unit dan harga dari aset yang dibeli oleh perusahaan, suku bunga, suku bunga yang akan digunakan sebagai *discount factor*, dan uang muka sewa guna usaha yang dibayarkan perusahaan.

2. Jenis Data Berdasarkan Sifat

Berdasarkan sifat datanya, maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar aset tetap dan penyusutannya, daftar sewa guna usaha, laporan laba/rugi dan neraca pada KUBU CEMPAKA HOTEL tahun 2016.

Prosedur Pengumpulan Data

1. Teknik Dokumentasi

Data dokumentasi yang digunakan berupa laporan keuangan perusahaan KUBU CEMPAKA HOTEL per 31 desember 2016.

2. Metode Observasi

Data yang dikumpulkan melalui observasi adalah data mengenai pembelian aset dengan metode *financial lease* oleh perusahaan lewat laporan keuangan yang telah dibuat oleh perusahaan.

Teknik Analisis

1. Teknik Analisis Data Kuantitatif

Teknik analisis kuantitatif dalam penelitian ini adalah menghitung biaya fiskal pada pembelian aset dengan metode *financial lease* dan pembelian secara tunai sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

2. Teknik Analisis Data Komperatif Deskriptif

Teknik analisis komperatif deskriptif dalam penelitian ini adalah membandingkan biaya fiskal yang terjadi akibat melakukan pembelian aset dengan metode *financial lease* dengan pembelian secara tunai berdasarkan aturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku tersebut. Kemudian mendeskripsikan hasil dari perbandingan dan perhitungan tersebut sesuai dengan permasalahan yang diangkat.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Gambaran Objek Penelitian

Sewa guna usaha atau sewa guna usaha merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang dapat digunakan oleh perusahaan sebagai alternatif untuk memperoleh aset tetap yang

dibutuhkan. Pada bulan agustus tahun 2016 KUBU CEMPAKA HOTEL mengadakan pembelian aset tetap berupa mobil Toyota Kijang Innova Reborn seharga 336.093.004

Harga Perolehan mesin : Rp. 336.093.004
 Nilai Opsi (50%) : Rp. 168.046.502
 Nilai Sewa guna usaha (50%) : Rp. 168.046.502
 Bunga sewa guna usaha : 14,2276%/tahun atau 1,1856%/bulan
 Lease term : 3 tahun atau 36 bulan

Tabel 1
 Perhitungan *financial lease* atas mobil toyota kijang innova reborn

Periode	Saldo Nilai Sewa guna usaha	Angsuran Pokok	Angsuran Bunga	Angsuran Per Bulan
	168.046.502			
1	164.273.361	3.773.141	1.992.359	5.765.500
2	160.455.486	3.817.875	1.947.625	5.765.500
3	156.592.347	3.863.140	1.902.360	5.765.500
4	152.683.405	3.908.941	1.856.559	5.765.500
5	148.728.120	3.955.286	1.810.214	5.765.500
6	144.725.940	4.002.179	1.763.321	5.765.500
7	140.676.311	4.049.629	1.715.871	5.765.500
8	136.578.670	4.097.642	1.667.858	5.765.500
9	132.432.446	4.146.223	1.619.277	5.765.500
10	128.237.065	4.195.381	1.570.119	5.765.500
11	123.991.944	4.245.121	1.520.379	5.765.500
12	119.696.492	4.295.452	1.470.048	5.765.500
13	115.350.114	4.346.378	1.419.122	5.765.500
14	110.952.205	4.397.909	1.367.591	5.765.500
15	106.502.154	4.450.051	1.315.449	5.765.500
16	101.999.344	4.502.810	1.262.690	5.765.500
17	97.443.148	4.556.196	1.209.304	5.765.500
18	92.832.934	4.610.214	1.155.286	5.765.500
19	88.168.061	4.664.873	1.100.627	5.765.500
20	83.447.882	4.720.179	1.045.321	5.765.500
21	78.671.740	4.776.142	989.358	5.765.500
22	73.838.972	4.832.768	932.732	5.765.500
23	68.948.907	4.890.065	875.435	5.765.500
24	64.000.865	4.948.042	817.458	5.765.500
25	58.994.159	5.006.706	758.794	5.765.500
26	53.928.094	5.066.065	699.435	5.765.500
27	48.801.966	5.126.129	639.371	5.765.500
28	43.615.062	5.186.904	578.596	5.765.500
29	38.366.662	5.248.400	517.100	5.765.500
30	33.056.037	5.310.625	454.875	5.765.500
31	27.682.450	5.373.588	391.912	5.765.500
32	22.245.153	5.437.297	328.203	5.765.500
33	16.743.391	5.501.761	263.739	5.765.500
34	11.176.401	5.566.990	198.510	5.765.500
35	5.543.408	5.632.993	132.507	5.765.500
36	-	5.543.408	65.723	5.765.500
		168.046.502	39.355.129	207.558.000

Analisis Data

1. Penerapan Sewa guna usaha dalam perusahaan

Perusahaan yakni KUBU CEMPAKA HOTEL menerapkan sewa guna usaha sebagai metode untuk memperoleh aset tetapnya, maka atas penerapan sewa guna usaha perusahaan perlu memerhatikan setiap ketentuan mengenai perlakuan sewa guna usaha menurut akuntansi dan perpajakan. Dalam penerapannya ada perbedaan antara perlakuan sewa guna usaha secara akuntansi dan secara perpajakan, perbedaan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Perlakuan Sewa guna usaha Menurut Akuntansi

Perlakuan akuntansi untuk sewa guna usaha dalam hal ini *financial lease*, nilai dari aset sewa guna usaha akan tercantum di dalam laporan keuangan. Peraturan yang mengatur transaksi sewa guna usaha dalam akuntansi diatur dalam PSAK No. 31. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa aset tetap yang disewa guna usaha dikapitalisasi sesuai dengan jangka waktu sewa guna usaha dan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset tetap sebesar jumlah seluruh pembayaran sewa guna usaha ditambah dengan nilai sisa (hak opsi) yang harus di bayar pada akhir periode *sewa guna usaha*. Oleh karena itu, timbul pembebanan biaya amortisasi atas aset tetap sewa guna usaha yang dihitung berdasarkan taksiran manfaat yang diterapkan untuk aktifa tetap sejenis melalui kepemilikan langsung,

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan atas objek sewa guna usaha yaitu mobil Toyota Kijang Innova pada tabel 4.3 maka penentuan nilai yang tercatat menurut akuntansi adalah sebagai berikut:

Nilai sewa guna usaha	Rp 168.046.502
Nilai opsi	<u>Rp 168.046.502</u>
Jumlah tercatat	Rp 336.093.004

Jumlah nilai perolehan keseluruhan yaitu nilai sewa guna usaha ditambah dengan nilai opsi merupakan jumlah nilai aset pada awal *lease* dan akan dicatat dengan jurnal sebagai berikut :

Kendaraan <i>lease</i>	Rp 336.093.004
Hutang <i>lease</i>	Rp 336.093.004

Pembayaran angsuran yang dilakukan perusahaan tiap bulannya selama 36 bulan, akan dicatat dalam jurnal sebagai berikut:

Pembayaran pada bulan pertama:	
Hutang <i>lease</i>	Rp 3.773.141
Beban Bunga	Rp 1.992.359
Kas	Rp 5.765.500

Jurnal tersebut digunakan terus untuk mencatat pembayaran sewa guna usaha selama 36 bulan selanjutnya dimana nilai hutang sewa guna usaha dan beban bunga sesuai dengan nilai yang telah dihitung dalam Tabel 1

Pada setiap akhir tahun selama periode *lease*, kendaraan sewa guna usaha tersebut harus dikapitalisasi dengan melakukan amortisasi *lease* sesuai dengan taksiran masa manfaat aset yaitu 8 tahun. Amortisasi dilakukan berdasarkan metode garis lurus dimana nilai amortisasi pertahunnya yaitu:

$$\text{Rp } 336.093.004 / 8 \text{ tahun} = \text{Rp } 42.011.625,5/\text{tahun}$$

Karena pembelian kendaraan oleh KUBU CEMPAKA HOTEL dilakukan pada bulan Oktober, amortisasi yang terjadi pada tahun 2016 hanya selama 4 bulan saja. Dengan perhitungan sebagai berikut:

$$(\text{Rp } 42.011.625,5 / 12) \times 4 = \text{Rp } 14.003.875,17$$

Berdasarkan perhitungan tersebut maka jurnal amortisasi kendaraan *lease* pada tahun 2016 yaitu:

Beban amortisasi mesin <i>lease</i>	Rp 14.003.875
Akumulasi amortisasi mesin <i>lease</i>	Rp 14.003.875

Pada laporan laba rugi tahun 2016 akan disajikan biaya amortisasi sebesar Rp 14.003.875 dan biaya bunga sebesar Rp 4.390.168

b. Perlakuan Sewa Guna Usaha Menurut Pajak

Bila dibandingkan antara penerapan sewa guna usaha menurut akuntansi dan perpajakan, perbedaan penerapan sewa guna usaha tersebut terletak pada pembebanan biaya penyusutan (amortisasi) yang dilakukan menurut akuntansi pada saat periode *lease*. Berdasarkan peraturan KMK 1169/KMK.01/1991 pembebanan biaya penyusutan hanya dapat dilakukan jika *lessee* telah menggunakan hak opsinya untuk membeli aset tersebut. Dasar penyusutan yang digunakan adalah sebesar nilai opsi dari aset tetap yang telah disewa guna usahakan. Atas perbedaan ini maka harus dilakukan koreksi fiskal atas biaya penyusutan tersebut.

2. Perbandingan Pembelian dengan Metode *Financial Lease* dan Pembelian Secara Tunai terhadap Jumlah Pajak Perusahaan

a. Prosedur Penentuan dalam Analisis Perbandingan

Penelitian ini akan membandingkan antara alternatif pembelian aset dengan metode *financial lease* dengan pembelian secara tunai. Hal tersebut dilakukan untuk dapat mengetahui alternatif mana yang lebih menguntungkan perusahaan dalam hal jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan.

Perbandingan yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan jumlah pajak, selain nilai nominal juga akan digunakan nilai tunai berdasarkan *Present Value Interest Factor* (PVIF) untuk memudahkan analisis yang akan dilakukan penulis. *Present Value Interest Factor* akan menggambarkan tentang berapa besar biaya yang akan dikeluarkan sehingga perusahaan tidak berbeda antara pengeluaran biaya saat ini atau pengeluaran biaya beberapa waktu lagi.

Rumus (1) PVIF = $1/(1+i)^n$

Rumus (2) PVIF = $1/(1+i/12)^n$

Keterangan:

i = tingkat suku bunga pinjaman (%)

n = periode (tahunan/bulanan)

Rumus (1) untuk periode tahunan, rumus (2) untuk periode bulanan. Tingkat suku bunga (i) pada PVIF yang akan digunakan dalam perhitungan merupakan tingkat suku bunga pinjaman bank secara rata-rata pada tahun perolehan aset tetap, yang diperoleh dari data statistik Bank Indonesia di tahun 2016.

Sebelum melakukan perhitungan, analisis perbandingan yang melibatkan perhitungan antara pembelian dengan metode *financial lease* dengan pembelian secara tunai, penulis menggunakan peraturan perpajakan yang berlaku sebagai dasar untuk memperoleh nilai perbedaan pajak antar dua alternatif tersebut. Diharapkan hasil atas perhitungan analisis ini mampu memberikan informasi yang berguna dari sudut pandang akuntansi maupun perpajakan.

Hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan analisis perbandingan ini antara lain:

- 1) Apabila membeli secara tunai, jumlah yang dapat dibiayakan (*deductable expenses*) dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak adalah biaya penyusutan.
- 2) Besarnya biaya penyusutan ditentukan berdasarkan metode penyusutan dan umur ekonomis yang didasari dari peraturan perpajakan yang berlaku.

- 3) Apabila membeli secara *sewa guna usaha*, semua biaya yang dikeluarkan untuk membayar *lease fee* tersebut dapat dibiayai oleh perusahaan.
- 4) Masa sewa guna usaha ditentukan sekurang-kurangnya 2 tahun untuk barang modal golongan I, 3 tahun untuk barang modal golongan II dan III serta 7 tahun untuk golongan bangunan.
- 5) Dalam pasal 16 KMK 1169/KMK.01/1991 diatur mengenai ketentuan perpajakan untuk *lease* yang melakukan transaksi *financial lease* sebagai berikut:
 - a) *Lessee* tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewa guna usaha sampai saat *lessee* membeli barang tersebut.
 - b) Setelah *lessee* menggunakan hak opsinya untuk membeli barang modal yang disewa guna usaha maka *lessee* boleh melakukan penyusutan dengan dasar hak opsi sebagai modal yang bersangkutan.
 - c) Pembayaran sewa guna usaha yang dibayar atau terutang oleh *lessee* kecuali pembebanan atas tanah merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto *lessee*.

b. Perbandingan Perhitungan *Financial Lease* dengan Pembelian Secara Tunai

Setelah menentukan yang diperlukan untuk melakukan analisis, akan dilakukan perhitungan untuk melakukan perbandingan antara alternatif *financial lease* dan pembelian secara tunai untuk dapat mengetahui perbedaan jumlah pajak yang akan dialami perusahaan lewat alternatif-alternatif tersebut.

1) Alternatif *Financial Lease*

Harga Perolehan Kendaraan: Rp 336.093.004

Nilai Opsi (50%): Rp 168.046.502

Nilai sewa guna usaha (50%): Rp 168.046.502

Bunga Sewa guna usaha: 14,23% per tahun atau 1,19% per bulan

Discount Factor: 13,48% per tahun atau 1,12% per bulan

Lease term: 3 tahun atau 36 Bulan

Nilai total *lease fee* secara nominal sebesar Rp 207.558.000, sedangkan berdasarkan nilai tunai dengan *discount rate* 13,48% sebesar Rp 169.945.337. semua *lease fee* ini dapat diakui sebagai *deductible expenses*. *Deductible expenses* merupakan biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. Selain *lease fee*, biaya penyusutan kendaraan setelah mengambil alih kendaraan dengan hak opsi biaya tersebut juga dapat digunakan sebagai pengurang. Nilai perolehan yang digunakan sebagai dasar penyusutan sebesar nilai opsi, dan dapat disusutkan sesuai dengan metode dan umur aset bersangkutan yang telah ditetapkan. Perhitungan biaya penyusutan berdasarkan nilai opsi yang diambil perusahaan, dapat disajikan sebagai berikut:

Nilai aset (nilai opsi)	: Rp 168.046.502
Umur aset	: 8 tahun
Metode penyusutan	: Garis lurus
<i>Discount rate</i>	: 13,48 per tahun atau 1,12% per bulan

Tabel 2
Perhitungan biaya penyusutan atas nilai opsi kendaraan sewa guna usaha

Tahun	Nilai Buku Aset tetap	Biaya Penyusutan	Saldo	Discount factor	Present value
				13,48%	
Tahun 1-3 tidak ada penyusutan karena sewa guna usaha					
4	168.046.502	21.005.812,75	147.040.689	0,60301	12.666.652
5	147.040.689	21.005.812,75	126.034.877	0,53138	11.162.027
6	126.034.877	21.005.812,75	105.029.064	0,46826	9.836.119
7	105.029.064	21.005.812,75	84.023.251	0,41263	8.667.713
8	84.023.251	21.005.812,75	63.017.438	0,36362	7.638.092
9	63.017.438	21.005.812,75	42.011.626	0,32043	6.730.788
10	42.011.626	21.005.812,75	21.005.813	0,28236	5.931.243
11	21.005.813	21.005.812,75	0	0,24882	5.226.687
	168.046.502				67.859.320

Berdasarkan tabel 4.6 , total biaya penyusutan sebesar nilai opsi yaitu Rp 168.046.502, dengan nilai tunai berdasarkan *discount rate* 13,48% yaitu sebesar Rp 67.859.320. Jumlah nilai perolehan keseluruhan kendaraan *lease* dan total nilai tunai yang dapat dibiayakan adalah sebagai berikut:

Jumlah angsuran Perbulan (<i>lease fee</i>)	Rp 207.558.000
Biaya penyusutan (nilai opsi)	<u>Rp 168.046.502</u>
Jumlah nilai perolehan keseluruhan	Rp 375.604.502
<i>Present value lease fee</i>	Rp 169.945.337
<i>Present value</i> biaya penyusutan	<u>Rp 67.859.320</u>
Jumlah nilai tunai	Rp 237.804.657

2) Alternatif Pembelian Tunai

Perusahaan melakukan pembelian secara tunai, maka yang dapat diakui sebagai biaya adalah biaya penyusutan. Untuk menghitung biaya penyusutan kendaraan digunakan metode garis lurus dengan umur aset selama 8 tahun.

Besarnya biaya penyusutan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Harga Perolehan	: Rp 336.093.004
Umur Aset	: 8 tahun
Metode Penyusutan	: Garis lurus
<i>Discount rate</i>	: 13,48 % pertahun

Tabel 3
Perhitungan biaya penyusutan atas nilai opsi
Kendaraan sewa guna usaha

Tahun	Nilai Buku Aset tetap	Biaya Penyusutan	Saldo	Discount factor	Present value
				13,48%	
1	336.093.004	42.011.625,50	294.081.379	0,88121	37.021.191
2	294.081.379	42.011.625,50	252.069.753	0,77654	32.623.540
3	252.069.753	42.011.625,50	210.058.128	0,68429	28.748.261
4	210.058.128	42.011.625,50	168.046.502	0,60301	25.333.304
5	168.046.502	42.011.625,50	126.034.877	0,53138	22.324.054
6	126.034.877	42.011.625,50	84.023.251	0,46826	19.672.238
7	84.023.251	42.011.625,50	42.011.626	0,41263	17.335.425
8	42.011.626	42.011.625,50	0	0,36362	15.276.183
	336.093.004				198.334.195

Berdasarkan tabel 4.7, diketahui bahwa nilai nominal dari akumulasi penyusutan adalah sebesar harga perolehan mesin yaitu Rp 336.093.004 dan nilai tunainya sebesar Rp. 198.334.195.

c. Hasil Perbandingan terhadap Jumlah Pajak

Tabel. 4
Perbandingan *deductible expense* per tahun

Keterangan (Tahun)	Sewa guna usaha			Pembelian Tunai	
	Lease Fee	Biaya Penyusutan	Pengurangan PPh (25%)	Biaya Penyusutan	Pengurangan PPh (25%)
1	69.186.000		17.296.500	42.011.625,50	10.502.906
2	69.186.000		17.296.500	42.011.625,50	10.502.906
3	69.186.000		17.296.500	42.011.625,50	10.502.906
4		21.005.812,75	5.251.453	42.011.625,50	10.502.906
5		21.005.812,75	5.251.453	42.011.625,50	10.502.906
6		21.005.812,75	5.251.453	42.011.625,50	10.502.906
7		21.005.812,75	5.251.453	42.011.625,50	10.502.906
8		21.005.812,75	5.251.453	42.011.625,50	10.502.906
9		21.005.812,75	5.251.453		-
10		21.005.812,75	5.251.453		-
11		21.005.812,75	5.251.453		-
	207.558.000	168.046.502	93.901.126	336.093.004	84.023.251

Perhitungan pada tabel 4.8 merupakan hasil perhitungan atas harga perolehan dan *deductible expense* per tahun baik secara sewa guna usaha dan secara tunai. Dasar perhitungan penghematan PPh sebesar 25% dari *deductible expense* yang didapat dari alternatif terjadi karena perusahaan menggunakan tarif PPh badan tunggal yang tertuang dalam Undang-Undang no. 36 tahun 2008, pada pasal 17 ayat 1 huruf b menyebutkan dimana tarif PPh tunggal untuk wajib pajak badan pada tahun 2009 sebesar 28% dan pada tahun 2010 diturunkan menjadi 25%.

Tabel. 5
Perbandingan nilai penghematan pajak per tahun

Keterangan (Tahun)	Pengurangan PPh		Penghematan Pajak	
	Sewa guna usaha	Pembelian Tunai	Sewa guna usaha	Pembelian Tunai
1	17.296.500	10.502.906	6.793.594	
2	17.296.500	10.502.906	6.793.594	
3	17.296.500	10.502.906	6.793.594	
4	5.251.453	10.502.906		5.251.453
5	5.251.453	10.502.906		5.251.453
6	5.251.453	10.502.906		5.251.453
7	5.251.453	10.502.906		5.251.453
8	5.251.453	10.502.906		5.251.453
9	5.251.453	-	5.251.453	
10	5.251.453	-	5.251.453	
11	5.251.453	-	5.251.453	
	93.901.126	84.023.251	36.135.140	26.257.266

Pada tabel di atas merupakan perincian perbandingan nilai penghematan pajak untuk setiap tahunnya antara alternatif *financial leasee* dan pembelian secara tunai. Pada tabel ini dapat dilihat bahwa pada saat masa sewa guna usaha yaitu selama 3 tahun pertama transaksi sewa guna usaha memberikan penghematan pajak yang lebih besar daripada pembelian aset secara tunai. Hal ini terjadi karena *deductible expense* yang dihasilkan dari *lease fee* lebih besar daripada nilai penyusutan yang didapatkan dari membeli aset secara tunai. Namun, setelah masa kontrak *leasing* berakhir pembelian secara tunai memberikan penghematan yang lebih besar walaupun sama-sama melakukan penyusutan, nilai penyusutan yang dihasilkan dari pembelian secara tunai lebih besar daripada menggunakan alternatif *sewa guna usaha*. Hal tersebut terjadi karena dasar penyusutan dari pembelian secara tunai adalah nilai perolehan, sedangkan dengan alternatif sewa guna usaha dasar penyusutannya adalah nilai opsi dari kendaraan. Namun, pada tahun 9-11 sewa guna usaha masih memberikan penghematan pajak kepada perusahaan sedangkan dengan alternatif pembelian secara tunai tidak, hal ini disebabkan karena penyusutan kendaraan dengan alternatif sewa guna usaha dimulai di tahun ke-4 saat masa kontrak habis dan perusahaan menggunakan hak opsi untuk membeli kendaraan.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi apakah kebijakan pembelian dengan mekanisme *financial leasing* telah tepat dapat memberikan efisiensi dalam pembayaran pajak yang tetap berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dengan membandingkan penghematan pajak antara perolehan aset secara *leasing* dengan secara tunai dan berfokus pada penghematan pajak yang menjadi tujuan dari perusahaan. Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pengujian hipotesis maka dapat disimpulkan bahwa antara pembelian secara tunai dan pembelian dengan metode *financial lease*, metode pembelian dengan metode *financial lease* merupakan pilihan yang lebih tepat untuk melakukan penghematan pajak perusahaan. Karena pembelian dengan metode *financial lease* memberikan penghematan pajak yang lebih besar terhadap perusahaan dibandingkan dengan melakukan pembelian secara tunai. Sebab pada saat KUBU CEMPAKA HOTEL menggunakan hak opsi yaitu pada tahun ke-4 maka secara perpajakan sudah dapat disusutkan oleh perusahaan, namun secara perpajakan tetap harus melakukan koreksi terhadap nilai penyusutan yang dilakukan perusahaan. Pada tahun ke-4 sampai dengan tahun ke-11 dasar perhitungan penyusutan yang dilakukan perusahaan adalah berdasarkan nilai keseluruhan untuk perolehan aset namun secara perpajakan yang diakui sebagai dasar perhitungan penyusutan setelah perusahaan membeli kendaraan sewa guna usaha menggunakan hak opsi adalah nilai dari hak opsi tersebut. Dengan begitu pada tahun ke-4 sampai dengan tahun ke-11 akan dilakukan koreksi terhadap nilai beban penyusutan kendaraan sewa guna usaha sebesar nilai beban penyusutan berdasarkan dari nilai hak opsi. Pada tahun ke-9 sampai dengan tahun ke-11 secara akuntansi sudah tidak ada beban penyusutan terhadap kendaraan *lease* tersebut namun secara pajak masih ada penyusutan karena penyusutan secara pajak baru dimulai dari tahun ke-4, jadi penyusutannya akan berakhir pada tahun ke-11. Dengan begitu maka pada tahun ke-9 sampai dengan tahun ke-11 harus dilakukan koreksi untuk menambahkan nilai penyusutan kendaraan *lease*, sebagai pengurang pendapatan kena pajak perusahaan.

SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis berkenaan dengan pokok pembahasan yang telah disajikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam perusahaan melakukan pembelian secara *financial lease* dingatkan untuk melakukan koreksi atas penyusutan barang sewa guna usaha agar terhindar dari temuan perpajakan atas transaksi sewa guna usaha yang dilakukan perusahaan.
2. KUBU CEMPAKA HOTEL mempertimbangkan lagi kedepan metoda alternatif *financial lease* dari pada membeli secara tunai karena dapat memberikan penghematan pajak lebih besar dibandingkan membeli secara tunai, namun tetap mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunadi.2009. *Akuntansi Pajak*. Edisi Ketiga. Grasindo. Jakarta
- Harnanto. 2013. *Perencanaan Pajak*. Edisi Pertama. BPFE .Yogyakarta
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2017. *Aset Tetap*. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 16 (Revisi 2017),DSAK-IAI. Jakarta
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2017. *Akuntansi Sewa Guna Usaha*. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 30 (Revisi 2017),DSAK-IAI. Jakarta
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 *Kegiatan Sewa Guna Usaha (leasing)*. 27 November 1991. Berita Negara Republik Indonesia. Jakarta.

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 ***Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. 20 Desember 1988. Berita Negara Republik Indonesia. Jakarta.***
- Mardiasmo. 2016. ***Perpajakan***. CV Andi Offset. Yogyakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 ***Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan***. 23 September 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 ***Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Atas Barang Mewah***. 15 Oktober 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 150. Jakarta
- Safitri dan Selvi. 2015. ***Penerapan Perencanaan Pajak Dalam Keputusan Pembelian Mobil Pick Up: Studi Kasus PT.INDIGO CAKRAWANGSA. Skripsi***. Sekolah Tinggi Ilmu Mandala Indonesia.
- Siregar, Syofian. 2014. ***Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif***. Bumi Aksara. Jakarta
- Sugiono. 2014. ***Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D***. Cetakan ke 20. Bandung
- Zaki Baridwan. 2008. ***Akuntansi Intermediate***. Edisi 8. BPFE. Yogyakarta

Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Serta Dampaknya Pada Alokasi Biaya Modal pada Pemerintah Kabupaten Gianyar

Anak Agung Gde Mantra Suarjana¹, Ni Nyoman Yintayani²

^{1,2}Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bali
Kampus Bukit Jimbaran-Bali, Telp.+62 361 701981
E-mail: agungsuarjana@gmail.com

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk menganalisis pengaruh Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Gianyar 2007-2016; (2) untuk menganalisis pengaruh Pajak Hotel dan Restoran terhadap Alokasi Biaya Modal Pemerintah Kabupaten Gianyar 2007-2016; (3) untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Alokasi Biaya Modal Pemerintah Kabupaten Gianyar 2007-2016; dan (4) Untuk menganalisis pengaruh Pajak Hotel dan Restoran terhadap Alokasi Biaya Modal dimediasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Gianyar 2007-2016. Sampel penelitian diambil dengan teknik *Purposive sampling* sesuai dengan tujuan peneliti dengan beberapa pertimbangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik regresi dengan variabel intervening. Hasil analisis data menunjukkan bahwa Pajak Hotel dan Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Gianyar 2007-2016. Pajak Hotel dan Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Biaya Modal Pemerintah Kabupaten Gianyar 2007-2016. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Biaya Modal Pemerintah Kabupaten Gianyar 2007-2016. Pajak Hotel dan Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Biaya Modal dimediasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Gianyar 2007-2016 tidak terbukti.

Kata kunci: pajak hotel dan restoran, pendapatan asli daerah, biaya modal.

Abstract: The purpose of this study are: (1) To analyze the influence of Hotel and Restaurant Tax on Local Government Revenue (PAD) of Gianyar Regency Government 2007-2016. (2) To analyze the influence of Hotel and Restaurant Tax on Capital Expenditure of Gianyar Regency Government 2007-2016. (3) To analyze the influence of Local Government Revenue (PAD) on Capital Expenditure Allocation of Gianyar Regency Government 2007-2016. (4) To analyze the influence of Hotel and Restaurant Tax on Capital Expenditure Allocation as mediating Local Government Revenue (PAD) of Gianyar Regency Government 2007-2016. The sample of research was taken by purposive sampling technique in accordance with the purpose of the researcher with some consideration. Data collection is done by documentation technique. Data analysis technique used is regression technique with intervening variable. The result of data analysis with significance 0,05 indicate that: Hotel and Restaurant Tax has positive and significant influence to Local Government Revenue (PAD) of Gianyar Regency Government 2007-2016. Hotel and Restaurant Tax has positive and significant influence to Capital Expenditure Allocation of Gianyar Regency Government 2007-2016. Local Government Revenue (PAD) has positive and significant influence on Capital Expenditure Allocation of Gianyar Regency Government 2007-2016. Hotel and Restaurant Tax has positive and significant influence to Capital Expenditure Allocation as mediating Local Government Revenue (PAD) of Gianyar Regency Government 2007-2016.

Keywords: Hotel and Restaurant Tax, Local Government Revenue, Capital Expenditure

PENDAHULUAN

Pariwisata Gianyar menjadi salah satu tumpuan pariwisata Bali mengalami perkembangan yang cukup menjanjikan. Berdasarkan monografi Kabupaten Gianyar, Kabupaten Gianyar memiliki beberapa faktor yang dapat menunjang pembangunan kepariwisataan. Faktor-faktor tersebut antara lain: (1) Kebudayaan dan kehidupan masyarakat yang bersumber pada kebudayaan; (2) Keindahan alam, peninggalan sejarah dan purbakala sebagai daya tarik wisata yang cukup mempesona; (3) Tersedianya fasilitas transportasi dan telekomunikasi yang memadai; (4) Fasilitas lain seperti hotel, *homestay*, dan restoran yang cukup banyak berkembang di sudut kota Gianyar. Kondisi lingkungan, objek daya tarik wisata yang dimiliki Gianyar menjadikannya daerah ini tujuan wisata yang tersohor di berbagai penjuru dunia. Banyak komunitas wisatawan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara berduyun-duyun ke Gianyar untuk menyaksikan atraksi budaya maupun sumber daya alam yang indah dan mempesona. Gianyar memiliki banyak daya tarik wisata, yang telah berkembang dan beberapa daya tarik wisata sangat potensial untuk dapat dikembangkan. Daya tarik wisata yang ada di antaranya: daya tarik peninggalan purbakala, daya tarik wisata budaya, daya tarik wisata bahari, daya tarik alam, daya tarik wisata rekreasi, daya tarik wisata wana, daya tarik wisata remaja dan sebagainya. Kamal dan Pramanik (2015) menyatakan bahwa sektor pariwisata merupakan sektor yang terintegrasi yang meliputi budaya, keindahan pemandangan, tempat arkeologi dan sejarah, sosial politik dan pembangunan infrastruktur.

Berkembangnya industri pariwisata di Kabupaten Gianyar telah mampu menggerakkan sektor-sektor yang mempunyai keterkaitan langsung dengan industri pariwisata, seperti sektor industri pengolahan, hiburan, perdagangan dan juga sektor hotel dan restoran. Dengan kondisi yang dimiliki, Kabupaten Gianyar merupakan sebagai salah satu Kabupaten di Bali sebagai tujuan wisata bagi wisatawan, sehingga kunjungan wisatawan ke Gianyar terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Besarnya kunjungan wisatawan berimplikasi pada penerimaan Pajak Hotel dan Restoran. Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah harus cerdas mengelola kinerja keuangannya, sehingga PAD meningkat secara signifikan. Dalam pengelolaan tersebut pemerintah daerah memerlukan informasi tentang potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki, sehingga perlu diketahui variabel-variabel yang dapat memengaruhi peningkatan PAD. Penyumbang PAD Kabupaten Gianyar terbesar berasal dari sektor pariwisata. Oleh karena itu, variabel dari sektor pariwisata yang memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pajak Hotel dan Restoran (PHR) perlu dicermati secara intensif. Pajak dari sektor pariwisata ini sangat dipengaruhi oleh jumlah kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Andirfa (2009) menyatakan otonomi daerah bertujuan memaksimalkan pembangunan daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan, serta meningkatkan layanan publik. Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan, diharapkan adanya peningkatan terhadap penerimaan dari sektor pajak, terutama Pajak Hotel dan Restoran. Besarnya Pajak Hotel dan Restoran, Pendapatan Asli Daerah, dan Alokasi Biaya Modal pada Pemerintah Kabupaten Gianyar tahun 2007-2016 seperti Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1
Pajak Hotel dan Restoran, Pendapatan Asli Daerah,
Alokasi Biaya Modal 2007-2016

Tahun	Pajak Hotel dan Restoran (dalam ribuan Rp)	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (dalam ribuan Rp)	Alokasi Biaya Modal (dalam Ribuan Rp)
2007	28.555.571	75.124.671	89.843.952
2008	43.586.184	96.922.244	98.582.120
2009	47.916.095	112.380.710	160.249.036
2010	62.933.306	153.617.895	109.959.088
2011	79.110.582	175.273.316	124.148.151
2012	86.104.717	261.222.178	120.627.457
2013	106.812.978	319.612.005	185.323.496
2014	145.070.837	424.472.546	201.181.086
2015	161.376.308	457.321.018	224.182.495
2016	206.849.398	529.864.618	309.917.612

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Gianyar, Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Dari Tabel 1 terlihat bahwa Pajak Hotel dan Restoran terus meningkat dari tahun 2007-2016. PAD juga mengalami peningkatan yang pesat dari tahun 2007-2016. Namun peningkatan Pajak Hotel dan Restoran, peningkatan PAD tidak disertai dengan peningkatan Biaya Modal secara terus menerus, pengeluaran Biaya Modal cenderung berfluktuasi. Pada awalnya pengeluaran Biaya Modal naik dari tahun 2007-2009, sedangkan tahun 2010 mengalami penurunan yang drastis. Pada tahun 2011 pengeluaran Biaya Modal kembali mengalami kenaikan, selanjutnya pada tahun 2012 kembali mengalami penurunan. Pada tahun berikutnya sejak 2013-2016 terus menunjukkan peningkatan. Peningkatan Pajak Hotel dan Restoran, peningkatan PAD, namun tidak disertai dengan peningkatan pengeluaran Biaya Modal. Fenomena ini menarik untuk dicermati terkait dengan hubungan variabel yang terkait.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis: (1) pengaruh Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Gianyar 2007-2016; (2) pengaruh Pajak Hotel dan Restoran terhadap Alokasi Biaya Modal Pemerintah Kabupaten Gianyar 2007-2016; (3) pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Alokasi Biaya Modal Pemerintah Kabupaten Gianyar 2007-2016; (4) pengaruh Pajak Hotel dan Restoran terhadap Alokasi Biaya Modal dimediasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Gianyar 2007-2016.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 20 dan 21, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel (Siahaan, 2009: 299-300). Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran (Siahaan, 2009: 327-328). Klasifikasi PAD menurut Mardiasmo (2002: 132) adalah PAD dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Mardiasmo (2009: 66) mengemukakan belanja pemerintah yang digunakan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah meliputi dua jenis yaitu belanja rutin dan belanja modal. Belanja modal meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja

modal jalan, irigasi, dan jaringan, serta belanja modal aset tetap lainnya. Penelitian-penelitian empiris juga menunjukkan hasil yang tidak konsisten mengenai hubungan antar variabel terkait. Hartiningsih dan Halim (2015) menjelaskan bahwa Pajak Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal, sehingga semakin tinggi pajak daerah akan berpengaruh terhadap peningkatan belanja modal. Wandira (2013) menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh antara PAD terhadap belanja modal, terdapatnya pengaruh signifikan antara DAU terhadap belanja modal namun berpola negatif. Berbeda dengan DAK dan DBH yang berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua dari dana perimbangan memengaruhi besarnya jumlah belanja modal. Permatasari dan Mildawati (2016) menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Darwanto dan Yustikasari (2007); Arwati dan Hadiati (2013), menyatakan bahwa PAD mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Sianturi (2010) menyatakan bahwa ada kaitan antara pajak daerah dan alokasi belanja modal, semakin besar penerimaan pajak, semakin besar PAD. Olatunji et al. (2009) menyatakan bahwa PAD merupakan sumber dalam pembiayaan belanja modal. Kartika dan Dwirandra (2014) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal, pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mampu memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah pada belanja modal tetapi dengan intensitas dan arah yang berlawanan. Pertiwi (2014) menyatakan bahwa pajak hotel dan restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD. Suartini dan Utama (2010) menemukan bahwa jumlah kunjungan wisatawan, pajak hiburan, pajak hotel dan restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD. Mentayani (2014) menjelaskan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak Daerah secara parsial mempunyai pengaruh yang positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hariyanto dan Adi (2006) menyatakan bahwa peningkatan pembangunan daerah tercipta dari ketersedianya infrastruktur yang baik di berbagai sektor. Gugus (2013) menguraikan bahwa PAD adalah sumber untuk menciptakan infrastruktur daerah. Felix (2012) menilai alokasi belanja modal seharusnya lebih diutamakan dari pada belanja lain yang tidak produktif, karena belanja modal merupakan komponen penting dalam pembangunan daerah dan pelayanan publik. Inuwa (2012) menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah, yakni belanja modal merupakan perangkat penting dalam mengendalikan suatu perekonomian. Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah dalam membangun aset tetap untuk pelayanan publik, sehingga akan memaksimalkan produktivitas perekonomian.

METODE PENELITIAN

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data tersebut diperoleh dari Dinas Pendapatan Kabupaten Gianyar berupa Pajak Hotel dan Restoran tahun 2007-2016. Data PAD Kabupaten Gianyar dari tahun 2007-2016 diperoleh dari Badan Pusat Statistik Propinsi Bali. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik dokumentasi. Sampel penelitian ini ditentukan dengan teknik *Purposive Sampling* yaitu sesuai dengan tujuan peneliti dengan pertimbangan yaitu: (1) Kabupaten Gianyar merupakan salah satu Kabupaten di Bali yang banyak mempunyai daya tarik wisata. (2) Kabupaten Gianyar terus-menerus

mengembangkan daya tarik wisata untuk demi kunjungan wisatawan, dalam rangka meningkatkan PAD. (3) Kondisi pariwisata Bali dalam kondisi normal, sehingga Pajak Hotel dan Restoran, PAD normal. Dengan demikian, data pada tahun 2017 tidak diikutsertakan, karena kondisi pariwisata Bali tidak dalam kondisi normal akibat adanya erupsi Gunung Agung September 2017 yang sangat memengaruhi sektor pariwisata Bali.

Untuk menjawab masalah yang dikemukakan, metode analisis datanya dengan analisis regresi variabel intervening yang mencakup tiga persamaan:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + e; \dots\dots\dots(1)$$

$$Z = \beta_0 + \beta_3 X + e; \dots\dots\dots(2)$$

$$Z = \beta_0 + \beta_3' X + \beta_2 Y + e; \dots\dots\dots(3)$$

Keterangan:

Y = Pendapatan Asli Daerah (PAD); X = Pajak Hotel dan Restoran; Z = Alokasi Biaya Modal; β_0 , β_0 , β_0 = konstanta. Koefisien β_3 ini berbeda dengan koefisien β_3' merupakan koefisien pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) X ke Z setelah mengendalikan Y. Variabel Y disebut variabel *mediator* atau *intervening* (Ghozali, 2012: 248). Variabel Y dinyatakan sebagai variabel mediasi sempurna (*perfect mediation*), jika setelah memasukkan variabel Y pengaruh variabel X terhadap variabel Z menurun menjadi nol ($\beta_3' = 0$) atau pengaruh variabel X terhadap Z yang tadinya signifikan (sebelum memasukkan variabel Y) menjadi tidak signifikan setelah memasukkan variabel Y ke dalam model persamaan regresi. Pengaruh X terhadap Z menurun tidak sama dengan nol dengan memasukkan variabel Y, maka terjadi mediasi parsial. Untuk menganalisis variabel intervening, maka Pajak Hotel dan Restoran dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Hotel dan Restoran dengan Biaya Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Biaya Modal harus berhubungan secara linear. Untuk mempermudah analisis dalam penyelesaian penelitian ini dengan menggunakan aplikasi analisis *multi variate* dengan Program IBM SPSS 24.

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kajian penelitian empiris, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

1. Hipotesis 1 (H1): Pajak Hotel dan Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Gianyar 2007-2016.
2. Hipotesis 2 (H2): Pajak Hotel dan Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Biaya Modal Pemerintah Kabupaten Gianyar 2007-2016.
3. Hipotesis 3 (H3): Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Biaya Modal Pemerintah Kabupaten Gianyar 2007-2016.
4. Pajak Hotel dan Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Biaya Modal dimediasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Gianyar 2007-2016.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil *output* SPSS 24 terkait dengan normalitas data variabel Pajak Hotel dan Restoran, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Alokasi Biaya Modal seperti Tabel 2. Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa variabel Pajak Hotel dan Restoran, variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan variabel Alokasi Biaya Modal,

Asymp. Sig. (2-tailed) semuanya lebih besar dari 0,05. Ini berarti semua variabel tersebut berdistribusi normal berdasarkan uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test.

Tabel 2
Normalitas Variabel Pajak Hotel dan Restoran,
Pendapatan Asli Daerah dan Alokasi Biaya Modal

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test				
		Pajak Hotel dan Restoran	Pendapatan Asli Daerah (Pad)	Alokasi Biaya Modal
N		10	10	10
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	96831597.60	260581120.10	162401449.30
	Std. Deviation	57892811.900	164460695.100	69047414.410
Most Extreme Differences	Absolute	.173	.198	.210
	Positive	.173	.198	.210
	Negative	-.119	-.141	-.147
Test Statistic		.173	.198	.210
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}	.200 ^{c,d}	.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Uji linearitas dengan grafik menunjukkan bahwa hubungan antara Pajak Hotel dan Restoran dengan Alokasi Biaya Modal, hubungan Pajak Hotel dan Restoran dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Alokasi Biaya Modal, arah garis ke kanan atas yang menunjukkan hubungan yang bersifat linear dan positif. Untuk uji autokorelasi diperoleh angka Durbin-Watson 1,308. Angka D-W 1,308 terletak diantara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi (Santosa, 2012: 243). Uji *Homoskedastisitas* dengan menggunakan Uji *Rho Spearman* terpenuhi, di mana Sig. (2-tailed) Pajak Hotel dan Restoran (0,855), Pendapatan Asli Daerah (0,855) > 0,05 yang berarti homoskedastisitas terpenuhi. Dengan demikian, model regresi memenuhi prasyarat asumsi klasik. Model regresi variabel intervening dari hasil uji dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + e; \dots \dots \dots (1)$$

$$Z = \beta_0 + \beta_3 X + e; \dots \dots \dots (2)$$

$$Z = \beta_0 + \beta_3' X + \beta_2 Y + e; \dots \dots \dots (3)$$

Pembahasan untuk menjawab Hipotesis 1 (H1). Hipotesis 1 (H1) dalam penelitian ini adalah: Pajak Hotel dan Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Gianyar 2007-2016. Hasil Uji t antara Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan asli Daerah (PAD) seperti Tabel 3.

Tabel 3
Coefficients^a Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	10920676.100	17968444.410		-.608	.560
Pajak Hotel dan Restoran	2.804	.161	.987	17.371	.000

a. Dependent Variable: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Sumber: Data diolah, *output* SPSS 24, 2018

Berdasarkan Tabel 3 Hasil Uji t, untuk Pajak Hotel dan Restoran diketahui bahwa $t = 17,371$ dengan $Sig. t = 0,000$. Hasil $Sig. t = 0,000$ lebih kecil dari 0,05 berarti koefisien regresi Pajak Hotel dan Restoran signifikan. Artinya Pajak Hotel dan Restoran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Gianyar 2007-2016. Koefisien regresi tersebut positif, maka dapat diinterpretasikan bahwa Pajak Hotel dan Restoran memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Gianyar. Artinya, jika Pajak Hotel dan Restoran meningkat, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkat secara signifikan. Jadi, Hipotesis 1 (H1) yang menyatakan: Pajak Hotel dan Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Gianyar 2007-2016 terbukti atau dapat diterima. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya seperti: Pertiwi (2014) menyatakan bahwa pajak hotel dan restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD. Suartini dan Utama (2010) menemukan bahwa jumlah kunjungan wisatawan, pajak hiburan, pajak hotel dan restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD. Mentayani (2014) menjelaskan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak Daerah secara parsial mempunyai pengaruh yang positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pembahasan untuk menjawab Hipotesis 2 (H2). Hipotesis 2 (H2) dalam penelitian ini adalah: Pajak Hotel dan Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Biaya Modal Pemerintah Kabupaten Gianyar 2007-2016. Hasil Uji t antara Pajak Hotel dan Restoran terhadap Alokasi Biaya Modal seperti Tabel 4.

Tabel 4
Coefficients^a Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	54291480.790	16510141.130		3.288	.011
Pajak Hotel dan Restoran	1.116	.148	.936	7.528	.000

a. Dependent Variable: ALOKASI BIAYA MODAL

Sumber: Data diolah, *output* SPSS 24, 2018

Berdasarkan Tabel 4 Hasil Uji t, untuk Pajak Hotel dan Restoran diketahui bahwa $t = 7,528$ dengan $Sig. t = 0,000$. Hasil $Sig. t = 0,000$ lebih kecil dari 0,05 berarti koefisien regresi Pajak Hotel dan Restoran signifikan. Pengujian pengaruh antara Pajak Hotel dan Restoran terhadap Alokasi Biaya Modal tersebut signifikan. Artinya Pajak Hotel dan Restoran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Alokasi Biaya Modal Pemerintah Kabupaten Gianyar 2007-2016. Koefisien regresi tersebut positif, maka dapat diinterpretasikan bahwa Pajak Hotel dan Restoran memiliki pengaruh positif terhadap Alokasi Biaya Modal Pemerintah Kabupaten Gianyar. Artinya, jika Pajak Hotel dan Restoran meningkat, maka Alokasi Biaya Modal akan meningkat secara signifikan. Jadi, Hipotesis 2 (H2) yang menyatakan: Pajak Hotel dan Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Biaya Modal Pemerintah Kabupaten Gianyar 2007-2016 terbukti atau dapat diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Hartiningsih dan Halim (2015) menemukan bahwa Pajak Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal, sehingga semakin tinggi pajak daerah akan berpengaruh terhadap peningkatan belanja modal. Permatasari dan Mildawati (2016) menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Sianturi (2010) menyatakan bahwa ada kaitan antara pajak daerah dan alokasi belanja modal, semakin besar penerimaan pajak, semakin besar PAD.

Pembahasan untuk menjawab Hipotesis 3 (H3). Hipotesis 3 (H3) dalam penelitian ini adalah: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Biaya Modal Pemerintah Kabupaten Gianyar 2007-2016. Hasil Uji t antara Pajak Hotel dan Restoran terhadap Alokasi Biaya Modal seperti pada Tabel 5.

Tabel 5
Coefficients^a Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
	B	Std. Error	Beta	t Sig.
1 (Constant)	63218808.870	19026262.690		3.323 .010
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	.381	.063	.907	6.076 .000

a. Dependent Variable: ALOKASI BIAYA MODAL

Sumber: Data diolah, *output* SPSS 24, 2018

Berdasarkan Tabel 5 Hasil Uji t, untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) diketahui bahwa $t = 6,076$ dengan $Sig. t = 0,000$. Hasil $Sig. t = 0,000$ lebih kecil dari 0,05 berarti koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah (PAD) signifikan. Artinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Alokasi Biaya Modal Pemerintah Kabupaten Gianyar 2007-2016. Koefisien regresi yang ditemukan tersebut adalah positif, maka dapat diinterpretasikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh positif terhadap Alokasi Biaya Modal Pemerintah Kabupaten Gianyar. Artinya, jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat, maka Alokasi Biaya Modal akan meningkat secara signifikan. Jadi, Hipotesis 3 (H3) yang menyatakan: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Biaya Modal Pemerintah Kabupaten Gianyar 2007-2016 terbukti atau dapat diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Permatasari dan Mildawati (2016) yang menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Darwanto dan Yustikasari (2007); Arwati dan Hadiati (2013), menyatakan bahwa PAD mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

Pembahasan untuk menjawab Hipotesis 4 (H4). Hipotesis 4 dalam penelitian ini adalah: Pajak Hotel dan Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Biaya Modal dimediasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Gianyar 2007-2016. Hasil Uji t regresi berganda seperti Tabel 6.

Tabel 6
Coefficients^a Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	512099.920	17180625.320		2.981	.020
Pajak Hotel dan Restoran	1.908	.939	1.599	2.032	.082
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-.282	.331	-.672	-.854	.421

a. Dependent Variable: ALOKASI BIAYA MODAL

Sumber: Data diolah, *output* SPSS 24, 2018

Berdasarkan Tabel 6 di atas diketahui bahwa Pajak Hotel dan Restoran $t = 2,032$ dengan Sig. t adalah $0,082$ yang lebih besar dari $0,05$ yang berarti koefisien regresi Pajak Hotel dan Restoran tidak signifikan. Dengan memerhatikan Tabel 4 pada analisis hubungan langsung antara Pajak Hotel dan Restoran terhadap Alokasi Biaya Modal dengan regresi linear sederhana ditemukan bahwa koefisien regresi Pajak Hotel dan Restoran adalah $0,936$ dan signifikan. Koefisien regresi Pajak Hotel dan Restoran sebelum dimasukkan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke dalam persamaan regresi berganda adalah $0,936$ dan koefisien ini signifikan. Pada Tabel 6 menunjukkan bahwa koefisien regresi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Alokasi Biaya Modal setelah dimasukkan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke dalam persamaan regresi berganda, koefisien regresinya adalah $1,599$ dan tidak signifikan. Prasyarat yang harus dipenuhi adalah koefisien regresi antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Alokasi Biaya Modal sebagai variabel intervening harus signifikan. Berdasarkan Tabel 6 diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) $t = -0,854$ dengan Sig. t adalah $0,421$ yang lebih besar dari $0,05$ yang berarti koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak signifikan. Dengan demikian, persyaratan signifikan untuk koefisien Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) bukan sebagai variabel intervening terkait hubungan antara Pajak Hotel dan Restoran terhadap Alokasi Biaya Modal. Ini berarti, hubungan antara Pajak Hotel dan Restoran terhadap Alokasi Biaya Modal tidak dimediasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian, Hipotesis 4 yang menyatakan: Pajak Hotel dan Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Biaya Modal dimediasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak terbukti atau tidak dapat diterima. Hubungan antara Pajak Hotel dan Restoran terhadap Alokasi Biaya Modal pada dasarnya bersifat hubungan langsung, bukan dimediasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan yang dapat disampaikan untuk menjawab masalah yang diajukan adalah sebagai berikut: (1) Pajak Hotel dan Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Gianyar 2007-2016; (2) Pajak Hotel dan Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Biaya Modal Pemerintah Kabupaten Gianyar 2007-2016; (3) Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Biaya Modal Pemerintah Kabupaten Gianyar 2007-2016; dan (4) Pajak Hotel dan Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Biaya Modal dimediasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Gianyar 2007-2016 tidak terbukti atau tidak dapat diterima. Berdasarkan simpulan yang diperoleh, maka saran yang relevan adalah penerimaan Pajak Hotel dan Restoran oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar hendaknya diupayakan seefektif dan semaksimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat secara signifikan yang berimplikasi pada peningkatan Alokasi Biaya Modal dalam upaya pengembangan/peningkatan infrastruktur untuk kenyamanan wisatawan, sehingga tingkat perekonomian dan kesejahteraan meningkat khususnya bagi masyarakat Kabupaten Gianyar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ana Pertiwi, N.L.G. (2014). Pengaruh Kunjungan Wisatawan , Retribusi Objek Wisata dan PHR terhadap PAD Kabupaten Gianyar. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, Vol. 3, No 3, 115-123.
- Andirfa, M. (2009). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Skripsi tidak diterbitkan. Universitas Syah Kuala, Banda Aceh.
- Arwati, D. dan Novita. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat. *Skripsi tidak diterbitkan*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Wydiatama, Bandung.
- Darwanto dan Yustikasari, Y. (2007). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *E-article Simposium Nasional Akuntansi X*, Makassar 26-28 Juli 2007.
- Felix, O. (2012). Analysis of The Effectiveness of Capital Expenditure Budgeting in The Local Government System of Ondo State. *Journal of Accounting and Taxation*, Vol. 4, No 1, 1-6. Diakses 25 Mei 2018 dari https://www.researchgate.net/publication/311744392_Analysis_of_the_effectiveness_of_capital_expenditure_budgeting_in_the_local_government_system_of_Ondo_State_Nigeria.
- Ghozali, H.I. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 20*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartiningsih, N. dan Halim, E.H. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Propinsi Riau. *Jurnal Tepak Manajemen Bisnis*, Vol.7, No 2, 258-269.

- Hariato, D. dan Adi, P.A. (2006). Hubungan Antara Dana Alokasi umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan Per Kapita. *Simposium Nasional Akuntansi X*, Makassar.
- Inuwa, N. (2012). Government Expenditure and Economic Growth in Nigeria: Cointegration Analysis and Causality Testing. *Academic Research International*, Vol 2, No 3, 718-723, diakses 24 Mei 2018 dari [http://www.savap.org.pk/journals/ARInt./Vol.2\(3\)/2012\(2.3-88\).pdf](http://www.savap.org.pk/journals/ARInt./Vol.2(3)/2012(2.3-88).pdf)
- Kamal, M. dan Pramanik, S.A.K. (2015). Identifying Factors Influencing Visitor to Visit Museum in Bangladesh and Setting Marketing Strategies for Museums. *IOSR Journal of Business and Management*, Vol. 17, No 10, 85-92, diakses 23 Mei 2018 dari <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Data%20Download/JURNAL%20kamal%20dan%20pramanik.pdf>.
- Kartika Jaya, I.P.N.P dan Dwirandra, A.A.N.B. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.7, No 1, 79-92.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049. (2009). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta.
- Mardiasmo. (2007). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi
- Mentayani, I., Rusmanto dan Mirda, L. (2014). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten dan Kota di Propinsi Kalimantan Selatan. *Dinamika Ekonomi Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 7, No 1, 30-43.
- Olatunji, O. C., Asaolu Taiwo, O. and Adewoye, J.O. (2009). A Review of Revenue Generation in Nigeria Local Government: A Case Study of Ekiti State. *Journal of International Business Management*, Vol. 3, No 3, 54-60.
- Permatasari, I. dan Mildawati, T. (2016). Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Jawa Timur". *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 5, No 1, 1-17.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta.
- Santosa, S. (2012). *Statistik Parametrik: Konsep dan Aplikasi dengan SPSS*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Siahaan, M.P. (2009). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers.
- Sianturi, A. (2010). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, *Skripsi tidak diterbitkan*. Program Sarjana Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Suartini, N.N. dan Suyana Utama, M. (2013). Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gianyar. *E-jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.3, No 3, 175-189.
- Wandira, A. G. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap

Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*, Vol. 2, No 1, 44-51.

